



**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

LKJIP

**LAPORAN
PEMERINTAH
TAHUN 2022**

KINERJA

INSTANSI

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Tahun 2022. LKjIP Sekretariat Daerah Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen nyata Sekretariat Daerah dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Sekretariat Daerah telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Sekretariat Daerah.

Tujuan penyusunan LKjIP ini untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Pimpinan atas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung yang telah dan seharusnya dicapai, juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun, semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Temanggung, 1 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



Drs. HARY AGUNG PRABOWO, M.M.

Pembina Utama Madya
NIP. 19680119 199311 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
1. Latar Belakang	2
2. Tugas Pokok dan Fungsi	2
3. Susunan Organisasi	6
4. Isu Strategis	8
B. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKjIP	10
1. Dasar Hukum	10
2. Tujuan LKjIP	11
3. Manfaat LKjIP	12
C. SISTEMATIKA LKjIP	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	14
A. RENCANA STRATEGIS	14
1. Visi Daerah	14
2. Misi Daerah	15
3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Program	17
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA	17
C. <i>CASCADING</i>	19
D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2022	21

BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	27
A.	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	27
1.	Capaian Indikator Kinerja	29
2.	Capaian Kinerja Sasaran dan Indikator Program	46
B.	AKUNTABILITAS KEUANGAN	99
1.	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022	99
2.	Analisa Efisiensi	144
BAB IV	PENUTUP	146
A.	TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA	146
B.	STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA MENDATANG	147
LAMPIRAN	148

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	PNS Menurut Pendidikan	5
Tabel 1.2.	PNS Menurut Eselon	6
Tabel 2.1.	Tujuan dan Sasaran Misi 3 (Ketiga) RPJMD Tahun 2018 – 2023 Untuk Tahun Ke - IV (2022)	17
Tabel 2.2.	Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Setda Kabupaten Temanggung.....	18
Tabel 2.3.	Program dan Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja sasaran pada indikator kinerja utama.....	18
Tabel 2.4.	<i>Cascading</i> Perangkat Daerah.....	20
Tabel 2.5.	Rencana Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2022	22
Tabel 3.1.	Kriteria Penilaian	28
Tabel 3.2.	Indikator Kinerja Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022	29
Tabel 3.3.	Indikator Kinerja Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022.....	30
Tabel 3.4.	Penilaian Reformasi Birokrasi Kab. Temanggung Tahun 2017-2022 TW IV	30
Tabel 3.5.	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2021	31
Tabel 3.6.	Nilai IKM Unit Pelayanan di Kabupaten Temanggung Tahun 2022.....	32
Tabel 3.7.	Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 1 Tahun 2022.....	35
Tabel 3.8.	Kategori Penilaian Indeks EPPD.....	36
Tabel 3.9.	Nilai EPPD Tahun 2017 s.d 2022 Triwulan IV	36
Tabel 3.10.	Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 2 Tahun 2022.....	39
Tabel 3.11.	Indeks Tata Kelola PBJ tahun 2017 s.d Tanggal 31 Desember 2022 (Triwulan IV – 2022)	41
Tabel 3.12.	Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 3 Tahun 2021	43
Tabel 3.13.	Komponen Penilaian AKIP	44
Tabel 3.14.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2017-2022 TW III	44
Tabel 3.15.	Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2021	45
Tabel 3.16.	Capaian Indikator Kinerja Program 1	47
Tabel 3.17.	Pilar Batas yang Terinventarisir di Kabupaten Temanggung Tahun 2017 - 2022 Triwulan IV.....	48
Tabel 3.18.	Cakupan pilar batas yang terinventarisir berdasarkan Permendagri tentang Batas Kabupaten Temanggung dengan Daerah yang berbatasan yang telah ditetapkan	

Tahun 2017- 2022 Triwulan IV.....	48
Tabel 3.19. Perangkat Daerah yang Melaporkan SPM Tepat Waktu di Kabupaten Temanggung Tahun 2017 – 2022 Triwulan IV ..	51
Tabel 3.20. Kecamatan yang Tertib Administrasi di Kabupaten Temanggung Tahun 2017 – 2022 Triwulan IV ..	53
Tabel 3.21. Capaian Indikator Kinerja Program 1	55
Tabel 3.22. Persentase rumah ibadah kondisi baik Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2022.....	56
Tabel 3.23. Capaian Indikator Kinerja Program 1	57
Tabel 3.24. Realisasi Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung, Tahun 2017-2022 s.d Triwulan IV	58
Tabel 3.25. Dokumentasi Perundangan melalui JDIH Tahun 2017-2022 s.d Triwulan IV	60
Tabel 3.26. Permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi Tahun 2017-2022 s.d Triwulan IV	61
Tabel 3.27. Permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi Tahun 2017-2022 s.d Triwulan IV	63
Tabel 3.28. Anggaran Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat .	64
Tabel 3.29. Capaian Indikator Kinerja Program 2 Tahun 2022.....	65
Tabel 3.30. Persentase Ketersediaan Produk Barang Bersubsidi	66
Tabel 3.31. Persentase Jaminan Keamanan Produk Barang Bersubsidi Kabupaten Temanggung, Tahun 2017-2022 s.d Triwulan IV..	68
Tabel 3.32. Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP Kabupaten Temanggung.....	72
Tabel 3.33. Data BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP Kabupaten Temanggung.....	73
Tabel 3.34. Capaian Indikator Kinerja Program 2 Tahun 2022.....	74
Tabel 3.35. Persentase Kegiatan yang Selesai Tepat Waktu di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2022 s/d Triwulan IV.....	75
Tabel 3.36. Persentase Pelaporan Kegiatan PD/Unit Kerja Selesai Tepat Waktu di Kabupaten Temanggung Tahun 2017 s.d 2022 Triwulan IV.....	
Tabel 3.37. Persentase Pelaporan Kegiatan PD/Unit Kerja Selesai Tepat Waktu di Kabupaten Temanggung Tahun 2022 s/d Triwulan IV.....	77
Tabel 3.38. Persentase Capaian Kegiatan Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2017 s.d 2022 s/d Triwulan IV.....	78
Tabel 3.39. Persentase Capaian Kegiatan Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2022 s/d Triwulan IV.....	79
Tabel 3.40. Capaian Indikator Kinerja Program 2 Tahun 2022.....	80

Tabel 3.41. Prosentase pengadaan barang dan jasa yang berhasil dilaksanakan tahun 2017 s.d Tanggal 31 Desember 2022 (Triwulan IV – 2022)	81
Tabel 3.42. Persentase penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan barang/jasa tahun 2017 s.d Tanggal 31 Desember 2022 (Triwulan IV – 2022)	84
Tabel 3.43. Persentase kegiatan perangkat daerah yang melakukan pencatatan non-Tender atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa tahun 2017 s.d Triwulan IV – 2022	86
Tabel 3.44. Anggaran Program Perekonomian dan Pembangunan	87
Tabel 3.45. Capaian Indikator Kinerja Program 3 Tahun 2022.....	89
Tabel 3.46. Presentase Pemenuhan Administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	90
Tabel 3.47. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah	91
Tabel 3.48. Capaian Indikator Kinerja Program 3 Tahun 2022.....	92
Tabel 3.49. Komponen Penilaian AKIP	93
Tabel 3.50. Persentase perangkat daerah berpredikat B dalam pembuatan LKjIP Tahun 2017 s.d 2022	93
Tabel 3.51. Capaian Indikator Kinerja Program 3 Tahun 2022.....	94
Tabel 3.52. sentase Pelayanan Kepala Daerah yang Terlayani Tahun 2022	95
Tabel 3.53. Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	96
Tabel 3.54. Realisasi Anggaran per Bagian Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022.....	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. PNS Menurut Jenis Kelamin.....	5
Gambar 1.2. Gambar struktur organisasi SOTK Setda Kabupaten Temanggung	5
Gambar 3.1. Persentase Capaian Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah.	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH

1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran melalui suatu pelaporan yang disebut Laporan Kinerja.

Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja sehingga mampu meningkatkan peran serta fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat serta mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah terdiri dari:

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
 1. Bagian Pemerintahan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 - a) Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan; dan
 - b) Sub Koordinator Kerjasama dan Otonomi Daerah.
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:

- a) Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat;
dan
 - b) Sub Koordinator Bina Mental.
3. Bagian Hukum, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
- a) Sub Koordinator Perundang-Undangan;
 - b) Sub Koordinator Bantuan Hukum; dan
 - c) Sub Koordinator Pengawasan Produk Hukum, Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas:
- 1. Bagian Perekonomian, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 - a) Sub Koordinator Ekonomi Daerah; dan
 - b) Sub Koordinator Badan Usaha Milik Daerah.
 - 2. Bagian Pembangunan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 - a) Sub Koordinator Administrasi Pembangunan; dan
 - b) Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan.
 - 3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, terdiri atas Sub Bagian, yaitu:
 - a) Sub Bagian Pengelolaan dan Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - b) Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
- c. Asisten Administrasi Umum, terdiri atas:
- 1. Bagian Umum, terdiri atas Sub Bagian, yaitu:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
 - c) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

2. Bagian Organisasi, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 - a) Sub Koordinator Kelembagaan dan Analisis Jabatan; dan
 - b) Sub Koordinator Pelayanan Publik, Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi.
3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri atas Sub Bagian, yaitu:
 - a) Sub Bagian Protokol dan Dokumentasi Pimpinan; dan
 - b) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam pelaksanaan tugasnya, asisten-asisten masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. Bagian-bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten yang bersangkutan. Sub Bagian-sub bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan. Sub Koordinator-sub koordinator bertanggung jawab kepada Asisten yang bersangkutan melalui Kepala Bagian yang bersangkutan. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

Sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera.

Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, dapat dirinci sebagai berikut:

a. Menurut Pendidikannya:

Berdasarkan pendidikan, SDM Sekretariat Daerah didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 34,9% atau 43 orang, disusul oleh jenjang pendidikan SMA sebanyak 40 orang atau 32,5%, Pegawai dengan pendidikan D3 sebanyak 15,4% atau 17 orang dan S2 sebanyak 14 orang atau 11,3 %. Sedangkan lulusan SMP sebanyak 3 orang 2,4 dan SD sebanyak 9 orang 7,3%. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

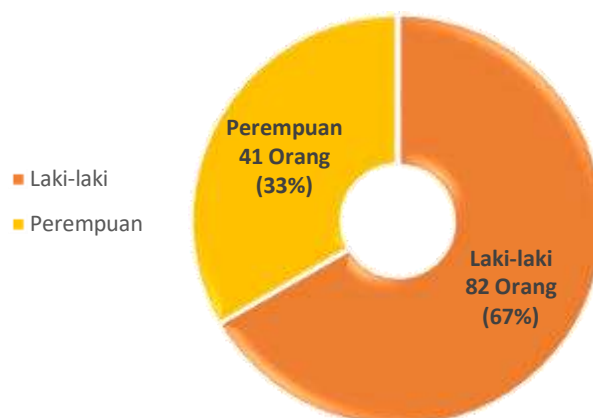
Tabel 1.1.
PNS Menurut Pendidikan

NO	JENJANG	JUMLAH
1	SD	9
2	SMP	3
3	SMA	40
4	Diploma I-DIII	11
5	Diploma IV / S1	46
6	S2	14
7	S3	0

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat Daerah

b. Menurut Jenis Kelamin:

Jumlah pegawai di lingkungan Setda sebanyak 123 Orang, didominasi oleh laki-laki sebanyak 82 Orang atau 67%.



Gambar 1.1.
PNS Menurut Jenis Kelamin

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat Daerah

c. Menurut Eselon

Sementara bila dipilah lagi menurut eselon, datanya menunjukkan bahwa semakin tinggi eselon, persentase perempuan semakin meningkat. Beberapa upaya telah didorong untuk membuat pengembangan karir perempuan semakin terbuka termasuk dalam posisi-posisi strategis dalam pengambilan keputusan. Apalagi karena melihat data sebelumnya, bahwa dari segi jenjang pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan, kesenjangan gendernya justru semakin kecil.

Tabel 1.2.
PNS Menurut Eselon

NO	ESELON	JUMLAH
1	II	4
2	III	9
3	IV	7
4	JFT	9
TOTAL		29

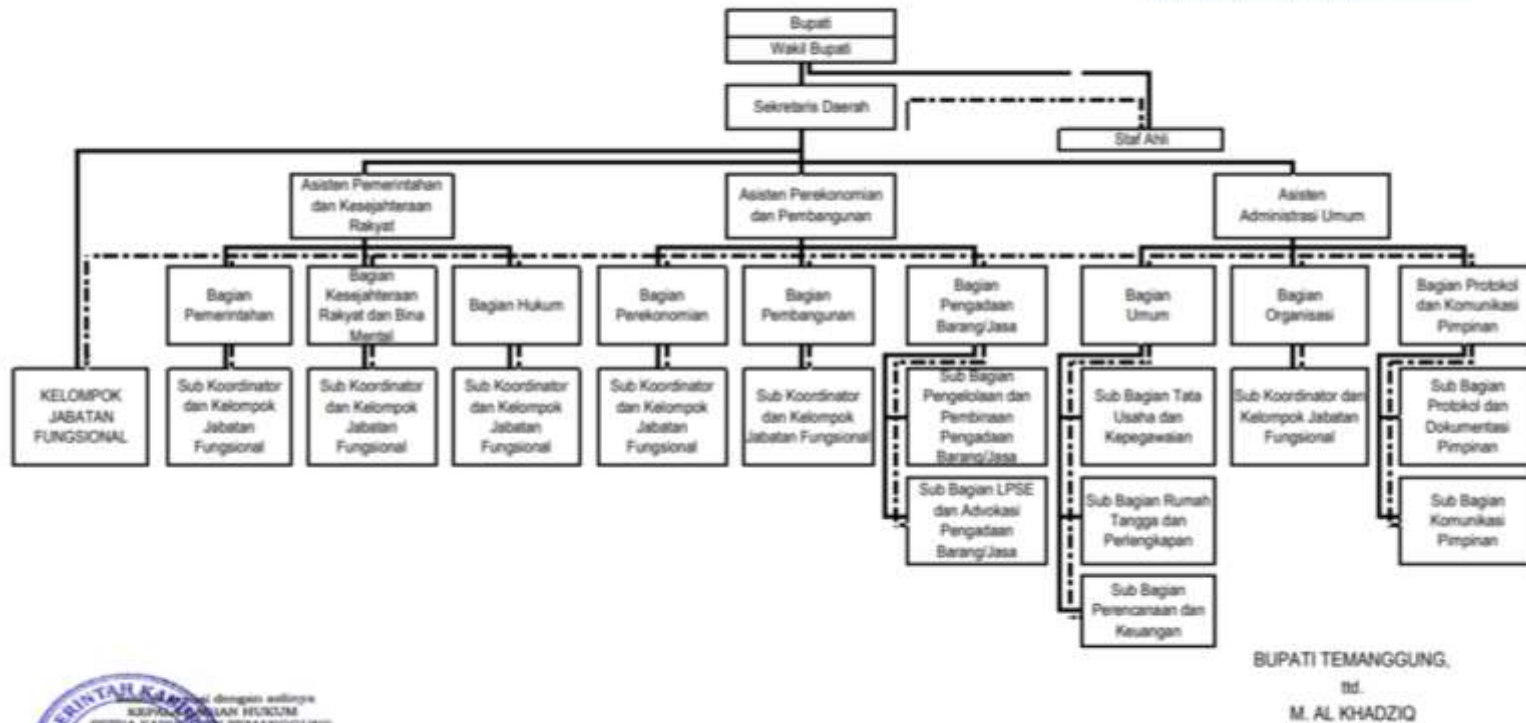
Sumber: Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Setda

3. Susunan Organisasi

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Bagan SOTK sebagai berikut:

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 110 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



Gambar 1.2. Gambar struktur organisasi SOTK Setda Kabupaten Temanggung

4. Isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pokok per urusan pemerintahan daerah dan dikaitkan dengan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki serta keberlanjutan pembangunan daerah, maka permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dan menjadi isu strategis dalam perencanaan pembangunan di Sekretariat Daerah yaitu:

a. Optimalisasi Kualitas Pelayanan Sekretariat Daerah

- Banyaknya agenda kegiatan pimpinan yang harus dilaksanakan
- Adanya kegiatan/acara pimpinan daerah yang dilaksanakan diluar dari rencana atau yang sudah diagendakan
- Perubahan waktu pelaksanaan kegiatan pimpinan yang mendadak
- Belum liniernya perencanaan kinerja dari RPJMD s.d SKP
- Adanya missing link pada perencanaan kinerja Pemkab Temanggung serta belum semua terintegrasi antara perencanaan PD, RPJMD, Renstra, PK dan SKP, termasuk di Sekretariat Daerah.
- Belum maksimalnya persiapan perencanaan dari OPD dan kebijakan dari masing masing kepala OPD dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa
- Adanya mapping anggaran yang mengakibatkan penjadwalan ulang pengadaan barang dan jasa sehingga pelaksanaannya menjadi tertunda;
- Beban kerja yang tinggi tidak sesuai dengan jumlah SDM yang ada
- Kurangnya SDM yang berkompeten dalam perencanaan sehingga masih tergantung dengan OPD teknis

- Banyaknya aplikasi baru serta data yang harus diinput/dilaporkan dalam waktu bersamaan
- SDM pelayanan yang masih perlu peningkatan kapasitas, sarana dan prasarana yang belum semuanya baik
- Belum terinternalisasinya budaya kerja di tingkat Perangkat Daerah maupun Unit Kerja
- Pejabat belum sepenuhnya memahami atas prinsip RB
- Komitmen pimpinan yang masih perlu ditingkatkan

b. Optimalisasi Penyelenggaraan dan Tata Kelola Pemerintahan

- Adanya perangkat daerah yang tidak tepat waktu dalam penyampaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan data yang kurang lengkap
- Lambatnya penyampaian laporan bulanan dari Kecamatan dan kurang lengkapnya data
- Kurangnya koordinasi antara perangkat daerah pengusul peraturan daerah dengan bagian hukum sewaktu fasilitator dalam penyusunan dokumen peraturan Bupati.
- Lambatnya penyetoran produk hukum dari setiap OPD serta karena kelemahan dari aplikasi yang belum mampu memenuhi kebutuhan pendokumentasian beberapa produk hukum yang memiliki volume tebal
- Permasalahan dalam penyusunan RDKK, distribusi, manajemen stok maupun kendala teknis dalam penggunaan kartu tani, sedangkan terkait distribusi LPG masih ditemukan HET LPG subsidi di beberapa pangkalan ada yang tidak sesuai ketentuan.
- Koreksi dan perhitungan ulang spesifikasi teknis dengan adanya regulasi terkait TKDN.
- Belum semua barang mempunyai sertifikat TKDN.

- Pemeriksaan KAP (Kantor Akuntan Publik) atas laporan keuangan BUMD dilakukan dalam satu anggaran dan dilakukan pada awal tahun berikutnya. Oleh sebab itu, hingga triwulan empat belum dapat diketahui opini audit laporan BUMD oleh Akuntan Publik
- Setiap aduan masyarakat untuk dilengkapi secara tertulis dan bukti pendukung seperti dokumentasi atau video.
- Keterbatasan anggaran pengadaan patok untuk batas wilayah yang hilang
- Belum adanya cadangan patok pilar batas wilayah
- Patok pilar batas wilayah hilang terbawa arus sungai
- Lokasi pemasangan patok pilar batas wilayah sulit dijangkau
- Pindahnya arus sungai yang menjadi batas wilayah

B. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKjIP

1. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda No 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk:

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Pimpinan atas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung yang telah dan seharusnya dicapai.
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

3. Manfaat LKjIP

Manfaat penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2022 ini yaitu:

- a. Sebagai sarana penilaian terhadap capaian kinerja selama 1 tahun.
- b. Memberikan informasi terkait SAKIP perangkat daerah.

C. SISTEMATIKA LKJIP

Sitematika penyajian LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang
2. Tugas Pokok dan Fungsi
3. Susunan Organisasi
4. Isu Strategis yang sedang di hadapi organisasi

B. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKJIP

1. Dasar Hukum
2. Tujuan LKJIP
3. Manfaat LKJIP

C. SISTEMATIKA LKJIP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. VISI daerah
2. MISI daerah
3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah

B. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

C. *Cascading* PD

D. Rencana Anggaran/anggaran Tahun 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Indikator Kinerja Utama
2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisa Kinerja

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022
2. Analisa Efisiensi

C. PRESTASI dan PENGHARGAAN

BAB IV PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. VISI

Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud, adalah:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG
TENTREM, MAREM, GANDEM”**

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

- Tentrem*** : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem*** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata
- Gandem*** : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

2. MISI

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

Penjelasan Makna Misi:

Misi Pertama, Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

Misi Kedua, Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok

masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

Misi Ketiga, Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*publik service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: Kecepatan, Ketepatan, Keramahan, dan Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada

komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program. Tujuan dan sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi RPJMD. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam RPJMD Tahun 2018–2023 berdasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan.

Berikut ini disajikan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung menurut misi 3 (Ketiga) dalam RPJMD.

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Misi 3 (Ketiga) RPJMD Tahun 2018 – 2023 Untuk Tahun Ke - IV (2022)

TUJUAN	SASARAN
Misi 3 (Ketiga): Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung mempunyai Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019

tanggal 18 Desember 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Adapun Indikator Kinerja Utama dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Setda Kabupaten Temanggung

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumus	Sumber Data
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Akumulasi dari penilaian terhadap variabel indeks capaian kinerja	Asisen Pemerintahan dan Kesra
2	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Batang Jasa (PBJ)	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	Nilai kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ ditambah nilai kemantapan dibagi 2	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Nilai kumulatif dari perencanaan pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian di Kabupaten Temanggung	Asisten Administrasi Umum

Program dan Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja sasaran pada indikator kinerja utama Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung pada dokumen RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Program dan Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja sasaran pada indikator kinerja utama

INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN
Asisten Pemerintahan dan Kesra		
Meningkatnya Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan
		Fasilitasi Kerjasama Daerah
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
Asisten Perekonomian dan Pembangunan		
Meningkatnya Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Asisten Administrasi		
Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
		Penataan Organisasi
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		

C. CASCADING PERANGKAT DAERAH

Setiap Organisasi Perangkat Daerah dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan

Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Cascading Perangkat Daerah

TUJUAN	
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	
SASARAN	
Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan	
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)
Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)
PROGRAM	KEGIATAN
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan
	Fasilitasi Kerjasama Daerah
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
Program Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
	Penataan Organisasi
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2022

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2022, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2022 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2022 Tanggal 26 Oktober 2022, Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022.

Jumlah anggaran berdasarkan Rencana Kerja (Renja) tahun 2022 sebesar Rp92.712.114.602, sementara berdasarkan APBD sebesar Rp71.890.951.668 atau berkurang sebesar (Rp20.821.162.934). Adapun rincian belanja berdasarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan masing-masing bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung sebagai berikut.

Tabel 2.5.
Rencana Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2022

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENJA (Rp)	ANGGARAN (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)
SEKRETARIAT DAERAH	92.712.114.602	71.890.951.668	-20.821.162.934
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	42.683.120.900	37.905.536.200	-4.777.584.700
BAGIAN PEMERINTAHAN	250.000.000	139.997.000	-110.003.000
Administrasi Tata Pemerintahan	235.000.000	134.997.200	-100.002.800
Penataan Administrasi Pemerintahan	60.000.000	19.999.800	-40.000.200
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	70.000.000	9.997.400	-60.002.600
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	105.000.000	105.000.000	0
Fasilitasi Kerjasama Daerah	15.000.000	4.999.800	-10.000.200
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	15.000.000	4.999.800	-10.000.200
BAGIAN KESRA	41.333.121.000	36.024.211.200	-5.308.909.800
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	41.333.121.000	36.024.211.200	-5.308.909.800
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	900.000.000	785.000.500	-114.999.500
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	39.533.121.000	34.603.121.000	-4.930.000.000
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	900.000.000	636.089.700	-263.910.300
BAGIAN HUKUM	1.099.999.900	1.741.328.000	641.328.100
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.099.999.900	1.741.328.000	641.328.100
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	99.999.900	99.999.900	0
Fasilitasi Bantuan Hukum	750.000.000	1.591.328.100	841.328.100
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	250.000.000	50.000.000	-200.000.000
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	14.607.997.000	2.789.690.500	-11.818.306.500
BAGIAN PEREKONOMIAN	13.077.997.000	2.106.831.500	-10.971.165.500
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	240.319.900	152.716.000	-87.603.900
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi	100.000.000	97.716.000	-2.284.000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENJA (Rp)	ANGGARAN (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)
Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	140.319.900	55.000.000	-85.319.900
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	0	0	0
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	12.837.677.100	1.954.115.500	-10.883.561.600
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	12.837.677.100	1.954.115.500	-10.883.561.600
BAGIAN PEMBANGUNAN	230.000.000	230.000.000	0
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	230.000.000	230.000.000	0
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	75.000.000	75.000.000	0
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	155.000.000	155.000.000	0
BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA	1.300.000.000	452.859.000	-847.141.000
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.300.000.000	452.859.000	-847.141.000
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	425.000.000	200.000.000	-225.000.000
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	550.000.000	152.859.000	-397.141.000
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	325.000.000	100.000.000	-225.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	35.420.996.702	31.195.724.968	-4.225.271.734
BAGIAN UMUM	30.804.996.702	27.097.438.968	-3.707.557.734
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.072.515.664	13.790.333.906	-1.282.181.758
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.072.515.664	13.790.333.906	-1.282.181.758
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	289.590.900	0	-289.590.900
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	79.590.900	0	-79.590.900
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	210.000.000	0	-210.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.399.976.250	3.859.925.100	-540.051.150

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENJA (Rp)	ANGGARAN (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	199.996.850	149.995.500	-50.001.350
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	249.997.000	199.995.500	-50.001.500
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200.000.000	149.999.300	-50.000.700
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	300.000.000	260.000.000	-40.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	49.983.400	49.928.300	-55.100
Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.000.000.000	2.250.000.000	250.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.399.999.000	800.006.500	-599.992.500
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	374.995.352	279.735.000	-95.260.352
Pengadaan Mebel	199.997.300	0	-199.997.300
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	279.735.000	279.735.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	174.998.052	0	-174.998.052
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.874.994.000	4.674.804.472	-200.189.528
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	15.000.000	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.200.000.000	1.098.400.000	-101.600.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	160.000.000	119.994.000	-40.006.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.499.994.000	3.441.410.472	-58.583.528
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.229.841.200	1.918.837.540	-311.003.660
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	250.000.000	250.000.000	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	749.993.900	691.591.000	-58.402.900

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENJA (Rp)	ANGGARAN (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Pemeliharaan Mebel	74.945.000	29.985.740	-44.959.260
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	274.997.300	99.990.700	-175.006.600
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	24.914.800	19.903.600	-5.011.200
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	854.990.200	827.366.500	-27.623.700
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	772.680.336	169.876.950	-602.803.386
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	772.680.336	169.876.950	-602.803.386
Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2.790.403.000	2.403.926.000	-386.477.000
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	350.000.000	335.964.000	-14.036.000
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	314.000.000	317.983.500	3.983.500
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	2.126.403.000	1.749.978.500	-376.424.500
BAGIAN ORGANISASI	75.000.000	114.445.500	39.445.500
Penataan Organisasi	75.000.000	114.445.500	39.445.500
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	25.000.000	65.000.000	40.000.000
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	25.000.000	24.445.500	-554.500
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	25.000.000	25.000.000	0
BAGIAN PROKOMPIM	4.541.000.000	3.983.840.500	-557.159.500
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	889.250.000	889.176.000	-74.000
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	249.250.000	249.176.000	-74.000
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	40.000.000	40.000.000	0

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENJA (Rp)	ANGGARAN (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000	600.000.000	0
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3.651.750.000	3.094.664.500	-557.085.500
Fasilitasi Keprotokolan	950.000.000	952.414.500	2.414.500
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.955.000.000	1.350.500.000	-604.500.000
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	746.750.000	791.750.000	45.000.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut digunakan untuk menilai tingkat capaian pelaksanaan kinerja guna mewujudkan sasaran-sasaran dengan indikator kinerja tertentu sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang direalisasikan melalui program dan kegiatan. Tingkat pencapaian sasaran-sasaran merupakan gambaran tingkat pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang mencakup fungsi pemberdayaan, pembangunan dan pelayanan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2022 merupakan laporan kinerja tahun ke 4 (empat) dari periodisasi berlakunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023, dengan tingkat pencapaian sasaran indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung pada misi 3 (ketiga).

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Temanggung dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN dan RB No. 12 tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi skala nilai dan kriteria penilaian untuk kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk Outcome.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

Tabel 3.1.
Kriteria Penilaian

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan
3	BB	>70-80	Sangat Baik
4	B	>60-70	Baik
5	CC	>50-60	Cukup (Memadai)
6	C	>30-50	Kurang
7	D	0-30	Sangat Kurang

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran daerah dengan berpedoman pada hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian IKU diperoleh berdasarkan pengukuran atas Indikator Kinerja Tujuan yang ditetapkan dalam Renstra, yang selanjutnya diukur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 3.2.
Indikator Kinerja Tujuan Sekretariat Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TARGET			KONDISI	RUMUS	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2021	2022	2023				
Misi 3: Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas													
Tujuan: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik berkualitas													
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	62,00	62,76	64,00	62,70	64,00	64,50	65,00	Target Baru	Kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi, pemerintah yang bersih, bebas KKN dan kualitas pelayanan publik	Dinilai oleh Kementerian PAN dan RB	Setda
			62,00	-	64,00	-	66,00	68,00	70,00	Target Lama			
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	84,00	79,75	85,00	80,41	80,50	81,00	82,00	Target Baru	Hasil survey indeks kepuasan masyarakat : nilai rata-rata dari hasil survey di perangkat daerah	-	Setda
			84,00	-	85,00	-	86,00	87,00	89,00	Target Lama			

Tabel 3.3.
Indikator Kinerja Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2022

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Capaian 2021	2022			Renstra 2019-2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks reformasi Birokrasi	angka	63,42	64,5	63,42	98,33	65	63,42	97,57
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	82,06	81	83,41	100	82	83,41	100
		72,74			99,17			98,79

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, tahun 2022 Indeks reformasi Birokrasi sebesar 63,42 dari target 64,5 atau tercapai 98,33%. Sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 83,41 dari target 81 atau tercapai 100 %. Secara keseluruhan capaian sasaran ini di tahun 2022 sebesar 99,17% masuk dalam kategori Sangat Memuaskan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 72,74% mengalami kenaikan.

a. Indeks Reformasi Birokrasi

Data penilaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Temanggung dari tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Penilaian Reformasi Birokrasi Kab. Temanggung
Tahun 2017-2022 TW IV

NO	TAHUN	NILAI
1	2017	58,45
2	2018	61,28
3	2019	62,76
4	2020	62,7
5	2021	63,42
6	2022	*63,42

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Temanggung

Nilai indeks penilaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung Tahun 2022 masih menggunakan angka/nilai Tahun 2021 karena hasil penilaian indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dari Kementerian PAN dan RB belum release, tetapi fasilitasi ditingkat Kabupaten sudah selesai.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, simpulan hasil evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2021 adalah 63,42 dengan kategori “B”. Rincian hasil evaluasi tersebut sebagai berikut:

Tabel 3.5.
Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2021

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2020	2021
A	Komponen Pengungkit			
I.	Pemenuhan	20,00	12,62	12,72
II.	Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,13	5,49
III.	Reform	30,00	13,26	13,61
	Total Komponen Pengungkit	60,00	31,00	31,82

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2020	2021
B.	Komponen Hasil			
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,21	7,35
2	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,48	8,21
3	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,03	8,59
4	Kinerja Organisasi	10,00	6,98	7,45
	Total Komponen Hasil	40,00	31,70	31,60
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100,00	62,70	63,42

Sumber: Kementerian PAN dan RB

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan upaya implementasi reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung dan hasil evaluasi tahun 2021 menunjukkan upaya implementasi Reformasi Birokrasi dari tahun sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan target Renstra sebesar 70 maka di tahun 2022 Indeks Reformasi Birokrasi sudah tercapai 97,57%.

Faktor yang mendorong pencapaian nilai ini adalah Pelaksanaan RB yang dilakukan sudah sesuai Road Map yang

ditetapkan, sedangkan faktor penghambatnya adalah belum kuatnya komitmen dari pimpinan organisasi dalam rangka perbaikan di seluruh area yang ditetapkan. Adapun strategi/tindak lanjut yang dilakukan adalah memberikan sosialisasi dan proses pendampingan dari Kemenpan RB, Internalisasi Budaya Kerja.

b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pada tahun 2022, Kabupaten Temanggung telah melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat secara mandiri terhadap pelaksanaan Pelayanan Publik, adapun hasil Survey Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6.
Nilai IKM Unit Pelayanan di Kabupaten Temanggung
Tahun 2022

No	Unit Pelayanan	Tahun 2022	
		IKM Unit Pelayanan	Mutu
1	Dinas pendidikan, Pemuda dan Olahraga	89,19	B (Baik)
2	Dinas Kesehatan	87,31	B (Baik)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	81,55	B (Baik)
4	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	78,19	B (Baik)
5	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	77,75	B (Baik)
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	90,97	A (Sangat Baik)
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	84,69	B (Baik)
8	Dinas Sosial	82,22	B (Baik)
9	Dinas Perhubungan	79,07	B (Baik)
10	Dinas Perumahan Rakyat, Kawassan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	76,95	B (Baik)
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	80,58	B (Baik)
12	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	87,51	B (Baik)
13	Dinas Penanaman Modal	86,71	B (Baik)
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	77,7	B (Baik)
15	RSUD	84,09	B (Baik)
16	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	87,27	B (Baik)
17	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah	84,04	B (Baik)
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	81,52	B (Baik)
19	Bagian PBJ	82	B (Baik)
20	Kecamatan Temanggung	85,32	B (Baik)

No	Unit Pelayanan	Tahun 2022	
		IKM Unit Pelayanan	Mutu
21	Kecamatan Kranggan	84,38	B (Baik)
22	Kecamatan Pringsurat	76,67	B (Baik)
23	Kecamatan Kandangan	84,41	B (Baik)
24	Kecamatan Kaloran	80,63	B (Baik)
25	Kecamatan Kedu	89,52	A (Sangat Baik)
26	Kecamatan Tlogomulyo	83,84	B (Baik)
27	Kecamatan Tembarak	87,41	B (baik)
28	Kecamatan Selopampang	86,2	B (Baik)
29	Kecamatan Bulu	86,7	B (Baik)
30	Kecamatan Parakan	81,02	B (Baik)
31	Kecamatan Kledung	82,5	B (Baik)
32	Kecamatan Bansari	82	B (Baik)
33	Kecamatan Ngadirejo	89,32	A (Sangat Baik)
34	Kecamatan Gemawang	82,25	B (Baik)
35	Kecamatan Jumo	85,25	B (Baik)
36	Kecamatan Candiroto	84,87	B (Baik)
37	Kecamatan Bejen	85,5	B (Baik)
38	Kecamatan Wonobojo	84,44	B (Baik)
39	Kecamatan Tretep	84,02	B (Baik)
40	Puskesmas Temanggung	84,18	B (Baik)
41	Puskesmas Dharmarini	84,41	B (Baik)
42	Puskesmas Kranggan	78,38	B (Baik)
43	Puskesmas Pare	88,26	B (Baik)
44	Puskesmas Pringsurat	80,47	B (Baik)
45	Puskesmas Rejosari	79,1	B (Baik)
46	Puskesmas Kaloran	76,62	B (Baik)
47	Puskesmas Tepusen	87,25	B (Baik)
48	Puskesmas Kandangan	80,92	B (Baik)
49	Puskesmas Jumo	89,09	A (Sangat Baik)
50	Puskesmas Gemawang	79,37	B (Baik)
51	Puskesmas Kedu	77,47	B (Baik)
52	Puskesmas Tlogomulyo	77,88	B (Baik)
53	Puskesmas Tembarak	95,4	A (Sangat Baik)
54	Puskesmas Selopampang	82,89	B (Baik)
55	Puskesmas Bulu	89,89	A (Sangat Baik)
56	Puskesmas Parakan	84,27	B (Baik)
57	Puskesmas Traji	84,29	B (Baik)
58	Puskesmas Kledung	77,87	B (Baik)
59	Puskesmas Bansari	78,68	B (Baik)
60	Puskesmas Ngadirejo	82,53	B (Baik)
61	Puskesmas Banjarsari	83,47	B (Baik)
62	Puskesmas Candiroto	81,25	B (Baik)
63	Puskesmas Bejen	84,36	B (Baik)
64	Puskesmas Wonobojo	81,02	B (Baik)

No	Unit Pelayanan	Tahun 2022	
		IKM Unit Pelayanan	Mutu
65	Puskesmas Tretep	83,18	B (Baik)
Nilai Rata-rata IKM		83,41	B (Baik)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata IKM Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah 83,41 dengan predikat B (Baik). Jika dibandingkan dengan target Renstra sebesar 82 maka di tahun 2022 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sudah tercapai 100%.

Faktor yang mendorong capaian nilai di atas adalah Penerapan pelayanan online, mempermudah akses, pemanfaatan teknologi informasi di beberapa unit pelayanan serta perbaikan beberapa sarpras yang mendukung pelayanan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah SDM pelayanan yang masih perlu peningkatan kapasitas dan kompetensi serta peningkatan sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar. Adapun Solusi / tindak lanjut yang dilakukan adalah dengan melaksanakan Diklat/ BinteK pelayanan prima.

Sasaran Strategis 1. Meningkatnya nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD).

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 untuk sasaran strategis 1 Meningkatnya Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan Realisasi IKU. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa nilai capaian kinerja sasaran 1 sebesar 97 % dari target Renstra atau kategori Sangat Memuaskan Sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.7.
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 1 Tahun 2022

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Capaian 2021	2022			Renstra 2019-2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Angka	3,35	3,45	3,35	97	3,5	3,35	95,71

Secara keseluruhan capaian sasaran ini di tahun 2022 sebesar 95,71% Jika dibandingkan tahun 2021, Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) sama dengan tahun 2021. Hal ini dikarenakan Penilaian EPPD dilakukan oleh Tim Nasional yang terdiri dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Teknis dan/atau Lembaga Pemerintahan non Kementerian terkait untuk menilai kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Propinsi. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan EPPD berdasarkan LPPD Kabupaten/Kota dengan melibatkan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait untuk menilai kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Laporan Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Peningkatan indeks EPPD Pemerintah Kabupaten dan Kota se wilayah Provinsi dan Nasional, serta Pemerintah Provinsi secara Nasional dilakukan dengan membuat range terdiri dari 4 kategori prestasi yaitu; Sangat Tinggi (ST), Tinggi (T), Sedang (S) dan Rendah (R), yang dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3.8.
Kategori Penilaian Indeks EPPD

No	Skor	Prestasi
1.	$3 < ST \leq 4$	Sangat Tinggi (ST)
2.	$2 < T \leq 3$	Tinggi (T)
3.	$1 < S \leq 2$	Sedang (S)
4.	$0 \leq R \leq 1$	Rendah (R)

Nilai EPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2017 sampai 2022 Triwulan IV dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.9.
Nilai EPPD Tahun 2017 s.d 2022 Triwulan IV

No	Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021	2022 Triwulan IV
1	Nilai	3,052	3,3453	3,3453	3,3453	3,3453	3,3453
2	Kategori	ST	ST	ST	ST	ST	ST
3	Kepmendagri	118-8840 Th 2018	Belum ditetapkan	Belum ditetapkan	Belum ditetapkan	Belum ditetapkan	Belum ditetapkan
4	Tingkat	NASIONAL	NASIONAL	NASIONAL	NASIONAL	NASIONAL	NASIONAL

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Temanggung Triwulan IV, 2022

Berdasarkan tabel di atas, Nilai EPPD Kabupaten Temanggung dari Tahun 2017 sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 berada pada posisi nilai diatas 3 dengan kategori Sangat Tinggi (ST), hal ini mengandung arti bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung berkinerja sangat tinggi berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk tahun 2019, 2020, 2021 dan Triwulan IV Tahun 2022 masih menggunakan angka nilai di tahun 2018, karena sampai dengan saat ini meskipun proses evaluasi sudah selesai, namun belum ada nilai yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Dalam proses EPPD juga dibuktikan dengan data dukung. Data dukung dimaksud antara lain data tentang keuangan daerah, perencanaan pembangunan daerah, kepegawaian, SOP, aset daerah. Data tersebut disajikan secara keseluruhan dengan penganggung jawab data adalah Perangkat Daerah Pengampu sesuai urusannya dan disajikan per urusan dengan merekapitulasi data dari masing-masing Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi, kepada Bupati Temanggung direkomendasikan sebagai berikut:

1. Tataran Pengambil Kebijakan
 - a. Terhadap 4 (empat) IKK yang capaian kinerjanya

memperoleh prestasi Rendah (R) agar ditingkatkan capaian kinerjanya dimasa yang akan datang.

2. Tataran Pelaksana Kebijakan

a. Administrasi Umum

Terhadap 122 (seratus dua puluh dua) IKK yang dilaksanakan SKPD dengan prestasi rendah (R) agar ditingkatkan capaian kinerjanya di masa yang akan datang

b. Capaian Kinerja

Terhadap 2 (dua) Urusan Wajib (Penanaman Modal dan Trantibum Linmas) dan 1 (satu) Urusan Pilihan (Pariwisata) dengan prestasi rendah (R) agar ditingkatkan capaian kinerjanya di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil evaluasi, kepada Bupati Temanggung direkomendasikan sebagai berikut :

1. Tataran pengambil kebijakan

a. Terhadap 4 (empat) IKK yang capaian kinerjanya memperoleh prestasi Rendah (R) agar ditingkatkan capaian kinerjanya dimasa yang akan datang.

2. Tataran pelaksana kebijakan

a. Administrasi Umum

Terhadap 122 (seratus dua puluh dua) IKK yang dilaksanakan SKPD dengan prestasi Rendah (R) agar ditingkatkan capaian kinerjanya di masa yang akan datang.

b. Capaian Kinerja

Terhadap 2 (dua) Urusan Wajib (Penanaman Modal dan Trantibum Linmas) dan 1 (satu) Urusan Pilihan (Pariwisata) dengan prestasi Rendah (R) agar ditingkatkan capaian kinerjanya di masa yang akan datang.

Tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung atas Rekomendasi Tim Nasional terhadap hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018 adalah menghimbau Perangkat Daerah pengampu Urusan Pemerintahan yang capaian kinerjanya masih rendah untuk ditingkatkan.

Faktor pendorong masuknya nilai EPPD Kabupaten Temanggung pada kategori Sangat Tinggi (ST) Kabupaten Temanggung adalah keselarasan antara Kerjasama yang dilakukan oleh Perangkat Daerah se-Kabupaten Temanggung sehingga terwujud kinerja yang tertib administrasi. Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemenuhan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mempengaruhi hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah keterbatasan anggaran dan Sumber Daya Manusia yang tersedia serta capaian kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah belum maksimal. Adapun strategi/tindak lanjut yang dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi dengan BAPPEDA dan BKPSDM.

Untuk mencapai target Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) pada tahun 2022 didukung anggaran sebesar Rp 139.997.000,- dengan realisasi Rp 139.394.750,- (99,57%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 602.250 atau 0%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi inefisiensi sebesar 2,57% (selisih capaian kinerja sebesar 97 % dengan realisasi anggaran 99,57%). Kinerja sasaran strategis ini didukung melalui pelaksanaan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Sasaran Strategis 2. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ).

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 untuk sasaran strategis 2 Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ). Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa nilai capaian kinerja sasaran 2 sebesar 100 % dari target Renstra atau kategori **Sangat Memuaskan** Sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.10.
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 2 Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Capaian 2021	2022			Renstra 2019-2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	%	50	20	100	100	25	100	100

Secara keseluruhan jika dibandingkan dengan target Renstra sebesar yaitu 25 maka di tahun 2022 Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ) sudah tercapai 100%.

Pengukuran Indikator Sasaran yaitu Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

- a. Pengukuran kualifikasi dan kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) berdasarkan persentase keterisian formasi JF PPBJ terhadap formasi yang sudah dihitung, dikelompokkan dengan penilaian yaitu:

- 1) K/L/PD sudah memenuhi kebutuhan JF PPBJ > 90% dari formasi JF PPBJ, Nilai 100;
- 2) K/L/PD sudah memenuhi kebutuhan JF PPBJ 70% s.d < 90% dari formasi JF PPBJ, Nilai 80;
- 3) K/L/PD sudah memenuhi kebutuhan JF PPBJ 50% s.d < 70% dari formasi JF PPBJ, Nilai 60;
- 4) K/L/PD sudah memenuhi kebutuhan JF PPBJ 30% s.d < 50% dari formasi JF PPBJ, Nilai 40;
- 5) K/L/PD sudah memenuhi kebutuhan JF PPBJ 15% s.d < 30% dari formasi JF PPBJ, Nilai 20;
- 6) K/L/PD belum memenuhi kebutuhan JF PPBJ < 15% dari formasi JF PPBJ, Nilai 0;

Kebutuhan JF PPBJ di Kabupaten Temanggung adalah 11 (sebelas) orang dan keterisian formasi sudah terpenuhi berjumlah 11 (sebelas) orang JF PPBJ sehingga mendapatkan nilai 100.

- b. Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) terdiri atas 4 domain yaitu Proses, Kelembagaan, SDM dan Sistem Informasi. Yang didetailkan kedalam 9 variabel yaitu Manajemen Pengadaan, Manajemen Penyedia, Manajemen Kinerja, Manajemen Risiko, Pengorganisasian, Tugas & Fungsi, Perencanaan SDM, Pengembangan SDM dan Sistem Informasi.

Tingkat kematangan sendiri terdiri atas 5 level yaitu Inisiasi, Esensi, Proaktif, Strategis dan Unggul, dimana selama pengembangan setiap variabel bergerak maju dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya secara bertahap/berurutan. Pencapaian target minimal level 3 (proaktif) adalah kondisi UKPBJ yang sudah sesuai dengan amanat peraturan-perundangan-undangan dan kriteria

pusat keunggulan yang diakui oleh LKPP sebagai Capaian Nilai Kematangan.

- 1) UKPBJ sudah mencapai 9/9 level proaktif, Nilai 100;
- 2) UKPBJ sudah mencapai 8/9 level proaktif, Nilai 80;
- 3) UKPBJ sudah mencapai 7/9 level proaktif, Nilai 60;
- 4) UKPBJ sudah mencapai 6/9 level proaktif, Nilai 40;
- 5) UKPBJ sudah mencapai 5/9 level proaktif, Nilai 20;
- 6) UKPBJ < 5/9 level proaktif, Nilai 0;

Untuk Perhitungan Indeks Tata Kelola PBJ dapat dirumuskan:

$$\text{Indeks Tata Kelola PBJ} = \frac{(\text{Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ} + \text{Nilai Kematangan})}{2}$$

Berikut adalah capaian Indeks Tata Kelola PBJ Triwulan IV tahun 2022 pada tabel berikut ini:

Tabel 3.11.

Indeks Tata Kelola PBJ tahun 2017 s.d Tanggal 31 Desember 2022 (Triwulan IV – 2022)

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	n.a	n.a	n.a	n.a	100	100
2.	Nilai Kematangan	n.a	n.a	n.a	n.a	0	100
3.	Indeks Tata Kelola PBJ	n.a	n.a	n.a	n.a	50	100

Sumber: Bagian PBJ Setda Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Untuk Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung sampai tanggal 31 Desember 2022 Triwulan IV tahun 2022 telah memenuhi 9 dari 9 level proaktif. Oleh karena hal tersebut, nilai Indeks Tata Kelola PBJ menjadi 100.

Dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong Indeks Tata Kelola PBJ adalah Formasi JF PBJ telah terpenuhi menjadi 11 (sebelas) orang karena penambahan 4 (empat) orang yang dilantik menjadi JF PBJ ditanggal 31 Desember 2021, serta Nilai

Kematangan UKPBJ telah terpenuhi menjadi 9 (sembilan) karena penambahan 3 (tiga) variabel di level 3 Proaktif.

Untuk mencapai target Kinerja Sasaran Strategis Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ) pada tahun 2022 didukung anggaran sebesar Rp 452.859.000,- dengan realisasi Rp 343.383.133,- (75,83%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 109.475.867,- atau 24%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 24,17% (selisih capaian kinerja sebesar 100 % dengan realisasi anggaran 75,83%). Kinerja sasaran strategis ini didukung melalui pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan.

Sasaran Strategis 3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP).

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 untuk sasaran strategis 3 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP). Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa nilai capaian kinerja sasaran 3 sebesar **91,07 %** dari target Renstra atau kategori **Sangat Memuaskan** Sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.12.
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 3 Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Capaian 2021	2022			Renstra 2019-2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	-	B	BB	B	91,07	BB	B	91,07

Secara keseluruhan jika dibandingkan dengan target Renstra maka di tahun 2022 sudah tercapai 91,07%.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan penilaian yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB atas capaian kinerja instansi pemerintah yang akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja instansi pemerintah pada tahun berikutnya. SAKIP diimplementasikan secara *Self Assesment* oleh masing-masing instansi pemerintah daerah. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa Kabupaten Temanggung melakukan tahapan dalam sistem tersebut secara mandiri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pemantauan dan pengendalian hingga menyampaikan pelaporan akuntabilitas kerjanya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa, rumus penghitungan dari nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah penggabungan nilai dari 5 indikator yaitu perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (25%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi kinerja (10%), capaian kinerja (20%). Sedangkan range kategori adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13.
Komponen Penilaian AKIP

Kategori	Nilai Angka	Interprestasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan
A	>80-90	Memuaskan
BB	>70-80	Sangat Baik
B	>60-70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30-50	Kurang
D	0-30	Sangat Kurang

Nilai SAKIP Kabupaten Temanggung Tahun 2017 sampai 2022 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.14.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2017-2022 TW III

No.	TAHUN	NILAI	KATEGORI
1	2017	58,32	CC
2	2018	59,05	CC
3	2019	60,16	B
4	2020	62,11	B
5	2021	63,84	B
6	2022	*63,84	B

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Temanggung

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 masih menggunakan angka/nilai Tahun 2021 karena hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dalam proses evaluator pusat (Kementerian PAN dan RB) tetapi proses pengajuan penilaian ditingkat Kabupaten sudah selesai. Berikut hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2021:

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung memperoleh nilai 63,84 atau predikat B. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil yang baik, namun masih memerlukan perbaikan. Rincian penilaian tersebut sebagai berikut.

Tabel 3.15.

Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2021

	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai	
			2020	2021
a	Perencanaan Kinerja	30	19,66	20,13
b	Pengukuran Kinerja	25	14,41	14,91
c	Pelaporan Kinerja	15	10,02	10,07
d	Evaluasi Internal	10	6,64	6,79
e	Capaian Kinerja	20	11,38	11,94
	Nilai Hasil Evaluasi	100	62,11	63,84

Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B
--------------------------------------	----------	----------

Sumber: Kementerian PAN dan RB

Pemerintah Kabupaten Temanggung harus menyempurnakan rumusan tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja utama pada setiap level organisasi agar lebih berorientasi hasil dan memiliki indikator yang relevan maupun terukur sehingga ada keselarasan dalam penjabaran kinerja mulai dari level kabupaten, Perangkat Daerah, sampai ke individu.

Faktor pendorong capaian nilai ini adalah tindak lanjut hasil evaluasi sebelumnya seperti penyusunan proses bisnis, perbaikan indikator sasaran Perangkat Daerah pada indikator kinerja utama dan telah dilakukannya reviu terhadap program dan kegiatan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah belum liniernya perencanaan kinerja dari RPJMD s.d SKP, adanya missing link pada perencanaan kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung. Adapun strategi/tindak lanjut yang dilaksanakan adalah dengan mengoptimalkan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Untuk mencapai target Kinerja Sasaran Strategis Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) pada tahun 2022 didukung anggaran sebesar Rp 114.445.500,- dengan realisasi Rp 113.866.959,- (99,49%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 578.541,- atau 1%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi inefisiensi sebesar 8.42% (selisih capaian kinerja sebesar 91.07% dengan realisasi anggaran 99,49%) Kinerja sasaran strategis ini didukung melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Capaian Kinerja Sasaran dan Indikator Program

Program yang harus dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung sejumlah 3 Program dengan 21 indikator program.

PROGRAM 1. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan, Bagian Kesra dan Bina Mental serta Bagian Hukum, diukur dengan 8 (delapan) indikator program. Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Sekretariat Daerah, adalah sebagai berikut:

1) Bagian Pemerintahan

Tabel 3.16.
Capaian Indikator Kinerja Program 1

Program 1 : Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2021	2022			Renstra 2019-2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Cakupan Pilar Batas yang terinventarisir	%	100	100	100	100	100	100	100
Prosentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
Cakupan Kecamatan Tertib Administrasi	%	100	100	100	100	100	100	100
		100			100			100

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Program Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, secara keseluruhan capaian program ini di tahun 2022 sebesar 100 % . Sedangkan jika dibandingkan dengan target Renstra maka di tahun 2022 sudah tercapai 100% dengan keterangan sebagai berikut :

a. Cakupan Pilar Batas yang terinventarisir

Pilar batas ini ada empat (4) yaitu : PBU (Pilar Batas Utama), PABU (Pilar Acuan Batas Utama), PBA (Pilar Batas Antara) dan PABA (Pilar Acuan Batas Antara). Definisi pilar batas yang terinventarisir adalah pilar batas antara Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten lainnya yang sudah dilakukan pengecekan kondisi pilar batas di lokasi sesuai yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Rumus penghitungan dari cakupan pilar batas yang terinventarisir adalah Jumlah Pilar yang terinventarisir dan telah dilakukan pengecekan langsung di lokasi dibagi jumlah pilar batas yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pilar Batas yang terinventarisir di Kabupaten Temanggung Tahun 2017 sampai Triwulan IV Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.17.
Pilar Batas yang Terinventarisir di Kabupaten Temanggung
Tahun 2017 - 2022 Triwulan IV

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2021 Triwulan IV
1	Jumlah Pilar Batas yang Terinventarisir	12	32	51	61	61	61
2	Jumlah Pilar Batas	51	51	51	61	61	61
3	Persentase	23,53	62,74	100	100	100	100

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Temanggung, 2022

Tabel 3.18.

Cakupan pilar batas yang terinventarisir berdasarkan Permendagri tentang Batas Kabupaten Temanggung dengan Daerah yang berbatasan yang telah ditetapkan Tahun 2017- 2022 Triwulan IV

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2021 Triwulan IV
1	Cakupan pilar batas yang	3	3	3	4	4	4

	telah terinventarisir						
2	Cakupan pilar batas yang terinventarisir berdasarkan Permendagri	3	3	3	4	4	4
3	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Temanggung, 2022

Berdasarkan tabel di atas, inventarisir pada Tahun 2016 telah dilaksanakan untuk batas wilayah administratif antara Kabupaten Temanggung dan Kendal. Kabupaten Temanggung melaksanakan inventarisir wilayah tersebut karena batas dengan Kabupaten Kendal menjadi prioritas utama dalam pembahasan di tingkat provinsi atas dasar selisih batas pada wilayah tersebut. Hasil inventarisir tersebut tidak dapat dimasukkan dalam uraian tabel diatas karena Permendagri Batas Kabupaten Temanggung dan Kendal belum ditetapkan. Inventarisir pilar batas Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten lainnya telah dilakukan sejak Tahun 2017. Pada Tahun 2017 sampai Tahun 2021, inventarisasi pilar batas daerah cenderung meningkat dari 23,53% menjadi 62,74% kemudian naik menjadi 100% pada tahun 2020. Pada Triwulan IV Tahun 2022 telah dilaksanakan inventarisasi kembali di beberapa titik batas daerah Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kendal, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang serta dilakukan rapat penarikan garis kartometrik sepanjang batas. Masih perlu dilakukan inventarisasi dan verifikasi ke wilayah karena masih ada pilar batas dan lempeng yang bergeser/rusak. Proses inventarisir pilar antara lain:

- a. Menyiapkan Peraturan yang telah ditetapkan;
- b. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang berbatasan;
- c. Menentukan jadwal pelacakan di lapangan (lokasi);

- d. Membuat hasil laporan;
- e. Mensosialisasikan hasil laporan.

Dalam proses inventarisir pilar batas ini mengacu kepada pilar batas yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan perangkat desa atau tokoh masyarakat dari desa yang berbatasan dan mengetahui posisi pemasangan pilar batas. Pada Tahun 2022 pelaksanaan pelacakan pilar batas di lokasi, Kabupaten Temanggung akan melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kendal dan Kerja sama Daerah eks Karisidenan Kedu Plus yang meliputi Kabupaten Magelang, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Semarang. Dalam hal ini adalah Tim Penegasan Batas Daerah yang sekretariatnya di Bagian Pemerintahan masing-masing Kabupaten.

Faktor Pendukung dalam pelaksanaan Inventarisir Pilar Batas Daerah adalah telah tercukupinya data serta adanya bantuan dari Pemerintah Daerah yang berbatasan dalam Kegiatan Inventarisasi pilar batas. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan inventarisir pilar batas adalah keterbatasan anggaran yang tersedia, batas hilang terbawa arus sungai, lokasi sulit dijangkau, serta pindahnya arus sungai yang menjadi batas wilayah. Adapun Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah Melakukan pengecekan Pilar Batas dan koordinasi dengan Kabupaten Magelang.

b. Prosentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah Tepat Waktu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Laporan Penerapan SPM dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Namun, Laporan Penerapan SPM

disampaikan bupati dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan menggunakan aplikasi. Rumus penghitungan dari persentase pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat waktu yaitu jumlah Perangkat Daerah yang melaporkan SPM tepat waktu dibagi Jumlah Perangkat Daerah yang mengampu SPM dikali 100%.

Jumlah Perangkat Daerah yang melaporkan SPM tepat waktu di Kabupaten Temanggung Tahun 2017 sampai Triwulan IV Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.19.
Perangkat Daerah yang Melaporkan SPM Tepat Waktu
di Kabupaten Temanggung Tahun 2017 – 2022 Triwulan IV

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022 Triwulan IV
1	Jumlah Perangkat Daerah yang melaporkan SPM Tepat Waktu	14	14	5	6	7	7
2	Jumlah Perangkat Daerah yang mengampu SPM	15	15	6	6	7	7
3	Persentase	93,33	93,33	83,33	100	100	100

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Temanggung, Triwulan IV Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Perangkat Daerah yang melaporkan SPM tepat waktu di Kabupaten Temanggung Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 memiliki presentase yang sama yaitu 93,33% dan di Tahun 2019 mengalami penurunan 10% dari 93,33% menjadi 83,33%, hal ini terjadi karena SPM di Tahun 2019 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa SPM yang urusannya dari 15 menjadi 6 urusan, maka target capaian berubah sesuai dengan target SPM pada Rencana Strategis Bagian Pemerintahan Setda

Temanggung. Untuk capaian Tahun 2022 sampai dengan Triwulan IV sudah tercapai 100%.

Perangkat Daerah pengampu SPM Kabupaten Temanggung pada Tahun 2022:

1. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup;
5. Satpol PP dan Damkar;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
7. Dinas Sosial.

Semua Perangkat Daerah Pengampu SPM Kabupaten Temanggung tersebut telah melaporkan SPM tepat waktu. Koordinasi dan komunikasi aktif dengan Perangkat Daerah yang mengampu SPM menjadi faktor pendorong pelaksanaan pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat waktu, sedangkan masih adanya perangkat daerah yang tidak tepat waktu dalam penyampaian SPM serta data yang kurang lengkap menjadi penghambat dalam pelaksanaan pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat waktu. Adapun Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah Melakukan koordinasi secara lisan dan tertulis dengan perangkat daerah pengampu SPM.

c. Cakupan Kecamatan Tertib Administrasi

Pelaporan kegiatan kecamatan dilakukan secara *online* dan *realtime* melalui website “Laporan Kegiatan Kecamatan” diakses melalui tautan <http://pemerintahan.temanggungkab.go.id/lkk/>. Pelaporan diinput setiap hari dan akan direkap dan dilaporkan maksimal pada tanggal 5 pada bulan berikutnya. Website LKK selanjutnya akan diintegrasikan dengan *Dashoard Eksekutif* yang

dapat dimonitor oleh: Bupati Temanggung, Wakil Bupati Temanggung, Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Bagian Pemerintahan sebagai pengelola.

Uraian Kegiatan Camat yang harus dilaporkan adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan administrasi kecamatan;
2. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
5. Kegiatan tematik;
6. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan
7. Pelaksanaan tugas lain.

Rumus dari perhitungan cakupan kecamatan tertib administrasi adalah jumlah Kecamatan yang mengirimkan Laporan Bulanan Camat tepat waktu dan lengkap dibagi jumlah Kecamatan di Kabupaten Temanggung dikali 100%.

Jumlah Kecamatan yang tertib administrasi di Kabupaten Temanggung Tahun 2017 sampai 2022 Triwulan IV dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.20.
Kecamatan yang Tertib Administrasi
di Kabupaten Temanggung Tahun 2017 – 2022 Triwulan IV

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022 Triwulan IV
1	Jumlah Kecamatan yang Tertib Administrasi	15	19	18	19	20	20
2	Jumlah Kecamatan	20	20	20	20	20	20
3	Persentase	75	95	90	95	95	100

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Temanggung, Triwulan IV Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Kecamatan yang Tertib Administrasi di Kabupaten Temanggung sejak Tahun 2017 sampai Tahun 2018 cenderung meningkat dari 25% menjadi 95% dan menurun pada tahun 2019, sampai Triwulan IV Tahun 2022 yaitu 100%. Untuk target tahun 2022 dalam RPJMD Kabupaten Temanggung, persentase Kecamatan yang tertib administrasi adalah sebesar 100%. Realisasi capaian Tahun 2019 justru menurun dari realisasi yang telah dicapai di tahun 2018. Sedangkan Triwulan IV 2022 mengalami kenaikan menjadi 100%. Faktor pendorong pada indikator ini adalah adanya amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan serta adanya website Laporan Kegiatan Kecamatan sehingga dapat mengefisiensi dalam melaporkan. Dengan demikian, seluruh Kecamatan di Kabupaten Temanggung telah mengumpulkan laporan bulanan secara lengkap melalui website “Laporan Kegiatan Kecamatan”. Sedangkan lambatnya penyampaian laporan bulanan dari Kecamatan serta kurang lengkapnya data menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pelaporan. Adapun Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian indikator kinerja antara lain dengan melakukan kordinasi secara lisan dan tertulis dengan Kecamatan.

Untuk mencapai target Kinerja Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Pemerintahan) pada tahun 2022 didukung anggaran sebesar Rp 139.997.000,- dengan realisasi Rp 139.394.750,- (99,57%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 602.250,- atau 0%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 0,43% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran (99,57%).

2) Bagian Kesra dan Bina Mental

Tabel 3.21.

Capaian Indikator Kinerja Program 1

Program 1 : Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2021	2022			Renstra 2019-2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	%	89,31	88	90,95	100	90	90,95	100

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Program Bagian Kesra dan Bina Mental Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, secara keseluruhan capaian program ini di tahun 2022 sebesar 100 %. Sedangkan jika dibandingkan dengan target Renstra maka di tahun 2022 sudah tercapai 100%.

Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik.

Batasan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik yaitu:

- Keadaan fisik; terdapat ruang untuk perpustakaan tempat kitab suci dan buku keagamaan, terdapat ruang untuk bersuci, tempat parkir jamaah/ tempat alas kaki dll.
- Sarana prasarana ; terdapat buku/kitab suci, tempat duduk (kursi atau alas lantai) semuanya tertata rapi bersih.
- Organisasi Kepengurusan.

Rumus penghitungan dari persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik adalah jumlah rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan keseluruhan dikali 100%.

Realisasi persentase rumah ibadah kondisi baik di Kabupaten Temanggung dari tahun 2017 s.d 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.22.
Persentase rumah ibadah kondisi baik
Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2022

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah rumah ibadah kondisi baik	3.533	3.569	3.615	3.641	3.659	3.744
	- Islam	3.301	3.346	3.395	3.445	3.463	3.548
	- Kristen	79	80	80	83	83	83
	- Katholik	18	18	18	16	16	16
	- Hindu	-	-	-	14	14	14
	- Budha	85	85	85	81	81	81
	- Konghuchu	-	-	-	2	2	2
	2	Jumlah sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	1.487	1.529	1.546	1.521	1.521
	- Islam	1.708	1.708	1.708	1.517	1.517	1.527
	- Kristen	57	57	57	-	-	-
	- Katholik	2	2	2	2	2	2
	- Hindu	-	-	-	-	-	-
	- Budha	2	2	2	2	2	2
	- Konghuchu	-	-	-	-	-	-
3	Jumlah Rumah Ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	5.009	5.054	5.103	5.162	5.180	5.275
4	Jumlah Rumah Ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan keseluruhan	5.345	5.356	5.360	5.800	5.800	5.800
5	Persentase Jumlah Rumah Ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	94	94	95	89	89	91

Faktor pendorong capaian kinerja adalah komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan, sedangkan faktor penghambat adalah kurangnya jumlah pegawai.

Adapun strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian indikator kinerja adalah tetap

direncanakan kegiatan lanjutan dari kegiatan yang sudah ada agar terjadi kesinambungan dalam rangka mencapai target 5 tahun di RENSTRA.

Untuk mencapai target Kinerja Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Kesra dan Bina Mental) pada tahun 2022 didukung anggaran sebesar Rp 36.024.211.200,- dengan realisasi Rp 35.413.617.773,- (98,31%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 610.593.427,- atau 2%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 1,69% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran (98,31%))

3) BAGIAN HUKUM

Tabel 3.23.
Capaian Indikator Kinerja Program 1

Program 1 : Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2021	2022			Renstra 2019-2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase peraturan daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan bupati	%	27,27	30	60	100	30	60	100
Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	%	82,22	100	100	100	100	100	100
Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi	%	100	90	100	100	90	100	100
Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi	%	100	75	100	100	75	100	100
					100			100

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Program Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten Temanggung, secara keseluruhan capaian program ini di tahun 2022 sebesar 100 %. Sedangkan jika dibandingkan dengan target Renstra maka di tahun 2022 sudah tercapai 100%.

a. Persentase Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati

Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati adalah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung yang telah diundangkan dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati. Rumus penghitungan dari persentase Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati adalah jumlah Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati dibagi jumlah total Peraturan Daerah dikali 100%. Realisasi persentase Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati di Kabupaten Temanggung dari tahun 2017 s.d 2022 Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.24.

Realisasi Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung, Tahun 2017-2022 s.d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Perda yang ditindaklanjuti Perbup	5	4	4	4	3	9
2.	Jumlah Perda	22	12	14	25	11	15
3.	Persentase Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati	22,70%	33,30%	28,60%	16%	27,27%	60%

Sumber: Bagian Hukum Kab. Temanggung, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati pada tahun 2022 sampai dengan Triwulan IV sebesar 57,14%. Masih terdapat sebanyak 6 (enam) Peraturan Daerah tahun 2022 yang perlu

ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati. Oleh karena itu perlu adanya koordinasi antara Perangkat Daerah pengusul Peraturan Daerah dengan Bagian Hukum selaku fasilitator dalam penyusunan dokumen Peraturan Bupati salah satunya yaitu dengan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi antara Bagian Hukum dengan OPD penyusun Peraturan Daerah terkait jalannya penyusunan Peraturan Daerah.

Target 2022 tercapai 100% karena faktor pendorong yaitu komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan serta evaluasi kegiatan dari pimpinan. Sedangkan faktor penghambat Kurangnya koordinasi antara Perangkat Daerah pengusul Peraturan Daerah dengan Bagian Hukum selaku fasilitator dalam penyusunan dokumen Peraturan Bupati.

Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian indikator kinerja antara lain Seharusnya Perangkat Daerah pengusul Perda pro aktif dalam mengusulkan Perbup sesuai kebutuhan yang diamanatkan dalam Perda.

b. Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH

Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum (JDIH) adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat. Adapun dokumentasi perundangan melalui JDIH merupakan peraturan perundang-undangan yang telah di dokumentasi melalui aplikasi JDIH, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Rumus penghitungan persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH yakni Peraturan Daerah dan Peraturan

Bupati yang diinput di JDIH dibagi jumlah total Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dikali 100%.

Realisasi dokumentasi Perundangan melalui JDIH di Kabupaten Temanggung dari tahun 2017 - 2022 s.d Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.25.
Dokumentasi Perundangan melalui JDIH
Tahun 2017-2022 s.d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang diinput di JDIH	159	68	86	55	111	100
2	Jumlah total Peraturan Daerah/Peraturan Bupati	161	70	100	92	135	100
3	Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	98,75%	97,14%	86%	59,78%	82,20%	100%

Sumber : Bagian Hukum Kab. Temanggung, 2022

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 sampai dengan triwulan IV peraturan daerah maupun peraturan bupati yang telah ditetapkan dan diundangkan sudah terdokumentasi dalam JDIH Kabupaten Temanggung.

Namun demikian tetap diperlukan adanya koordinasi antara Bagian Hukum dengan OPD yang mengusulkan Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati yaitu dengan melakukan monitoring dan evaluasi agar kedepannya dokumen Perda ataupun Perbup yang sudah diundangkan dapat segera diinput di JDIH.

Target 2022 dapat tercapai 100% karena faktor pendorong komitmen yang tinggi dari pegawai dan monitoring dari pimpinan. Sedangkan faktor penghambat adalah Lambatnya penyeteran Produk Hukum dari setiap OPD serta karena kelemahan dari aplikasi yang belum mampu memenuhi kebutuhan

pendokumentasian beberapa Produk Hukum yang memiliki volume tebal.

Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian indikator kinerja antara lain Seharusnya Perangkat Daerah yang mengusulkan Perda dan Perbup harus tertib administrasi dengan secepatnya menyampaikan dokumen Perda dan Perbup yang sudah diundangkan ke Bagian Hukum untuk diinput di JDIIH.

c. Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi

Non litigasi adalah penyelesaian masalah hukum di luar Pengadilan. Permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi adalah permasalahan hukum yang diselesaikan di luar pengadilan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Rumus penghitungan persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi adalah jumlah permasalahan yang ditangani secara non litigasi dibagi jumlah total permasalahan dikali 100%.

Tabel 3.26.
Permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi
Tahun 2017-2022 s.d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah permasalahan yang ditangani secara non litigasi	32	34	29	23	26	36
2	Jumlah total permasalahan	16	16	29	23	26	36
3	Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara nonlitigasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Bagian Hukum Kab. Temanggung, 2022

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa penanganan perkara secara non litigasi baru dapat tertangani mulai tahun 2017 dikarenakan baru teranggarkan setelah banyak munculnya permasalahan yang dapat diselesaikan secara mediasi di luar pengadilan.

Beberapa perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) dibahas bersama dengan unsur dinas terkait, pihak berperkara dan anggota Forkopimda Kabupaten Temanggung dengan dilakukan secara mediasi sehingga tidak perlu diproses sampai dengan persidangan.

Target 2022 dapat tercapai 100% karena faktor pendorong terjaganya sinergitas yang baik antara bagian hukum, OPD terkait, dan anggota Forkompida Kab. Temanggung sehingga mempermudah pelaksanaan mediasi dan pencarian jalan keluar sedangkan faktor yang menghambat untuk pencapaian sasaran ini adalah kurangnya kuantitas pegawai di Bagian Hukum.

Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian indikator kinerja antara lain Diharapkan adanya peran aktif dari masyarakat untuk menyampaikan pengaduan atas permasalahan yang berkaitan dengan Pemkab Temanggung dan diharapkan adanya peran aktif juga dari Pemkab Temanggung untuk sesegera mungkin menindaklanjuti terkait permasalahan yang disampaikan masyarakat.

d. Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi

Permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi adalah permasalahan hukum yang diselesaikan di pengadilan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Rumus penghitungan persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi yakni jumlah permasalahan yang ditangani secara litigasi dibagi jumlah total permasalahan dikali 100%.

Tabel 3.27.
Permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi
Tahun 2017-2022 s.d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Permasalahan perkara yang diselesaikan secara litigasi	4	2	1	4	2	3
2	Jumlah total permasalahan	8	3	1	4	2	3
3	Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi	50%	66,66%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Bagian Hukum Kab. Temanggung, 2022

Permasalahan dan perkara baik pidana maupun perdata yang tidak dapat diselesaikan secara mediasi di luar persidangan harus ditempuh melalui persidangan. Demi efektif dan efisiennya penanganan perkara, Bagian Hukum melalui Sub bagian Bantuan Hukum menangani perkara-perkara yang muncul tanpa melibatkan Jaksa Pengacara Negara (JPN).

Target 2021 dapat tercapai 100% karena faktor pendorong Integritas yang tinggi serta terjaganya sinergitas yang baik dengan lembaga penegak hukum sedangkan faktor yang menghambat untuk pencapaian sasaran ini adalah kurangnya kuantitas pegawai di Bagian Hukum.

Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian indikator kinerja antara lain diharapkan adanya peran aktif dari masyarakat untuk menyampaikan pengaduan atas permasalahan yang berkaitan dengan Pemkab

Temanggung dan diharapkan juga adanya peran aktif juga dari Pemkab Temanggung untuk sesegera mungkin menindaklanjuti terkait permasalahan yang disampaikan masyarakat.

Untuk mencapai target Kinerja Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Hukum) pada tahun 2022 didukung anggaran sebesar Rp 1.741.328.000,- dengan realisasi Rp 1.580.637.891,- (90,77%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 160.690.109,- atau 9%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 9,23% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran (90,77%))

Secara keseluruhan, Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ini didukung dengan anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.28.

Anggaran Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
BAGIAN PEMERINTAHAN			
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	139.997.000	139.394.750	99,6
Administrasi Tata Pemerintahan	134.997.200	134.470.750	99,6
Penataan Administrasi Pemerintahan	19.999.800	19.814.300	99,07
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	9.997.400	9.878.350	98,81
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	105.000.000	104.778.100	99,79
Fasilitasi Kerjasama Daerah	4.999.800	4.924.000	98,5
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	4.999.800	4.924.000	98,48
BAGIAN KESRA			
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	36.024.211.200	35.413.617.773	98,3
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	36.024.211.200	35.413.617.773	98,3
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	785.000.500	639.377.367	81,45
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	34.603.121.000	34.336.080.840	99,23
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	636.089.700	438.159.566	68,88
BAGIAN HUKUM			
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.741.328.000	1.580.637.891	90,8
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.741.328.000	1.580.637.891	90,8
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	99.999.900	84.967.575	84,97
Fasilitasi Bantuan Hukum	1.591.328.100	1.449.869.316	91,11
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	50.000.000	45.801.000	91,60

PROGRAM 2. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Program Perekonomian dan Pembangunan dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian, Bagian Pembangunan dan Bagian Pengadaan Barang/Jasa, diukur dengan 9 (sembilan) indikator program. Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Program Perekonomian dan Pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Sekretariat Daerah, adalah sebagai berikut :

1) Bagian Perekonomian

Tabel 3.29.
Capaian Indikator Kinerja Program 2 Tahun 2022

Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2021	2022			Renstra 2019-2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	%	100	100	100	100	100	100	
Persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi	%	100	100	100	100	100	100	
Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	%	50	66,67	50	75	80	62,5	
		83,33			83,33		87,5	

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Program Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, secara keseluruhan capaian program ini di tahun 2022 sebesar 83,33% Sedangkan jika dibandingkan dengan target Renstra maka di tahun 2022 sudah tercapai 87,5% dengan keterangan sebagai berikut :

a. Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi

Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi adalah tingkat ketersediaan/kecukupan dari barang/jasa bantu yang diberikan Pemerintah Pusat untuk mengurangi beban biaya yang seharusnya ditanggung oleh masyarakat. Rumus penghitungan dari persentase ketersediaan produk barang bersubsidi adalah jumlah prosentase ketersediaan barang bersubsidi dibagi jumlah jenis barang bersubsidi dikali 100%. Sedangkan cara menghitung prosentase setiap jenis barang bersubsidi adalah realisasi barang bersubsidi dibagi kebutuhan barang bersubsidi dikalikan 100%

Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi di Kabupaten Temanggung dari tahun 2017 s.d 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.30.
Persentase Ketersediaan Produk Barang Bersubsidi

No.	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pupuk						
	Jumlah Realisasi Barang bersubsidi (ton)	52.105	47.600	42.878	34.367,63	114.200	111.701
	- UREA	21.573	21.500	18.961	15.685,18	38.293	25.049
	- ZA	11.858	12.500	11.487	8.590,40	22.664	21.312
	- NPK	8.600	3.100	6.040	6.606,67	14.111	36.983
	- SP36	4.758	6.500	2.942	2.038,74	19.932	11.797
	- ORGANIK	5.316	4.000	3.448	1.416,64	19.200	16.560
	Jumlah Kebutuhan Barang bersubsidi (ton)	52.105	47.600	44.131	36.992	114.200	111.701
	- UREA	21.573	21.500	18.976	16.000	38.293	25.049
	- ZA	11.858	12.500	11.602	8.324	22.664	21.312
	- NPK	8.600	3.100	6.050	7.575	14.111	36.983
	- SP36	4.758	6.500	2.964	1.800	19.932	11.797
	- ORGANIK	5.316	4.000	4.539	3.293	19.200	16.560
	Persentase (%)	100%	100%	100%	92,90%	100%	100%
2	LPG 3 kg (MT)						

No.	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Jumlah Realisasi Barang bersubsidi yang tersedia	20.006	20.742	21.813	23.968	25.861	27.026
	Jumlah kebutuhan Barang bersubsidi	19.429	20.350	21.468	21.813	25.861	27.026
	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Pertalite (KL)						
	Jumlah Barang bersubsidi yang tersedia			10.290	7.032	360	84.561
	Jumlah kebutuhan Barang bersubsidi			12.277	12.277	360	84.561
	Persentase (%)			83,80%	57,27%	100%	100%
4	Solar (KL)						
	Jumlah Realisasi Barang bersubsidi yang tersedia	25.344	26.928	29.784	25.872	31.244	30.904
	Jumlah kebutuhan Barang bersubsidi	28.109	26.002	24.132	28.145	31.244	30.904
	Persentase (%)	90,20%	100%	100%	91,92%	100%	100%
	Rata Rata Persentase			95,95%	85,52%	100%	95.83%

Sumber: Bagian Perekonomian Setda Kab. Temanggung, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa presentase ketersediaan produk barang bersubsidi tahun 2022 triwulan IV tercapai rata-rata 95.83% dari pupuk 100%, LPG 100%, pertalite 100% dan solar 100%

Target 2022 dapat tercapai 100% karena faktor pendorong Ketersediaan barang bersubsidi yang mencukupi kebutuhan barang bersubsidi, terlaksananya monev dan sosialisasi bagi penerima barang bersubsidi, terlaksananya sosialisasi ke pangkalan-pangkalan LPG sedangkan faktor yang menghambat untuk pencapaian sasaran ini adalah Permasalahan dalam oenyusunan RDKK, distribusi, manajemen stok maupun kendala teknis dalam penggunaan kartu tani, sedangkan terkait distribusi LPG masih ditemukan HET LPG subsidi di beberapa pangkalan ada yang tidak

sesuai dengan ketentuan. Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian indikator kinerja antara lain Monev dan sosialisasi penggunaan kartu tani ke kios-kios pupuk bersubsidi, kelompok tani yang belum masuk RDKK untuk diusulkan serta monev dan sosialisasi ke pangkalan LPG untuk menghimbau dan memberikan teguran terhadap HET yang belum sesuai.

b. Persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi

Persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi adalah tingkat kondusifitas dari proses distribusi barang / jasa bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat untuk mengurangi beban yang seharusnya ditanggung oleh masyarakat. Rumus perhitungan dari persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi adalah jumlah laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan di bagi laporan permasalahan barang subsidi. Realisasi persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi di Kabupaten Temanggung dari tahun 2017 s.d 2022 triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.31.

Persentase Jaminan Keamanan Produk Barang Bersubsidi Kabupaten Temanggung, Tahun 2017-2022 s.d Triwulan IV

No.	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	3	5	5	4	7	3
2.	Jumlah laporan permasalahan barang subsidi	3	5	5	4	7	1
	Prosentase Jaminan Keamanan Produk Barang Bersubsidi	100%	100%	100%	100%	100%	300%

Sumber: Bagian Perekonomian Setda Kab. Temanggung 2022

Adapun laporan atau aduan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Surat dari Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral Provinsi Jawa Tengah Direktur tanggal 1 Maret 2022, nomor : 000/II, perihal Pengendalain LPG di Jawa Tengah.

Penyelesaian aduan yang pertama dan langkah-langkah yang ditempuh:

Menanggapi surat dari Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral Provinsi Jawa Tengah, perihal Pengendalain LPG di Jawa Tengah tindaklanjutnya adalah:

- a. Melaksanakan koordinasi dan monitoring evaluasi dengan agen-agen LPG di Kabupaten Temanggung pada tanggal 7 April 2021 membahas pengendalian LPG karena adanya kenaikan LPG pada tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dan 12 kg.
- b. Dari hasil koordinasi dan monitoring evaluasi dengan agen-agen LPG di Kabupaten Temanggung:
 - Saat ini di beberapa agen mengalami migrasi masyarakat dari pembelian tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dan 12 kg ke ukuran 3 kg.
 - Permintaan gas LPG ukuran 5,5 kg dan 12 kg masih dalam kategori wajar dan untuk ukuran 3 kg mengalami kenaikan permintaan.
 - Di Kabupaten Temanggung terdapat 24 agen LPG dan sampai dengan saat ini kebutuhan gas LPG ukuran 3 kg stock masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Menjelang musim tanam terdapat pengaduan dari warga masyarakat terkait keterlambatan dalam pendistribusian pupuk dari distributor ke kios-kios, warga mulai resah akan

kebutuhan terhadap pupuk dikarenakan sebentar lagi sudah mulai musim bertanam.

Adapun penyelesaian aduan dan langkah-langkah yang ditempuh:

Menanggapi pengaduan dari warga masyarakat terkait keterlambatan dalam pendistribusian pupuk dari distributor ke kios-kios, berikut tindak lanjutnya adalah:

- a. Berkoordinasi dengan distributor pupuk terkait keterlambatan dalam pendistribusian pupuk. Hasil koordinasi dengan distributor yang berada di Semarang, ada keterlambatan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi dari distributor ke kios dikarenakan wilayah Semarang mengalami banjir sehingga akses jalan menjadi terhambat transportasinya.
 - b. Bagian Perekonomian Setda Kab. Temanggung melakukan pengecekan ke lokasi warga masyarakat, hasil dari pengecekan ke lokasi diketahui bahwa pada dasarnya kebutuhan petani terhadap pupuk bersubsidi wilayah Kab. Temanggung masih aman meski ada keterlambatan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi dari distributor ke kios.
3. Pada tanggal 06 Oktober 2022, terdapat pengaduan dari Petani Larangan, Luwuk, dan Bejen terkait surat rekomendasi dari Kepala Desa untuk pembelian BBM Bersubsidi di SPBU Candirotto ditolak karena pihak SPBU menghendaki surat rekomendasi yang disertakan harus dari Camat. Adapun atas aduan tersebut telah dikoordinasikan dengan SPBU dan Pertamina sehingga aduan tersebut dapat diselesaikan.
 4. Pada tanggal 04 November 2022, diterima surat dari Pengurus DPC organda Kabupaten Temanggung nomor

1292/OGD.TMG/XI/2022 perihal Permohonan audiensi sehubungan aduan dari para pengemudi angkudes atas ketidakpastian ketersediaan BBM Pertalite di SPBU wilayah Kabupaten Temanggung, dan walaupun tersedia harus mengantri yang berdampak pada tidak maksimalnya pelayanan terhadap pengguna angkudes.

Adapun penyelesaian atas aduan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Telah diadakan audiensi antara Pengurus DPC Organda Kabupaten Temanggung dan Perwakilan Pengurus Paguyuban Angkudes dengan Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Temanggung, Sales Branch Manager Pertamina Semarang Area Temanggung dan Wonosobo, Dinas Perhubungan, Bagian Perekonomian, serta Perwakilan SPBU Kowangan, Manding, Ngadirejo, dan Kedu.
- b. Pada tanggal 26 Juli 2022 pernah diadakan rapat membahas permasalahan serupa dan telah ditetapkan kebijakan 4 SPBU prioritas yang melayani Angkudes yaitu SPBU Kowangan, Manding, Ngadirejo, dan Kedu.

Jenis BBM Pertalite merupakan BBM Bersubsidi sehingga kuotanya dan aturan terkait penggunaannya juga dibatasi. Untuk tahun 2023, Kabupaten Temanggung mengusulkan kuota naik 20% dibandingkan tahun 2022 sehingga diharapkan kebutuhan BBM terpenuhi. Target 2022 dapat tercapai 100% karena faktor pendorong Permasalahan aduan barang bersubsidi dapat terselesaikan dengan berkoordinasi sedangkan faktor yang menghambat untuk pencapaian sasaran ini adalah Setiap aduan untuk dilengkapi secara tertulis dan bukti dukung seperti dokumentasi atau video.

Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian indikator kinerja antara lain Menghimbau kepada masyarakat agar setiap aduan untuk dilengkapi dengan aduan tertulis.

c. Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP

Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP adalah jumlah BUMD di Kabupaten Temanggung yang laporan keuangannya dengan opini WTP atas hasil audit KAP. Rumus perhitungan dari persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP adalah jumlah BUMD dengan Opini WTP dibagi dengan jumlah BUMD. Perhitungan rumus ini dengan data kinerja Laporan Keuangan BUMD tahun sebelumnya yang diaudit KAP (*n-1*). Sehingga untuk pelaporan tahun 2022 adalah atas hasil audit KAP atas laporan keuangan BUMD tahun 2021. Realisasi persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP di Kabupaten Temanggung dari tahun 2017 s.d 2022 Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.32.
Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP
Kabupaten Temanggung

No.	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah BUMD dengan Opini WTP	5	5	4	3	3	3
2	Jumlah BUMD	6	6	6	6	6	6
3	% BUMD dengan opini WTP	83,33%	83,33%	66,67%	50%	50%	50%

Sumber: Bagian Perekonomian Setda Kab. Temanggung, 2022

Dari tabel diatas persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP tahun 2021 hanya tiga (3) BUMD yang WTP atas laporan pemeriksaan KAP sedangkan yang 2 BUMD opini WDP dan

1 BUMD Tidak Wajar. Selengkapnya untuk perkembangan opini KAP atas laporan keuangan BUMD sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.33.
Data BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP
Kabupaten Temanggung

No.	Nama BUMD	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Perumda Tirta Agung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Perumda Apotik Waringin Mulyo	WTP	WTP	WDP	WDP	WDP	WDP
3	Perumda Aneka Usaha	WTP	WDP	WDP	WDP	WDP	TW
4	Perumda BPR Bapas Temanggung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Perumda Bhumi Phala Wisata	WDP	WTP	WTP	WDP	WDP	WDP
6	PT BPR BKK (Perseroda)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Jumlah BUMD dengan Opini WTP		5	5	4	3	3	3
Jumlah BUMD yang ada		6	6	6	6	6	6
Persentase BUMD dengan Opini WTP		83,33%	83,33%	66,67%	50%	50%	50%

Sumber: Bagian Perekonomian Setda Kab. Temanggung 2022

Target 2022 tercapai 75% karena adanya faktor yang menghambat untuk pencapaian sasaran ini yaitu Pemeriksaan KAP (Kantor Akuntan Publik) atas laporan keuangan BUMD dilakukan dalam satu tahun anggaran dan dilakukan pada awal tahun berikutnya. Oleh sebab itu, hingga triwulan IV belum dapat diketahui opini audit laporan keuangan BUMD oleh Akuntan Publik. Sedangkan faktor pendorong adalah Terlaksananya kegiatan pembinaan dan Evaluasi BUMD yang dilakukan setiap triwulan. Adapun strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian indikator kinerja antara lain dengan melakukan kerjasama dengan Dewan Pengawas untuk selalu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja BUMD dan melakukan pembinaan setiap triwulan terutama terkait pencatatan pada laporan keuangan/ aplikasi laporan keuangan.

Untuk mencapai target Kinerja Program Perekonomian dan Pembangunan (Bagian Perekonomian) pada tahun 2022 didukung anggaran sebesar Rp 2.106.831.500,- dengan realisasi Rp 996.866.499,- (47,32%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 1.109.965.001,- atau 53%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 44,34% (selisih capaian kinerja sebesar 91,66% dengan realisasi anggaran (47,32%).

2) Bagian Pembangunan

Tabel 3.34.
Capaian Indikator Kinerja Program 2 Tahun 2022

Program 2 : Program Perekonomian dan Pembangunan								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2021	2022			Renstra 2019-2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang selesai tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase pelaporan kegiatan Perangkat Daerah dan Unit Kerja tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah	%	96	92	99	100	95	99	100
		65,33			100			100

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Program Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, secara keseluruhan capaian program ini di tahun 2022 sebesar 100% Sedangkan jika dibandingkan dengan

target Renstra maka di tahun 2022 sudah tercapai 100% dengan keterangan sebagai berikut :

a. Persentase pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang selesai tepat waktu

Persentase kegiatan pengadaan barang dan jasa yang selesai tepat waktu adalah kegiatan yang selesai dilaksanakan tepat waktu oleh penyedia dalam tahun anggaran berjalan. Rumus persentase kegiatan pengadaan barang dan jasa yang selesai tepat waktu yaitu jumlah kegiatan oleh penyedia yang selesai tepat waktu dalam tahun anggaran berjalan dibagi Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh penyedia dalam tahun anggaran berjalan dikali 100%.

Realisasi persentase kegiatan yang selesai tepat waktu di Kabupaten Temanggung dari tahun 2017 s.d 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.35.
Persentase Kegiatan yang Selesai Tepat Waktu
di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2022 s/d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kegiatan oleh penyedia yang selesai tepat waktu dalam tahun anggaran berjalan	964	765	650	396	329	419
2	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh penyedia dalam tahun anggaran berjalan	963	765	650	396	329	419
3	Persentase Kegiatan yang Selesai Tepat Waktu	99,8	100	100	100	100	100

Sumber data: Bagian Pembangunan : 2022

Tahun 2017 pencapaian persentase tidak 100%, dikarenakan ada satu kegiatan yaitu pengadaan videotron yang tidak selesai pada tahun anggaran berjalan.

Pada tahun 2022 pencapaian persentase kegiatan yang selesai tepat waktu sampai dengan Triwulan IV sebesar 100% dari 419 paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

Faktor Pendorong:

1. Regulasi yang jelas dan terbit pada awal tahun;
2. Tercukupinya SDM yang memahami teknis perencanaan;
3. Tercukupinya SDM yang bersertifikat pengadaan barang/jasa dan/ atau SDM yang memahami barang/jasa;
4. Koordinasi rutin antara pihak terkait yang dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, persiapan dan pelaksanaan;
5. Adanya Konsolidasi pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh PA/KPA/PPK dan/atau UKPBJ.

Faktor Penghambat:

1. Adanya mapping anggaran yang mengakibatkan penjadwalan ulang pengadaan barang dan jasa sehingga pelaksanaannya menjadi tertunda;
2. Kurangnya SDM yang berkompeten dalam perencanaan sehingga masih tergantung dengan OPD teknis;
3. Keterbatasan personil yang bersertifikat pengadaan barang/jasa dan/ atau personil yang memahami barang/jasa;
4. Beberapa barang pada aplikasi E-Catalog belum tayang seperti alat kesehatan dan obat obatan ;
5. Koreksi dan perhitungan ulang spesifikasi teknis dengan adanya regulasi terkait TKDN.

Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian indikator kinerja antara lain :

1. Tercukupinya SDM yang memahami teknis perencanaan;
2. Tercukupinya SDM yang bersertifikat pengadaan barang/jasa dan/ atau SDM yang memahami barang/jasa;

3. Barang - barang pada E-Catalog tayang pada awal tahun;
4. Regulasi pengadaan barang/jasa terkait awal tahun

b. Persentase Pelaporan Kegiatan Perangkat daerah dan Unit Kerja Tepat Waktu.

Persentase pelaporan kegiatan PD/Unit Kerja tepat waktu adalah pelaporan kegiatan PD/Unit Kerja yang selesai dilaksanakan tepat waktu. Rumus Persentase pelaporan kegiatan PD/Unit Kerja tepat waktu adalah jumlah PD/Unit Kerja yang menyampaikan laporan tepat waktu dibagi jumlah PD/Unit Kerja dikalikan 100%. Realisasi persentase pelaporan kegiatan PD/Unit Kerja tepat waktu di Kabupaten Temanggung dari tahun 2017 s.d 2022 Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.36.

Persentase Pelaporan Kegiatan PD/Unit Kerja Selesai Tepat Waktu di Kabupaten Temanggung Tahun 2017 s.d 2022 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah PD/unit kerja yang menyampaikan laporan tepat waktu	104	104	104	104	103	103
2	Jumlah PD/unit kerja	104	104	104	104	103	103
3	Persentase	100	100	100	100	100	100

Tabel 3.37.

Persentase Pelaporan Kegiatan PD/Unit Kerja Selesai Tepat Waktu di Kabupaten Temanggung Tahun 2022 s/d Triwulan IV

No	Jumlah OPD	Selesai Tepat Waktu	Tidak Selesai Tepat Waktu	Keterangan
1	103	103	-	-

Sumber data : Simpelbangda s/d Bulan Desember 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase pelaporan kegiatan Perangkat Daerah/Unit Kerja yang selesai tepat waktu melalui aplikasi Simpelbangda dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 tetap yaitu sebesar 100%. Capaian ini masuk kriteria

tinggi dan masuk kategori telah tercapai dalam meningkatkan capaian hasil kinerja.

Faktor Pendorong:

1. Karena menjadi salah satu syarat dan kelengkapan pencairan GU;
2. Tertib pelaporan administrasi dan keuangan.

Faktor Penghambat:

1. Kedisiplinan;
2. Ketidaksesuain data.

Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan :

1. Tertib pelaporan;
2. Evaluasi pelaporan.

c. Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah

Persentase capaian kegiatan Perangkat Daerah adalah rata-rata capaian kegiatan fisik seluruh Perangkat Daerah. Rumus Persentase capaian kegiatan Perangkat Daerah adalah rata-rata realisasi fisik kegiatan seluruh Perangkat daerah dibagi rata-rata target fisik kegiatan seluruh Perangkat Daerah dikalikan 100%. Realisasi persentase capaian kegiatan Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung dari tahun 2017 s.d 2022 Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.38.

Persentase Capaian Kegiatan Perangkat Daerah
di Kabupaten Temanggung Tahun 2017 s.d 2022 s/d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah realisasi fisik kegiatan seluruh Perangkat Daerah	98,37	99,13	95,64	97,27	96,39	99,37
2	Jumlah target fisik kegiatan seluruh perangkat daerah	100	100	100	100	100	100
3	Persentase	98	99	96	97	96	99

Tabel 3.39.
 Persentase Capaian Kegiatan Perangkat Daerah
 di Kabupaten Temanggung Tahun 2022 s/d Triwulan IV

No	Target Fisik	Realisasi Fisik	Deviasi
1	100	99,37	-0,62

Sumber data: Simpelbangda s/d Bulan Desember 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase realisasi fisik capaian Kegiatan Perangkat Daerah pada tahun 2017 sampai dengan 2022 cenderung fluktuatif dan persentase target fisik capaian Kegiatan Perangkat Daerah pada tahun 2017 sampai dengan 2022 tetap sebesar 100%. Capaian ini masuk ke kriteria tinggi dan dalam meningkatkan capaian hasil kinerja telah tercapai.

Faktor Pendorong:

1. Koordinasi internal baik PPTK, KPA maupun PA;
2. Koordinasi dengan OPD teknis terkait.

Faktor Penghambat:

1. Target terlalu rendah dan pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu

Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan:

1. Koordinasi internal dan eksternal;
2. Penetapan target yang realistis;
3. Optimalisasi pelaksanaan pekerjaan.

Untuk mencapai target Kinerja Program Perekonomian dan Pembangunan (bagian Pembangunan) pada tahun 2022 didukung anggaran sebesar Rp 230.000.000,- dengan realisasi Rp 216.644.279,- (94,19%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 13.355.721,- atau 6%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 5,81% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran (94,19%)

3) Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Tabel 3.40.
Capaian Indikator Kinerja Program 2 Tahun 2022

Program 2 : Program Perekonomian dan Pembangunan								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2021	2022			Renstra 2019-2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase pengadaan barang dan jasa yang berhasil dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan Non-Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	%	18,13	50	96,51	100	100	96,51	96,51
		72,71			100			98,48

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Program Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, secara keseluruhan capaian program ini di tahun 2022 sebesar 100% Sedangkan jika dibandingkan dengan target Renstra maka di tahun 2022 sudah tercapai 98,48% dengan keterangan sebagai berikut :

a. Persentase pengadaan barang dan jasa yang berhasil dilaksanakan

Persentase pengadaan barang dan jasa yang berhasil dilaksanakan adalah tingkat keberhasilan jumlah paket pekerjaan melalui tender yang berhasil dilaksanakan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan paket pekerjaan melalui tender yang ada di

SIRUP. Penyesuaian Indikator yang semula persentase pengadaan barang/jasa tepat waktu, di tahun 2022 ini disesuaikan menjadi persentase pengadaan barang/jasa yang berhasil dilaksanakan, meskipun nama berubah namun prinsip pelaksanaannya masih sama.

Rumus penghitungan dari Prosentase pengadaan barang dan jasa yang berhasil dilaksanakan adalah jumlah paket kegiatan melalui tender yang berhasil dilaksanakan dibagi jumlah keseluruhan paket pekerjaan melalui tender yang ada di SIRUP dikali 100%. Dengan capaian sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.41.

Prosentase pengadaan barang dan jasa yang berhasil dilaksanakan tahun 2017 s.d Tanggal 31 Desember 2022 (Triwulan IV – 2022)

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	jumlah paket tender yang berhasil dilaksanakan	-	-	153 Paket	56 Paket	130 Paket	129 Paket
2.	jumlah keseluruhan paket yang dimohonkan	-	-	153 Paket	56 Paket	130 Paket	129 Paket
3.	Persentase pengadaan barang/jasa yang berhasil dilaksanakan	-	-	100%	100%	100%	100%

Sumber: Bagian PBJ Setda Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dibentuklah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Temanggung di tahun 2019.

Di tahun 2015 s.d tahun 2018 masih berada di Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung namun indikator kerja yang dilaksanakan berbeda dengan Bagian Pengadaan Barang/Jasa.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase Pengadaan barang/jasa pada tahun 2022 sudah terdapat 129 (seratus dua puluh sembilan) paket tender yang berhasil dilaksanakan, namun hal ini juga tidak terlepas adanya beberapa faktor penghambat yang terjadi dalam proses tender yaitu diantaranya adalah:

- a. Adanya perubahan-perubahan dalam pembiayaan spesifikasi teknis, HPS dan perubahan waktu pelaksanaan.
- b. Hambatan lain berkaitan hal tersebut juga dikarenakan hal administratif seperti penandatanganan surat persetujuan karena faktor kedinasan yang mengharuskan KPA berada di luar kantor pada waktu yang bersamaan.
- c. Beban tugas rangkap dari PPK yang menyebabkan usulan proses pemilihan terlambat dari jadwal yang ditentukan.
- d. Beberapa satuan kerja yang menerapkan pola kejar tayang proses pemilihan penyedia barang/jasa di pertengahan sampai penghujung tahun anggaran, sehingga dengan adanya pola ini target percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pencapaiannya rendah

Sedangkan Faktor pendorong adalah membuat surat Sekretaris Daerah Nomor: P/00005/050/I/2022 Tgl. 4 Januari 2022 tentang Pengisian SIRUP Tahun Anggaran 2022 dan percepatan kegiatan PBJ dengan rapat koordinasi, dan sinergi dengan bagian pembangunan. Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah dengan membuat surat Sekretaris Daerah Nomor: P/00005/050/I/2022 Tgl. 4 Januari 2022 tentang Pengisian SIRUP Tahun Anggaran 2022 dan percepatan kegiatan

PBJ dengan rapat koordinasi, dan sinergi dengan bagian pembangunan.

b. Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan

E-procurement merupakan sistem lelang dalam pengadaan barang/jasa oleh pemerintah dengan memanfaatkan sarana teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet. Pelaksanaan pekerjaan pengadaan dengan sistem *e-procurement* direkapitulasi dalam Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Versi 2.3 melalui **<https://sirup.lkpp.go.id/sirup>** yang pengelola atau super adminnya terdapat di Bagian Pengadaan Barang/Jasa dengan angka nilai kontrak diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Sistem *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sendiri telah berkembang menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. *e-tendering*, yaitu tata cara atau metode pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia yang terdaftar pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan cara sistem akan menjadwalkan proyek pekerjaan dan kemudian Penyedia dapat menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan;
2. *e-catalogue* atau katalog elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari penyedia barang dan jasa pemerintah. Sedangkan prosesnya lebih dikenal dengan *e-purchasing* yaitu tata cara pembelian barang dan jasa melalui sistem katalog elektronik

Berdasarkan peraturan, rumus penggunaan *e-procurement* terhadap belanja pengadaan di tahun 2022 ini ada perubahan karena ditahun sebelumnya rumus dalam perhitungannya dari

jumlah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan lewat *e-procurement* dibagi dengan jumlah total pengadaan barang/jasa di Kabupaten Temanggung dikali 100%, namun hal tersebut terdapat ketidaksesuaian hasil yang disebabkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang ada di SIRUP tidak semua melalui SPSE.

Dari hal tersebut rumus penggunaan *e-procurement* terhadap belanja pengadaan barang/jasa disesuaikan dan dilihat dari Jumlah pengadaan barang/jasa yang berhasil dilaksanakan lewat e-pengadaan langsung (e-PL) dibagi dengan Jumlah keseluruhan paket e-pengadaan langsung (e-PL) diatas 50 juta yang ada di SIRUP Kabupaten Temanggung dikali 100%.

Tabel 3.42.
 Persentase penggunaan *e-procurement* terhadap belanja pengadaan barang/jasa tahun 2017 s.d Tanggal 31 Desember 2022 (Triwulan IV – 2022)

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah pengadaan barang/jasa yang berhasil dilaksanakan melalui <i>e-procurement</i>	-	-	484 Paket	356 Paket	243 Paket	142 Paket
2.	Jumlah keseluruhan pengadaan barang/jasa diatas 50 juta yang ada di SIRUP	-	-	1428 Paket	1184 Paket	243 Paket	142 Paket
3.	Persentase penggunaan <i>e-procurement</i> terhadap belanja pengadaan barang/jasa	-	-	33.89%	30.07%	100%	100%

Sumber: Bagian PBJ Setda Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Kendala dari pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara *e-procurement* ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi yaitu tidak semua SDM menguasai aplikasi *e-procurement*, sistem *e-procurement* masih sering terjadi *error system* dan kendali sistem ada di LKPP sehingga banyak tahapan ini dilakukan dengan metode manual dan adanya kegiatan pengadaan barang/jasa yang tidak jadi dilaksanakan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Untuk

pencapaian angka indikator yang baik didukung dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) maupun Perangkat Daerah.

Di tahun 2020 dan 2021 realisasi pengadaan barang/jasa secara e-procurement mengalami penurunan drastis, adapun faktor penghambatnya adalah rasionalisasi anggaran untuk penanggulangan COVID-19 sehingga banyak pembatalan paket tender yang sudah diajukan proses tender.

Pada tahun 2022 target dapat tercapai 100% karena adanya faktor pendorong yaitu membuat surat Sekretaris Daerah Nomor: P/00005/050/I/2022 Tgl. 4 Januari 2022 tentang Pengisian SIRUP Tahun Anggaran 2022 dan percepatan kegiatan PBJ dengan rapat koordinasi, sedangkan faktor penghambat adalah Persiapan Perencanaan dari OPD dan kebijakan dari masing masing kepala OPD dalam pelaksanaan kegiatan. Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan Membuat surat Sekretaris Daerah Nomor: P/00005/050/I/2022 Tgl. 4 Januari 2022 tentang Pengisian SIRUP Tahun Anggaran 2022 dan percepatan kegiatan PBJ dengan rapat koordinasi, dan sinergi dengan bagian pembangunan.

c. Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non-Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pencatatan Non-Tender yaitu pencatatan terhadap pengadaan langsung barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 50.000.000,00 dengan menggunakan kwitansi, nota, bukti pembayaran yang diinput melalui proses pencatatan pada SPSE dan dicatatkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setelah proses administasi dilaksanakan.

Di Triwulan IV tahun 2022, guna meningkatkan pemberdayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam pengadaan barang/jasa, Perangkat Daerah mengutamakan belanja pengadaan

barang/jasa kepada pedagang/merchant yang bergabung dengan penyelenggara perdagangan melalui Sistem Elektronik (PPMSE)/*Marketplace* pada Bela Pengadaan sehingga dalam pelaksanaan pencatatan non-tender juga termasuk dicatatkan rekap transaksi pengadaan barang/jasa dari Perangkat Daerah melalui Sistem Elektronik (PPMSE)/*Marketplace* pada Bela Pengadaan khususnya Mbizmarket.

Rumus dalam perhitungan Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non-Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa adalah Jumlah paket pengadaan barang/jasa yang dicatatkan pada LPSE dibagi jumlah paket Non-Tender dibawah Rp. 50.000.000,00 dikali 100%.

Tabel 3.43.
Persentase kegiatan perangkat daerah yang melakukan pencatatan non-Tender atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa tahun 2017 s.d Triwulan IV – 2022

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah paket Pengadaan Langsung (non-tender) yang dicatatkan pada LPSE	-	-	-	-	533 Paket	1992 Paket
2.	Jumlah paket Pengadaan Langsung (non-tender) dibawah Rp. 50.000.000,00	-	-	-	-	2940 Paket	2064 Paket
3.	Persentase kegiatan perangkat daerah yang melakukan pencatatan non-tender atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa	-	-	-	-	18%	96.51%

Sumber: Bagian PBJ Setda Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat, pelaksanaan di Triwulan IV tahun 2022 Pencatatan Non-Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa masih dalam tahap penyesuaian oleh PPK. Untuk pencapaian angka indikator yang baik harus didukung kedisiplinan yang tegas dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Perangkat Daerah dan Bagian Pengadaan Barang/Jasa.

Target 2022 dapat tercapai 100% karena faktor pendorong
Membuat surat Sekretaris Daerah Nomor:

P/1919/050/01/XI/2021 tentang Pencatatan Non Transaksional pada SPSE versi. 4.4 Tgl. 15 November 2021 sedangkan faktor yang menghambat untuk pencapaian sasaran ini adalah Persiapan Perencanaan dari OPD dan kebijakan dari masing masing kepala OPD dalam pelaksanaan kegiatan. Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian indikator kinerja antara lain Membuat surat Sekretaris Daerah Nomor: P/1919/050/01/XI/2021 tentang Pencatatan Non Transaksional pada SPSE versi. 4.4 Tgl. 15 November 2021.

Untuk mencapai target Kinerja Program Perekonomian dan Pembangunan (Bagian Pengadaan Barang/Jasa) pada tahun 2022 didukung anggaran sebesar Rp 452.859.000,- dengan realisasi Rp 343.383.133,- (75,83%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 109.475.867,- atau 24%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 76% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran (24%)

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ini didukung dengan anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.44.
Anggaran Program Perekonomian dan Pembangunan

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
BAGIAN PEREKONOMIAN			
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2,106,831,500	996,866,499	47.3
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	152,716,000	135,798,372	88.9
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	97,716,000	87,187,885	89.23
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	55,000,000	48,610,487	88.38
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil			
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	1,954,115,500	861,068,127	44.1
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	1,954,115,500	861,068,127	44.06
BAGIAN PEMBANGUNAN			

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	230,000,000	216,644,279	94.2
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	230,000,000	216,644,279	94.2
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	75,000,000	67,495,044	89.99
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	155,000,000	149,149,235	96.23
BAGIAN PBJ			
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	452,859,000	343,383,133	75.8
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	452,859,000	343,383,133	75.8
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	200,000,000	111,852,159	55.93
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	152,859,000	140,447,424	91.88
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	100,000,000	91,083,550	91.08

PROGRAM 3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bagian Umum, Bagian Organisasi dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, diukur dengan 4 (empat) indikator program. Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Sekretariat Daerah, adalah sebagai berikut:

1) Bagian Umum

Tabel 3.45.
Capaian Indikator Kinerja Program 3
Tahun 2022

Program 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2021	2022			Renstra 2019-2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)

Presentase Pemenuhan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Kepala Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
		100			100			100

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Program Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, secara keseluruhan capaian program ini di tahun 2022 sebesar 100% Sedangkan jika dibandingkan dengan target Renstra maka di tahun 2022 sudah tercapai 100% dengan keterangan sebagai berikut :

a. Presentase Pemenuhan Administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah

Presentase Pemenuhan Administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah dapat dihitung dari terpenuhinya laporan Perencanaan, laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, laporan keuangan, dan administrasi lainnya. Adapun rumus Presentase Pemenuhan Administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah adalah Laporan Keuangan, umum, dan jasa penunjang Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung yang terpenuhi dibagi jumlah Laporan Keuangan, umum, dan jasa penunjang Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dikali 100.

Tabel 3.46.
Presentase Pemenuhan Administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah

No	Uraian	2020	2021	2022
----	--------	------	------	------

1	Presentase Pemenuhan Administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	na	10	100
---	--	----	----	-----

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Presentase Pemenuhan Administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah telah tercapai 100 %.

Faktor pendorong yang mempengaruhi capaian kinerja Presentase Pemenuhan Administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah adalah adanya target untuk membuat dokumen perencanaan, laporan keuangan, laporan kinerja, penilaian terhadap tertib administrasi umum dan terpenuhinya jasa penunjang perangkat daerah secara benar dan tepat waktu.

Faktor penghambat adalah banyaknya aplikasi baru serta data yang harus diinput dalam waktu bersamaan dan belum adanya kesesuaian antara rencana anggaran kas, jadwal pelaksanaan pekerjaan di RUP, dengan realisasi pelaksanaan kegiatan.

Rekomendasi dan tindak lanjut adalah dengan meningkatkan kemampuan SDM serta meningkatkan koordinasi antar pelaksana kegiatan.

b. Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Kepala Daerah

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah adalah terpenuhinya kebutuhan kedinasan Kepala Daerah yang diselesaikan dalam tahun anggaran berjalan. Rumus Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah yaitu jumlah kebutuhan kedinasan Kepala Daerah yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan kedinasan Kepala Daerah dikali 100%.

Realisasi Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.47.

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah

No	Uraian	2020	2021	2022
----	--------	------	------	------

1	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah	na	10	100
---	--	----	----	-----

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah direalisasikan pada Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah yang sudah dilakukan diantaranya penyediaan biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati termasuk biaya pembelian inventaris rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati, biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan dan barang-barang inventaris, biaya pemeliharaan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati, biaya fasilitasi kunjungan tamu Bupati dan Wakil Bupati serta pelaksanaan rangkaian kegiatan hari besar nasional/daerah termasuk terselenggaranya rangkaian acara HUT Republik Indonesia ke 77 dan HUT Kabupaten Temanggung ke-188.

Pada indikator kinerja Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah, Faktor pendorong yang mempengaruhi capaian kinerja adalah Adanya kegiatan kedinasan Kepala Daerah yang harus dipenuhi. Faktor penghambat adalah jenis kegiatan, rangkaian acara, waktu pelaksanaan kegiatan yang selalu berubah dari rencana sebelumnya. Rekomendasi dan tindak lanjut adalah dengan Melaksanakan koordinasi dan evaluasi realisasi kegiatan secara berkala agar dapat dilaksanakan secara optimal dan sesuai peraturan yang berlaku.

Untuk mencapai target Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bagian Umum) pada tahun 2022 didukung anggaran sebesar Rp 27.097.438.968,- dengan realisasi Rp 25.962.172.022,- (96%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 1.135.266.946,- atau 4%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 4% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran (96%).

2) Bagian Organisasi

Tabel 3.48.
Capaian Indikator Kinerja Program 3
Tahun 2022

Program 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2021	2022			Renstra 2019-2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase perangkat daerah berpredikat B dalam penyusunan LKjIP	%	100	70,2	100	100	74,5	100	100

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Program Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, secara keseluruhan capaian program ini di tahun 2022 sebesar 100% Sedangkan jika dibandingkan dengan target Renstra maka di tahun 2021 sudah tercapai 100% dengan keterangan sebagai berikut :

a. Persentase Perangkat Daerah berpredikat B dalam penyusunan LKjIP

Rumus penghitungan dari persentase perangkat daerah berpredikat B dalam pembuatan LKjIP adalah jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai B keatas dibagi jumlah seluruh Perangkat Daerah dikali 100%.

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas instansi yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 3.49.
Komponen Penilaian AKIP

Kategori	Nilai Angka	Interprestasi
AA	>90-100	Sangat Memuskan

A	>80-90	Memuaskan
BB	>70-80	Sangat Baik
B	>60-70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30-50	Kurang
D	0-30	Sangat Kurang

Realisasi persentase perangkat daerah berpredikat B dalam pembuatan LKjIP dari tahun 2017 s.d 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.50.
Persentase perangkat daerah berpredikat B dalam pembuatan LKjIP
Tahun 2017 s.d 2022

No	Uraian	Tahun (%)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase perangkat daerah berpredikat B dalam pembuatan LKjIP	31,9	27,65	58,7	58,7	100	*100

Persentase perangkat daerah berpredikat B dalam penyusunan LKjIP Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung di Tahun 2021 sudah tercapai 100%, Sedangkan untuk Tahun 2022 LKjIP belum disusun.

Faktor pendorong untuk capaian nilai LKjIP diatas adalah adanya perubahan renstra untuk menyambungkan atau membuat linier antara RPJMD, Renstra, Renja, PK kepala PD, dan SKP semua pegawai. Sedangkan faktor penghambat adalah belum semua pejabat yang membidangi perencanaan memahami linieritas perencanaan karena banyak pejabat yang baru

Untuk mencapai target Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bagian Organisasi) pada tahun 2022 didukung anggaran sebesar Rp 114.445.500,- dengan realisasi Rp 113.866.959,- (99,49.%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 578.541,- atau 1%. Terkait dengan efisiensi sumber

daya adalah terjadi efisiensi sebesar 0,51% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran (99,49%)

3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Tabel 3.51.
Capaian Indikator Kinerja Program 3
Tahun 2022

Program 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2021	2022			Renstra 2019-2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase pemenuhan pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Program Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, secara keseluruhan capaian program ini di tahun 2022 sebesar 100% Sedangkan jika dibandingkan dengan target Renstra maka di tahun 2022 sudah tercapai 100% dengan keterangan sebagai berikut:

a. Persentase pemenuhan pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah

Persentase Pelayanan Kepala Daerah yang Terlayani adalah terpenuhinya pelayanan kedinasan Kepala Daerah yang diselesaikan dalam tahun anggaran berjalan.

Rumus Persentase Pelayanan Kepala Daerah yang Terlayani yaitu Jumlah Kegiatan Kedinasan Kepala daerah yang seharusnya dilayani dibagi Jumlah Kegiatan Kedinasan Kepala daerah yang dilayani dikali 100%. Realisasi Persentase Pelayanan Kepala Daerah yang Terlayani pada tahun 2022 Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.52.
Persentase Pelayanan Kepala Daerah yang Terlayani Tahun 2022

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Jumlah Kegiatan Kedinasan Kepala daerah yang seharusnya dilayani	1948	1489
2	Jumlah Kegiatan Kedinasan Kepala daerah yang Terlayani	1948	1489

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat Persentase Pelayanan Kepala Daerah yang Terlayani Tahun 2021 dan Tahun 2022 Triwulan IV adalah sebesar 100%.

Adapun untuk RKPD Tahun 2022 pada Bagian Protokol dan komunikasi Pimpinan Setda Temanggung indikator program berupa jumlah layanan kedinasan Kepala Daerah dan terlaksananya layanan kedinasan Kepala Daerah yang terpenuhi. Dengan rincian output kegiatan berupa pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya, terpenuhinya kepesertaan apikasi, terselenggaranya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara, serta terfasilitasinya keprotokolan.

Faktor Pendorong indikator program adalah terpenuhinya SDM bagian prokompim, sedangkan faktor penghambat adalah Banyaknya kegiatan pimpinan, adanya kegiatan yang harus dilaksanakan diluar Agenda pimpinan, perubahan waktu pelaksanaan kegiatan pimpinan yang mendadak. Adapun Rekomendasi/tindak lanjut adalah pemenuhan sarana dan prasarana guna penunjang kegiatan pimpinan serta Menyiapkan langkah mengatisipasi kemungkinan kegiatan tersebut.

Untuk mencapai target Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan) pada tahun 2022 didukung anggaran sebesar Rp 3.983.840.500,- dengan realisasi Rp 3.937.117.942,- (98,83%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 46.722.558,- atau 1%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 1,17% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran (98,83%))

Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ini didukung dengan anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.53.
Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
BAGIAN UMUM			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.790.333.906	13.446.681.183	97,5
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.790.333.906	13.446.681.183	97,51
Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.859.925.100	3.734.454.684	96,7
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	149.995.500	140.397.770	93,6
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	199.995.500	197.040.963	98,52
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	149.999.300	147.226.930	98,15
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	260.000.000	241.215.523	92,78
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	49.928.300	30.542.499	61,17
Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.250.000.000	2.249.897.000	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	800.006.500	728.133.999	91,02
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	279.735.000	270.490.000	96,7
Pengadaan Mebel			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	279.735.000	270.490.000	96,7
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.674.804.472	4.159.542.045	89
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	11.175.000	74,5
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.098.400.000	993.314.306	90,43

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	119.994.000	119.394.000	99,5
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.441.410.472	3.035.658.739	88,21
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.918.837.540	1.814.866.216	94,6
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	250.000.000	244.735.107	97,89
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	691.591.000	641.727.543	92,79
Pemeliharaan Mebel	29.985.740	27.088.500	90,34
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.990.700	81.127.880	81,14
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	19.903.600	19.500.000	97,97
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	827.366.500	800.687.186	96,78
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	169.876.950	168.195.000	99
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	169.876.950	168.195.000	99,01
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2.403.926.000	2.367.942.894	98,5
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	335.964.000	335.918.404	99,99
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	317.983.500	314.683.000	98,96
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.749.978.500	1.717.341.490	98,14
BAGIAN ORGANISASI			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	114.445.500	113.866.959	99,5
Penataan Organisasi	114.445.500	113.866.959	99,5
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	65.000.000	64.961.930	99,94
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	24.445.500	24.413.379	99,87

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	25.000.000	24.491.650	97,97
BAGIAN PROKOMPIM			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.983.840.500	3.937.117.942	98,8
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	889.176.000	866.442.563	97,4
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	249.176.000	247.181.120	99,2
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	40.000.000	21.560.500	53,9
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000	597.700.943	99,62
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3.094.664.500	3.070.675.379	99,2
Fasilitasi Keprotokolan	952.414.500	940.697.263	98,77
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.350.500.000	1.350.173.427	99,98
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	791.750.000	779.804.689	98,49

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022

Kinerja realisasi anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung pada tahun 2022 sebesar Rp68.703.701.248 atau sebesar 95,57% dari total anggaran sebesar Rp71.890.951.668, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.54.

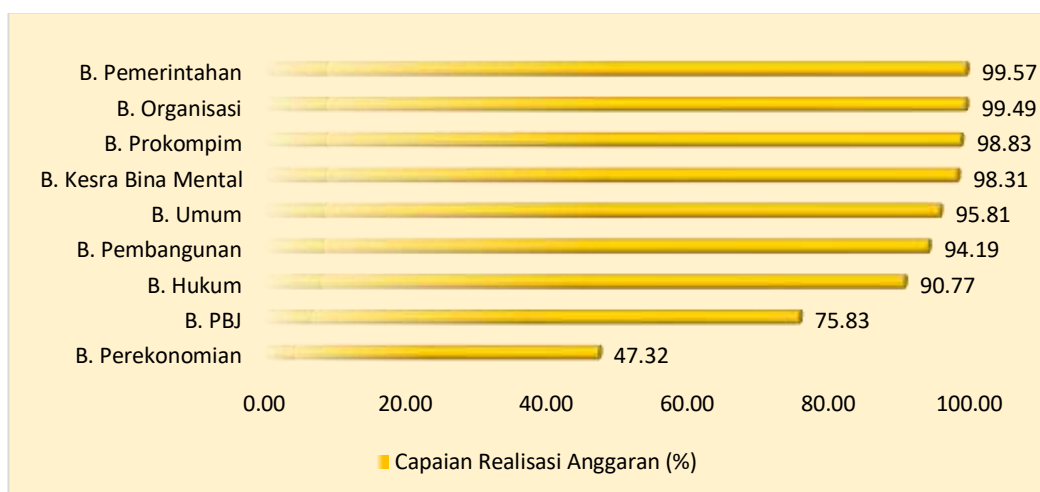
Realisasi Anggaran per Bagian Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022

No	Bagian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)
1	B. Pemerintahan	139.997.000	139.394.750	99,57
2	B. Kesra Bina Mental	36.024.211.200	35.413.617.773	98,31
3	B. Hukum	1.741.328.000	1.580.637.891	90,77
4	B. Perekonomian	2.106.831.500	996.866.499	47,32
5	B. Pembangunan	230.000.000	216.644.279	94,19
6	B. PBJ	452.859.000	343.383.133	75,83

7	B. Umum	27.097.438.968	25.962.172.022	95,81
8	B. Organisasi	114.445.500	113.866.959	99,49
9	B. Prokompim	3.983.840.500	3.937.117.942	98,83
Total		71.890.951.668	68.703.701.248	95,57

Sumber: Laporan Keuangan Sekretariat Daerah

Jika dilihat berdasarkan persentase capaian realisasi anggaran yang tertinggi yaitu Bagian Pemerintahan (99,57%) dan yang terendah Bagian Perekonomian (47,32%), secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.1.

Persentase Capaian Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah

Adapun rincian belanja per jenis belanja masing-masing bagian dapat dilihat sebagai berikut.

1) BAGIAN PEMERINTAHAN

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rupiah	(%)
5	BELANJA DAERAH	139.997.000	139.394.750	602.250	0,43
40102	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	139.997.000	139.394.750	602.250	0,43
40102201	Administrasi Tata Pemerintahan	134.997.200	134.470.750	526.450	0,39
4010220101	Penataan Administrasi Pemerintahan	19.999.800	19.814.300	185.500	0,93
4010220101-51	BELANJA OPERASI	19.999.800	19.814.300	185.500	0,93
4010220101-5102	Belanja Barang dan Jasa	19.999.800	19.814.300	185.500	0,93
4010220101-510201	Belanja Barang	12.858.800	12.831.800	27.000	0,21
4010220101-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	12.858.800	12.831.800	27.000	0,21
4010220101-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	295.000	280.000	15.000	5,08

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rupiah	(%)
4010220101-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	794.800	792.800	2.000	0,25
4010220101-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	260.000	260.000	0	0
4010220101-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.509.000	11.499.000	10.000	0,09
4010220101-510204	Belana Perjalanan Dinas	7.141.000	6.982.500	158.500	2,22
4010220101-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.141.000	6.982.500	158.500	2,22
4010220101-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.141.000	6.982.500	158.500	2,22
4010220102	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	9.997.400	9.878.350	119.050	1,19
4010220102-51	BELANJA OPERASI	9.997.400	9.878.350	119.050	1,19
4010220102-5102	Belanja Barang dan Jasa	9.997.400	9.878.350	119.050	1,19
4010220102-510201	Belanja Barang	3.337.400	3.297.600	39.800	1,19
4010220102-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.337.400	3.297.600	39.800	1,19
4010220102-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	118.500	109.200	9.300	7,85
4010220102-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	295.000	283.000	12.000	4,07
4010220102-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	372.400	372.400	0	0
4010220102-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	520.000	520.000	0	0
4010220102-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.031.500	2.013.000	18.500	0,91
4010220102-510204	Belana Perjalanan Dinas	6.660.000	6.580.750	79.250	1,19
4010220102-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.660.000	6.580.750	79.250	1,19
4010220102-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.660.000	6.580.750	79.250	1,19
4010220103	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	105.000.000	104.778.100	221.900	0,21
4010220103-51	BELANJA OPERASI	105.000.000	104.778.100	221.900	0,21
4010220103-5101	Belanja Pegawai	200.000	200.000	0	0
4010220103-510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	200.000	200.000	0	0
4010220103-51010307	Belanja Honorarium	200.000	200.000	0	0
4010220103-510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	200.000	200.000	0	0
4010220103-5102	Belanja Barang dan Jasa	104.800.000	104.578.100	221.900	0,21
4010220103-510201	Belanja Barang	25.920.000	25.911.750	8.250	0,03
4010220103-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	25.920.000	25.911.750	8.250	0,03
4010220103-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	354.000	354.000	0	0
4010220103-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	16.596.000	16.596.000	0	0
4010220103-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	260.000	260.000	0	0

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rupiah	(%)
4010220103-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.710.000	8.701.750	8.250	0,09
4010220103-510202	Belanja Jasa	58.730.000	58.580.000	150.000	0,26
4010220103-51020201	Belanja Jasa Kantor	30.230.000	30.230.000	0	0
4010220103-510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	30.230.000	30.230.000	0	0
4010220103-51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	28.500.000	28.350.000	150.000	0,53
4010220103-510202050043	Belanja Sewa Hotel	28.500.000	28.350.000	150.000	0,53
4010220103-510204	Belana Perjalanan Dinas	20.150.000	20.086.350	63.650	0,32
4010220103-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	20.150.000	20.086.350	63.650	0,32
4010220103-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.150.000	20.086.350	63.650	0,32
40102204	Fasilitasi Kerjasama Daerah	4.999.800	4.924.000	75.800	1,52
4010220401	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	4.999.800	4.924.000	75.800	1,52
4010220401-51	BELANJA OPERASI	4.999.800	4.924.000	75.800	1,52
4010220401-5102	Belanja Barang dan Jasa	4.999.800	4.924.000	75.800	1,52
4010220401-510201	Belanja Barang	2.816.800	2.816.000	800	0,03
4010220401-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.816.800	2.816.000	800	0,03
4010220401-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.836.000	1.836.000	0	0
4010220401-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	250.800	250.000	800	0,32
4010220401-510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	730.000	730.000	0	0
4010220401-510204	Belana Perjalanan Dinas	2.183.000	2.108.000	75.000	3,44
4010220401-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.183.000	2.108.000	75.000	3,44
4010220401-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.183.000	2.108.000	75.000	3,44
	Jumlah Belanja	139.997.000	139.394.750	602.250	0,43

2) BAGIAN KESRA DAN BINA MENTAL

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rupiah	(%)
	SP2D		35.041.869.544		
	Pelimpahan		514.730.987		
	Pengembalian Kas Daerah		142.982.758		
5	BELANJA DAERAH	36.024.211.200	35.413.617.773	610.593.427	1,69
40102	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	36.024.211.200	35.413.617.773	610.593.427	1,69
40102202	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	36.024.211.200	35.413.617.773	610.593.427	1,69
4010220201	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	785.000.500	639.377.367	145.623.133	18,55
4010220201-51	BELANJA OPERASI	785.000.500	639.377.367	145.623.133	18,55
4010220201-5101	Belanja Pegawai	700.000	700.000	0	0
4010220201-510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan	700.000	700.000	0	0

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rupiah	(%)
	Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				
4010220201-51010307	Belanja Honorarium	700.000	700.000	0	0
4010220201-510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	700.000	700.000	0	0
4010220201-5102	Belanja Barang dan Jasa	784.300.500	638.677.367	145.623.133	18,57
4010220201-510201	Belanja Barang	361.570.800	347.957.286	13.613.514	3,77
4010220201-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	361.570.800	347.957.286	13.613.514	3,77
4010220201-510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	11.510.000	5.054.611	6.455.389	56,09
4010220201-510201010023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	5.250.000	5.230.000	20.000	0,38
4010220201-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.915.000	1.915.000	0	0
4010220201-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.920.000	2.917.000	3.000	0,1
4010220201-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	15.420.800	15.420.750	50	0
4010220201-510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	800.000	800.000	0	0
4010220201-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.842.000	2.840.000	2.000	0,07
4010220201-510201010034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	2.863.000	2.863.000	0	0
4010220201-510201010039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	104.075.000	99.959.925	4.115.075	3,95
4010220201-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.550.000	30.610.000	2.940.000	8,76
4010220201-510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	180.425.000	180.347.000	78.000	0,04
4010220201-510202	Belanja Jasa	262.375.000	142.923.000	119.452.000	45,53
4010220201-51020201	Belanja Jasa Kantor	247.300.000	127.873.000	119.427.000	48,29
4010220201-510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	45.000.000	13.750.000	31.250.000	69,44
4010220201-510202010007	Honorarium Rohaniwan	125.200.000	88.420.000	36.780.000	29,38
4010220201-510202010011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	3.000.000	1.200.000	1.800.000	60
4010220201-510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	45.900.000	13.175.000	32.725.000	71,3
4010220201-510202010047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	28.200.000	11.328.000	16.872.000	59,83

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rupiah	(%)
4010220201-51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	15.075.000	15.050.000	25.000	0,17
4010220201-510202040117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	12.000.000	12.000.000	0	0
4010220201-510202040118	Belanja Sewa Mebel	3.075.000	3.050.000	25.000	0,81
4010220201-510203	Belanja Pemeliharaan	3.819.200	3.800.000	19.200	0,5
4010220201-51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.819.200	3.800.000	19.200	0,5
4010220201-510203020410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	3.819.200	3.800.000	19.200	0,5
4010220201-510204	Belana Perjalanan Dinas	110.535.500	97.997.081	12.538.419	11,34
4010220201-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	110.535.500	97.997.081	12.538.419	11,34
4010220201-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	102.285.500	95.267.081	7.018.419	6,86
4010220201-510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.250.000	2.730.000	5.520.000	66,91
4010220201-510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	46.000.000	46.000.000	0	0
4010220201-51020501	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	36.000.000	36.000.000	0	0
4010220201-510205010001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	36.000.000	36.000.000	0	0
4010220201-51020502	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.000.000	10.000.000	0	0
4010220201-510205020001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	10.000.000	10.000.000	0	0
4010220202	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	34.603.121.000	34.336.080.840	267.040.160	0,77
4010220202-51	BELANJA OPERASI	34.536.976.000	34.273.941.840	263.034.160	0,76
4010220202-5102	Belanja Barang dan Jasa	217.976.000	204.941.840	13.034.160	5,98
4010220202-510201	Belanja Barang	68.169.400	65.797.740	2.371.660	3,48
4010220202-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	68.169.400	65.797.740	2.371.660	3,48
4010220202-510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.000.000	6.972.840	27.160	0,39
4010220202-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	766.000	765.000	1.000	0,13
4010220202-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	3.930.000	3.890.000	40.000	1,02
4010220202-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	12.238.400	12.112.400	126.000	1,03
4010220202-510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	550.000	550.000	0	0

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rupiah	(%)
4010220202-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.640.000	3.630.000	10.000	0,27
4010220202-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.795.000	29.627.500	2.167.500	6,82
4010220202-510201010075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	8.250.000	8.250.000	0	0
4010220202-510202	Belanja Jasa	108.328.600	102.543.890	5.784.710	5,34
4010220202-51020201	Belanja Jasa Kantor	103.850.000	100.420.000	3.430.000	3,3
4010220202-510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.500.000	1.250.000	1.250.000	50
4010220202-510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	47.350.000	46.600.000	750.000	1,58
4010220202-510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	50.000.000	50.000.000	0	0
4010220202-510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.400.000	2.210.000	1.190.000	35
4010220202-510202010047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	600.000	360.000	240.000	40
4010220202-51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	3.453.600	2.123.890	1.329.710	38,5
4010220202-510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.000.000	1.920.000	1.080.000	36
4010220202-510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	201.600	90.620	110.980	55,05
4010220202-510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	252.000	113.270	138.730	55,05
4010220202-51020212	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.025.000	0	1.025.000	100
4010220202-510202120001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.025.000	0	1.025.000	100
4010220202-510204	Belana Perjalanan Dinas	41.478.000	36.600.210	4.877.790	11,76
4010220202-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	41.478.000	36.600.210	4.877.790	11,76
4010220202-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	32.178.000	27.785.210	4.392.790	13,65
4010220202-510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.300.000	8.815.000	485.000	5,22
4010220202-5105	Belanja Hibah	34.319.000.000	34.069.000.000	250.000.000	0,73
4010220202-510505	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	34.319.000.000	34.069.000.000	250.000.000	0,73
4010220202-51050502	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	34.319.000.000	34.069.000.000	250.000.000	0,73

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rupiah	(%)
4010220202-510505020001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	34.319.000.000	34.069.000.000	250.000.000	0,73
4010220202-52	BELANJA MODAL	66.145.000	62.139.000	4.006.000	6,06
4010220202-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.145.000	62.139.000	4.006.000	6,06
4010220202-520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	26.145.000	25.839.000	306.000	1,17
4010220202-52020501	Belanja Modal Alat Kantor	26.145.000	25.839.000	306.000	1,17
4010220202-520205010004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	26.145.000	25.839.000	306.000	1,17
4010220202-520210	Belanja Modal Komputer	40.000.000	36.300.000	3.700.000	9,25
4010220202-52021001	Belanja Modal Komputer Unit	40.000.000	36.300.000	3.700.000	9,25
4010220202-520210010002	Belanja Modal Personal Computer	40.000.000	36.300.000	3.700.000	9,25
4010220203	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	636.089.700	438.159.566	197.930.134	31,12
4010220203-51	BELANJA OPERASI	636.089.700	438.159.566	197.930.134	31,12
4010220203-5101	Belanja Pegawai	1.850.000	0	1.850.000	100
4010220203-510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.850.000	0	1.850.000	100
4010220203-51010307	Belanja Honorarium	1.850.000	0	1.850.000	100
4010220203-510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.850.000	0	1.850.000	100
4010220203-5102	Belanja Barang dan Jasa	634.239.700	438.159.566	196.080.134	30,92
4010220203-510201	Belanja Barang	113.333.860	102.323.500	11.010.360	9,71
4010220203-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	113.333.860	102.323.500	11.010.360	9,71
4010220203-510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.300.000	1.730.000	570.000	24,78
4010220203-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.570.860	1.560.000	10.860	0,69
4010220203-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.480.000	1.475.000	5.000	0,34
4010220203-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	8.680.000	3.456.000	5.224.000	60,18
4010220203-510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	600.000	600.000	0	0
4010220203-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.328.000	1.550.000	778.000	33,42
4010220203-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	83.875.000	79.452.500	4.422.500	5,27

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rupiah	(%)
4010220203-510201010075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	12.500.000	12.500.000	0	0
4010220203-510202	Belanja Jasa	434.385.840	298.059.268	136.326.572	31,38
4010220203-51020201	Belanja Jasa Kantor	317.885.840	253.659.268	64.226.572	20,2
4010220203-510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11.400.000	11.400.000	0	0
4010220203-510202010006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	229.555.840	196.589.268	32.966.572	14,36
4010220203-510202010007	Honorarium Rohaniwan	4.000.000	3.000.000	1.000.000	25
4010220203-510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.530.000	1.360.000	170.000	11,11
4010220203-510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	71.400.000	41.310.000	30.090.000	42,14
4010220203-51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	116.500.000	44.400.000	72.100.000	61,89
4010220203-510202040036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	92.500.000	38.400.000	54.100.000	58,49
4010220203-510202040037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	24.000.000	6.000.000	18.000.000	75
4010220203-510204	Belana Perjalanan Dinas	86.520.000	37.776.798	48.743.202	56,34
4010220203-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	86.520.000	37.776.798	48.743.202	56,34
4010220203-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	86.520.000	37.776.798	48.743.202	56,34
	Jumlah Belanja	36.024.211.200	35.413.617.773	610.593.427	1,69

3) BAGIAN HUKUM

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rupiah	(%)
	SP2D		1.350.218.000		
	Pelimpahan		248.419.891		
	Pengembalian Kas Daerah		18.000.000		
5	BELANJA DAERAH	1.741.328.000	1.580.637.891	160.690.109	9,23
40102	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.741.328.000	1.580.637.891	160.690.109	9,23
40102203	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	1.741.328.000	1.580.637.891	160.690.109	9,23
4010220301	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	99.999.900	84.967.575	15.032.325	15,03
4010220301-51	BELANJA OPERASI	73.499.900	60.658.575	12.841.325	17,47
4010220301-5102	Belanja Barang dan Jasa	73.499.900	60.658.575	12.841.325	17,47
4010220301-510201	Belanja Barang	26.588.900	14.037.000	12.551.900	47,21
4010220301-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	26.588.900	14.037.000	12.551.900	47,21
4010220301-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.675.500	2.687.000	1.988.500	42,53
4010220301-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.536.000	1.360.000	3.176.000	70,02

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rupiah	(%)
4010220301-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.618.400	5.790.000	2.828.400	32,82
4010220301-510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	100.000	70.000	30.000	30
4010220301-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.609.000	2.530.000	3.079.000	54,89
4010220301-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.050.000	1.600.000	1.450.000	47,54
4010220301-510204	Belana Perjalanan Dinas	46.911.000	46.621.575	289.425	0,62
4010220301-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	46.911.000	46.621.575	289.425	0,62
4010220301-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	46.911.000	46.621.575	289.425	0,62
4010220301-52	BELANJA MODAL	26.500.000	24.309.000	2.191.000	8,27
4010220301-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.500.000	24.309.000	2.191.000	8,27
4010220301-520210	Belanja Modal Komputer	26.500.000	24.309.000	2.191.000	8,27
4010220301-52021001	Belanja Modal Komputer Unit	18.000.000	17.982.000	18.000	0,1
4010220301-520210010002	Belanja Modal Personal Computer	18.000.000	17.982.000	18.000	0,1
4010220301-52021002	Belanja Modal Peralatan Komputer	8.500.000	6.327.000	2.173.000	25,56
4010220301-520210020003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	8.500.000	6.327.000	2.173.000	25,56
4010220302	Fasilitasi Bantuan Hukum	1.591.328.100	1.449.869.316	141.458.784	8,89
4010220302-51	BELANJA OPERASI	1.567.828.100	1.426.392.816	141.435.284	9,02
4010220302-5102	Belanja Barang dan Jasa	1.567.828.100	1.426.392.816	141.435.284	9,02
4010220302-510201	Belanja Barang	39.346.100	20.445.370	18.900.730	48,04
4010220302-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	39.346.100	20.445.370	18.900.730	48,04
4010220302-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.484.500	3.183.330	4.301.170	57,47
4010220302-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.228.000	2.270.440	3.957.560	63,54
4010220302-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12.383.600	5.221.600	7.162.000	57,83
4010220302-510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	600.000	500.000	100.000	16,67
4010220302-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.632.500	1.240.000	392.500	24,04
4010220302-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.017.500	8.030.000	2.987.500	27,12
4010220302-510202	Belanja Jasa	1.486.350.000	1.365.595.000	120.755.000	8,12
4010220302-51020201	Belanja Jasa Kantor	1.486.350.000	1.365.595.000	120.755.000	8,12
4010220302-510202010005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	1.202.850.000	1.082.845.000	120.005.000	9,98
4010220302-510202010006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	283.500.000	282.750.000	750.000	0,26

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rupiah	(%)
4010220302-510204	Belana Perjalanan Dinas	42.132.000	40.352.446	1.779.554	4,22
4010220302-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	42.132.000	40.352.446	1.779.554	4,22
4010220302-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	39.882.000	39.597.446	284.554	0,71
4010220302-510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.250.000	755.000	1.495.000	66,44
4010220302-52	BELANJA MODAL	23.500.000	23.476.500	23.500	0,1
4010220302-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.500.000	23.476.500	23.500	0,1
4010220302-520210	Belanja Modal Komputer	23.500.000	23.476.500	23.500	0,1
4010220302-52021001	Belanja Modal Komputer Unit	15.000.000	14.985.000	15.000	0,1
4010220302-520210010002	Belanja Modal Personal Computer	15.000.000	14.985.000	15.000	0,1
4010220302-52021002	Belanja Modal Peralatan Komputer	8.500.000	8.491.500	8.500	0,1
4010220302-520210020003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	8.500.000	8.491.500	8.500	0,1
4010220303	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	50.000.000	45.801.000	4.199.000	8,4
4010220303-51	BELANJA OPERASI	48.800.000	44.603.000	4.197.000	8,6
4010220303-5102	Belanja Barang dan Jasa	48.800.000	44.603.000	4.197.000	8,6
4010220303-510201	Belanja Barang	15.186.200	11.911.000	3.275.200	21,57
4010220303-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	15.186.200	11.911.000	3.275.200	21,57
4010220303-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.790.000	3.159.000	631.000	16,65
4010220303-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.290.000	636.000	654.000	50,7
4010220303-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.931.200	2.841.000	90.200	3,08
4010220303-510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	50.000	40.000	10.000	20
4010220303-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.040.000	660.000	380.000	36,54
4010220303-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.085.000	4.575.000	1.510.000	24,82
4010220303-510202	Belanja Jasa	31.726.800	31.068.000	658.800	2,08
4010220303-51020201	Belanja Jasa Kantor	30.000.000	30.000.000	0	0
4010220303-510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.000.000	6.000.000	0	0
4010220303-510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.000.000	24.000.000	0	0
4010220303-51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.726.800	1.068.000	658.800	38,15
4010220303-510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.500.000	960.000	540.000	36
4010220303-510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	100.800	48.000	52.800	52,38

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rupiah	(%)
4010220303-510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	126.000	60.000	66.000	52,38
4010220303-510204	Belana Perjalanan Dinas	1.887.000	1.624.000	263.000	13,94
4010220303-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.887.000	1.624.000	263.000	13,94
4010220303-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.887.000	1.624.000	263.000	13,94
4010220303-52	BELANJA MODAL	1.200.000	1.198.000	2.000	0,17
4010220303-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.200.000	1.198.000	2.000	0,17
4010220303-520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.200.000	1.198.000	2.000	0,17
4010220303-52020501	Belanja Modal Alat Kantor	1.200.000	1.198.000	2.000	0,17
4010220303-520205010005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.200.000	1.198.000	2.000	0,17
	Jumlah Belanja	1.741.328.000	1.580.637.891	160.690.109	9,23

4) BAGIAN PEREKONOMIAN

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rupiah	(%)
	SP2D		1.066.132.667		
	Pelimpahan		360.910.317		
	Pengembalian Kas Daerah		430.176.485		
5	BELANJA DAERAH	2.106.831.500	996.866.499	1.109.965.001	52,68
40103	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.106.831.500	996.866.499	1.109.965.001	52,68
40103201	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	152.716.000	135.798.372	16.917.628	11,08
4010320101	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	97.716.000	87.187.885	10.528.115	10,77
4010320101-51	BELANJA OPERASI	97.716.000	87.187.885	10.528.115	10,77
4010320101-5102	Belanja Barang dan Jasa	97.716.000	87.187.885	10.528.115	10,77
4010320101-510201	Belanja Barang	17.333.500	16.409.500	924.000	5,33
4010320101-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	17.333.500	16.409.500	924.000	5,33
4010320101-510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.821.500	2.820.000	1.500	0,05
4010320101-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	377.000	308.000	69.000	18,3
4010320101-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.472.000	1.173.000	299.000	20,31
4010320101-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.400.000	1.116.000	284.000	20,29
4010320101-510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	300.000	296.000	4.000	1,33

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rupiah	(%)
4010320101-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.213.000	990.000	223.000	18,38
4010320101-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.750.000	9.706.500	43.500	0,45
4010320101-510202	Belanja Jasa	39.642.000	37.785.385	1.856.615	4,68
4010320101-51020201	Belanja Jasa Kantor	26.800.000	26.800.000	0	0
4010320101-510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.500.000	2.500.000	0	0
4010320101-510202010007	Honorarium Rohaniwan	200.000	200.000	0	0
4010320101-510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.000.000	24.000.000	0	0
4010320101-510202010047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	100.000	100.000	0	0
4010320101-51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.692.000	1.061.930	630.070	37,24
4010320101-510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.500.000	960.000	540.000	36
4010320101-510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	48.000	45.300	2.700	5,63
4010320101-510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	144.000	56.630	87.370	60,67
4010320101-51020212	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	11.150.000	9.923.455	1.226.545	11
4010320101-510202120002	Belanja Sosialisasi	11.150.000	9.923.455	1.226.545	11
4010320101-510204	Belana Perjalanan Dinas	40.740.500	32.993.000	7.747.500	19,02
4010320101-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	40.740.500	32.993.000	7.747.500	19,02
4010320101-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.740.500	32.993.000	7.747.500	19,02
4010320102	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	55.000.000	48.610.487	6.389.513	11,62
4010320102-51	BELANJA OPERASI	55.000.000	48.610.487	6.389.513	11,62
4010320102-5102	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000	48.610.487	6.389.513	11,62
4010320102-510201	Belanja Barang	9.945.500	8.742.250	1.203.250	12,1
4010320102-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	9.945.500	8.742.250	1.203.250	12,1
4010320102-510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.500.000	1.300.000	200.000	13,33
4010320102-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	961.500	656.500	305.000	31,72
4010320102-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	531.000	530.000	1.000	0,19
4010320102-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	920.000	820.250	99.750	10,84

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rupiah	(%)
4010320102-510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0	0	0	0
4010320102-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.033.000	910.000	123.000	11,91
4010320102-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000	4.525.500	474.500	9,49
4010320102-510202	Belanja Jasa	25.692.000	25.051.737	640.263	2,49
4010320102-51020201	Belanja Jasa Kantor	24.000.000	24.000.000	0	0
4010320102-510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0	0	0	0
4010320102-510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.000.000	24.000.000	0	0
4010320102-51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.692.000	1.051.737	640.263	37,84
4010320102-510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.500.000	960.000	540.000	36
4010320102-510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	48.000	40.770	7.230	15,06
4010320102-510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	144.000	50.967	93.033	64,61
4010320102-51020212	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0	0	0	0
4010320102-510202120001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	0	0	0	0
4010320102-510204	Belana Perjalanan Dinas	19.362.500	14.816.500	4.546.000	23,48
4010320102-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19.362.500	14.816.500	4.546.000	23,48
4010320102-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16.912.500	14.701.500	2.211.000	13,07
4010320102-510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.450.000	115.000	2.335.000	95,31
4010320103	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	0	0	0	0
4010320103-51	BELANJA OPERASI	0	0	0	0
4010320103-5102	Belanja Barang dan Jasa	0	0	0	0
4010320103-510201	Belanja Barang	0	0	0	0
4010320103-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	0	0	0	0
4010320103-510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0	0	0	0
4010320103-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0	0	0	0
4010320103-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0	0	0	0

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rupiah	(%)
4010320103-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	0	0	0	0
4010320103-510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0	0	0	0
4010320103-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0	0	0	0
4010320103-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0	0	0	0
4010320103-510202	Belanja Jasa	0	0	0	0
4010320103-51020201	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0
4010320103-510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0	0	0	0
4010320103-510204	Belana Perjalanan Dinas	0	0	0	0
4010320103-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0	0	0	0
4010320103-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	0	0	0
4010320103-510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	0	0
40103204	Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	1.954.115.500	861.068.127	1.093.047.373	55,94
4010320401	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	1.954.115.500	861.068.127	1.093.047.373	55,94
4010320401-51	BELANJA OPERASI	1.954.115.500	861.068.127	1.093.047.373	55,94
4010320401-5101	Belanja Pegawai	650.000	350.000	300.000	46,15
4010320401-510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	650.000	350.000	300.000	46,15
4010320401-51010307	Belanja Honorarium	650.000	350.000	300.000	46,15
4010320401-510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	650.000	350.000	300.000	46,15
4010320401-5102	Belanja Barang dan Jasa	1.953.465.500	860.718.127	1.092.747.373	55,94
4010320401-510201	Belanja Barang	234.405.500	90.872.167	143.533.333	61,23
4010320401-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	234.405.500	90.872.167	143.533.333	61,23
4010320401-510201010002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.500.000	0	2.500.000	100
4010320401-510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	22.160.600	15.781.269	6.379.331	28,79
4010320401-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.244.000	4.457.000	787.000	15,01
4010320401-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	8.376.500	3.946.500	4.430.000	52,89

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rupiah	(%)
4010320401-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	78.850.400	13.203.000	65.647.400	83,26
4010320401-510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.150.000	650.000	500.000	43,48
4010320401-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	13.669.500	7.900.500	5.769.000	42,2
4010320401-510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.700.000	4.116.000	1.584.000	27,79
4010320401-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	49.004.500	21.367.898	27.636.602	56,4
4010320401-510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	47.750.000	19.450.000	28.300.000	59,27
4010320401-510202	Belanja Jasa	991.660.000	427.403.500	564.256.500	56,9
4010320401-51020201	Belanja Jasa Kantor	192.450.000	68.375.000	124.075.000	64,47
4010320401-510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	65.750.000	38.650.000	27.100.000	41,22
4010320401-510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	70.525.000	0	70.525.000	100
4010320401-510202010007	Honorarium Rohaniwan	0	0	0	0
4010320401-510202010008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	3.000.000	3.000.000	0	0
4010320401-510202010014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	5.000.000	700.000	4.300.000	86
4010320401-510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4.675.000	1.700.000	2.975.000	63,64
4010320401-510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	8.500.000	3.825.000	4.675.000	55
4010320401-510202010037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	27.000.000	12.500.000	14.500.000	53,7
4010320401-510202010047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	8.000.000	8.000.000	0	0
4010320401-51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	141.815.000	112.993.000	28.822.000	20,32
4010320401-510202040022	Belanja Sewa Electric Generating Set	4.600.000	0	4.600.000	100
4010320401-510202040117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	99.255.000	82.263.000	16.992.000	17,12
4010320401-510202040118	Belanja Sewa Mebel	19.910.000	16.150.000	3.760.000	18,88
4010320401-510202040132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	18.050.000	14.580.000	3.470.000	19,22
4010320401-51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	20.000.000	0	20.000.000	100
4010320401-510202050009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	20.000.000	0	20.000.000	100

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rupiah	(%)
4010320401-51020212	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	637.395.000	246.035.500	391.359.500	61,4
4010320401-510202120002	Belanja Sosialisasi	637.395.000	246.035.500	391.359.500	61,4
4010320401-510204	Belana Perjalanan Dinas	523.400.000	195.885.710	327.514.290	62,57
4010320401-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	523.400.000	195.885.710	327.514.290	62,57
4010320401-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	480.850.000	190.210.710	290.639.290	60,44
4010320401-510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	42.550.000	5.675.000	36.875.000	86,66
4010320401-510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	204.000.000	146.556.750	57.443.250	28,16
4010320401-51020501	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	60.000.000	58.250.000	1.750.000	2,92
4010320401-510205010001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	60.000.000	58.250.000	1.750.000	2,92
4010320401-51020502	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	144.000.000	88.306.750	55.693.250	38,68
4010320401-510205020001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	144.000.000	88.306.750	55.693.250	38,68
4010320401-5106	Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0
4010320401-510601	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	0	0	0	0
4010320401-51060101	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	0	0	0	0
4010320401-510601010001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	0	0	0	0
	Jumlah Belanja	2.106.831.500	996.866.499	1.109.965.001	52,68

5) BAGIAN PEMBANGUNAN

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rupiah	(%)
	SP2D		143.329.596		
	Pelimpahan		78.051.547		
	Pengembalian Kas Daerah		4.736.864		
5	BELANJA DAERAH	230.000.000	216.644.279	13.355.721	5,81
40103	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	230.000.000	216.644.279	13.355.721	5,81
40103202	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	230.000.000	216.644.279	13.355.721	5,81
4010320201	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	75.000.000	67.495.044	7.504.956	10,01
4010320201-51	BELANJA OPERASI	75.000.000	67.495.044	7.504.956	10,01

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rupiah	(%)
4010320201-5102	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	67.495.044	7.504.956	10,01
4010320201-510201	Belanja Barang	35.077.500	27.737.922	7.339.578	20,92
4010320201-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	35.077.500	27.737.922	7.339.578	20,92
4010320201-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.007.500	1.007.500	0	0
4010320201-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	784.000	780.500	3.500	0,45
4010320201-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	27.704.000	20.934.797	6.769.203	24,43
4010320201-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.557.000	1.480.000	77.000	4,95
4010320201-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.025.000	3.535.125	489.875	12,17
4010320201-510202	Belanja Jasa	10.500.000	10.500.000	0	0
4010320201-51020201	Belanja Jasa Kantor	10.500.000	10.500.000	0	0
4010320201-510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	10.500.000	10.500.000	0	0
4010320201-510204	Belanja Perjalanan Dinas	29.422.500	29.257.122	165.378	0,56
4010320201-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	29.422.500	29.257.122	165.378	0,56
4010320201-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27.182.500	27.017.122	165.378	0,61
4010320201-510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.240.000	2.240.000	0	0
4010320202	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	155.000.000	149.149.235	5.850.765	3,77
4010320202-51	BELANJA OPERASI	125.000.000	119.149.235	5.850.765	4,68
4010320202-5102	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000	119.149.235	5.850.765	4,68
4010320202-510201	Belanja Barang	39.216.200	35.852.500	3.363.700	8,58
4010320202-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	39.216.200	35.852.500	3.363.700	8,58
4010320202-510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.000.000	2.000.000	0	0
4010320202-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	763.000	763.000	0	0
4010320202-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	510.000	508.000	2.000	0,39
4010320202-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.657.200	3.657.200	0	0
4010320202-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.176.000	1.172.000	4.000	0,34
4010320202-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.110.000	27.752.300	3.357.700	10,79
4010320202-510202	Belanja Jasa	70.652.000	68.881.935	1.770.065	2,51

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rupiah	(%)
4010320202-51020201	Belanja Jasa Kantor	68.240.000	67.820.000	420.000	0,62
4010320202-510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	29.000.000	29.000.000	0	0
4010320202-510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.240.000	4.820.000	420.000	8,02
4010320202-510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.000.000	24.000.000	0	0
4010320202-510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	10.000.000	10.000.000	0	0
4010320202-51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.412.000	1.061.935	1.350.065	55,97
4010320202-510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.220.000	960.000	1.260.000	56,76
4010320202-510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	48.000	45.305	2.695	5,61
4010320202-510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	144.000	56.630	87.370	60,67
4010320202-510203	Belanja Pemeliharaan	2.318.800	2.300.000	18.800	0,81
4010320202-51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.318.800	2.300.000	18.800	0,81
4010320202-510203020410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	2.318.800	2.300.000	18.800	0,81
4010320202-510204	Belanja Perjalanan Dinas	12.813.000	12.114.800	698.200	5,45
4010320202-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.813.000	12.114.800	698.200	5,45
4010320202-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.713.000	7.689.800	23.200	0,3
4010320202-510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.100.000	4.425.000	675.000	13,24
4010320202-52	BELANJA MODAL	30.000.000	30.000.000	0	0
4010320202-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.000.000	30.000.000	0	0
4010320202-520210	Belanja Modal Komputer	30.000.000	30.000.000	0	0
4010320202-52021001	Belanja Modal Komputer Unit	30.000.000	30.000.000	0	0
4010320202-520210010002	Belanja Modal Personal Computer	30.000.000	30.000.000	0	0
	Jumlah Belanja	230.000.000	216.644.279	13.355.721	5,81

6) BAGIAN PBJ

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rupiah	(%)
	SP2D		240.041.639		
	Pelimpahan		109.995.244		
	Pengembalian Kas Daerah		6.653.750		
5	BELANJA DAERAH	452.859.000	343.383.133	109.475.867	24,17
40103	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	452.859.000	343.383.133	109.475.867	24,17
40103203	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	452.859.000	343.383.133	109.475.867	24,17

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rupiah	(%)
4010320301	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	200.000.000	111.852.159	88.147.841	44,07
4010320301-51	BELANJA OPERASI	200.000.000	111.852.159	88.147.841	44,07
4010320301-5101	Belanja Pegawai	200.000	200.000	0	0
4010320301-510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	200.000	200.000	0	0
4010320301-51010307	Belanja Honorarium	200.000	200.000	0	0
4010320301-510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	200.000	200.000	0	0
4010320301-5102	Belanja Barang dan Jasa	199.800.000	111.652.159	88.147.841	44,12
4010320301-510201	Belanja Barang	27.819.000	19.751.204	8.067.796	29
4010320301-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	27.819.000	19.751.204	8.067.796	29
4010320301-510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.000.000	3.861.704	138.296	3,46
4010320301-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.274.000	6.222.000	52.000	0,83
4010320301-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.370.000	2.370.000	0	0
4010320301-510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	200.000	200.000	0	0
4010320301-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.110.000	3.990.000	120.000	2,92
4010320301-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.865.000	3.107.500	7.757.500	71,4
4010320301-510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0	0	0	0
4010320301-510202	Belanja Jasa	129.880.000	51.455.975	78.424.025	60,38
4010320301-51020201	Belanja Jasa Kantor	121.300.000	49.200.000	72.100.000	59,44
4010320301-510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.300.000	0	1.300.000	100
4010320301-510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	120.000.000	49.200.000	70.800.000	59
4010320301-51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	8.580.000	2.255.975	6.324.025	73,71
4010320301-510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	7.500.000	2.052.086	5.447.914	72,64
4010320301-510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	480.000	90.619	389.381	81,12
4010320301-510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	600.000	113.270	486.730	81,12
4010320301-510204	Belana Perjalanan Dinas	42.101.000	40.444.980	1.656.020	3,93
4010320301-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	42.101.000	40.444.980	1.656.020	3,93
4010320301-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	42.101.000	40.444.980	1.656.020	3,93
4010320302	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	152.859.000	140.447.424	12.411.576	8,12
4010320302-51	BELANJA OPERASI	112.859.000	103.814.924	9.044.076	8,01

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rupiah	(%)
4010320302-5101	Belanja Pegawai	14.950.000	10.150.000	4.800.000	32,11
4010320302-510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	14.950.000	10.150.000	4.800.000	32,11
4010320302-51010307	Belanja Honorarium	14.950.000	10.150.000	4.800.000	32,11
4010320302-510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	550.000	550.000	0	0
4010320302-510103070003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	14.400.000	9.600.000	4.800.000	33,33
4010320302-5102	Belanja Barang dan Jasa	97.909.000	93.664.924	4.244.076	4,33
4010320302-510201	Belanja Barang	36.876.000	35.497.390	1.378.610	3,74
4010320302-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	36.876.000	35.497.390	1.378.610	3,74
4010320302-510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.000.000	3.975.640	24.360	0,61
4010320302-510201010023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	3.000.000	3.000.000	0	0
4010320302-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.866.000	3.863.500	2.500	0,06
4010320302-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.540.000	3.499.500	40.500	1,14
4010320302-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.545.000	3.545.000	0	0
4010320302-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.200.000	4.345.000	855.000	16,44
4010320302-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.725.000	13.268.750	456.250	3,32
4010320302-510202	Belanja Jasa	30.316.000	27.661.934	2.654.066	8,75
4010320302-51020201	Belanja Jasa Kantor	28.600.000	26.600.000	2.000.000	6,99
4010320302-510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.600.000	2.600.000	2.000.000	43,48
4010320302-510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.000.000	24.000.000	0	0
4010320302-510202010071	Belanja Lembur	0	0	0	0
4010320302-51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.716.000	1.061.934	654.066	38,12
4010320302-510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.500.000	960.000	540.000	36
4010320302-510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	96.000	45.301	50.699	52,81
4010320302-510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	120.000	56.633	63.367	52,81
4010320302-51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
4010320302-510202050043	Belanja Sewa Hotel	0	0	0	0
4010320302-510204	Belana Perjalanan Dinas	30.717.000	30.505.600	211.400	0,69

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rupiah	(%)
4010320302-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	30.717.000	30.505.600	211.400	0,69
4010320302-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30.717.000	30.505.600	211.400	0,69
4010320302-52	BELANJA MODAL	40.000.000	36.632.500	3.367.500	8,42
4010320302-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000	17.485.000	2.515.000	12,58
4010320302-520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	15.000.000	12.485.000	2.515.000	16,77
4010320302-52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	15.000.000	12.485.000	2.515.000	16,77
4010320302-520205020006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	15.000.000	12.485.000	2.515.000	16,77
4010320302-520210	Belanja Modal Komputer	5.000.000	5.000.000	0	0
4010320302-52021002	Belanja Modal Peralatan Komputer	5.000.000	5.000.000	0	0
4010320302-520210020004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	5.000.000	5.000.000	0	0
4010320302-5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.000.000	19.147.500	852.500	4,26
4010320302-520508	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	20.000.000	19.147.500	852.500	4,26
4010320302-52050801	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	20.000.000	19.147.500	852.500	4,26
4010320302-520508010005	Belanja Modal Software	20.000.000	19.147.500	852.500	4,26
4010320303	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	100.000.000	91.083.550	8.916.450	8,92
4010320303-51	BELANJA OPERASI	100.000.000	91.083.550	8.916.450	8,92
4010320303-5101	Belanja Pegawai	26.050.000	26.050.000	0	0
4010320303-510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	26.050.000	26.050.000	0	0
4010320303-51010307	Belanja Honorarium	26.050.000	26.050.000	0	0
4010320303-510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	200.000	200.000	0	0
4010320303-510103070003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	25.850.000	25.850.000	0	0
4010320303-5102	Belanja Barang dan Jasa	73.950.000	65.033.550	8.916.450	12,06
4010320303-510201	Belanja Barang	22.879.500	15.975.750	6.903.750	30,17
4010320303-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	22.879.500	15.975.750	6.903.750	30,17
4010320303-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.180.000	960.000	220.000	18,64
4010320303-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.449.500	1.449.500	0	0
4010320303-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.950.000	1.920.000	30.000	1,54
4010320303-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.300.000	11.646.250	6.653.750	36,36
4010320303-510202	Belanja Jasa	18.400.000	16.400.000	2.000.000	10,87

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rupiah	(%)
4010320303-51020201	Belanja Jasa Kantor	6.400.000	4.700.000	1.700.000	26,56
4010320303-510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.400.000	4.700.000	1.700.000	26,56
4010320303-51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	12.000.000	11.700.000	300.000	2,5
4010320303-510202050043	Belanja Sewa Hotel	12.000.000	11.700.000	300.000	2,5
4010320303-510204	Belana Perjalanan Dinas	32.670.500	32.657.800	12.700	0,04
4010320303-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	32.670.500	32.657.800	12.700	0,04
4010320303-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	32.670.500	32.657.800	12.700	0,04
	Jumlah Belanja	452.859.000	343.383.133	109.475.867	24,17

7) BAGIAN UMUM

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rupiah	(%)
	SP2D		29.399.167.403		
	Pelimpahan		-3.223.036.722		
	Pengembalian Kas Daerah		213.958.659		
5	BELANJA DAERAH	27.097.438.968	25.962.172.022	1.135.266.946	4,19
40101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.097.438.968	25.962.172.022	1.135.266.946	4,19
40101202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.790.333.906	13.446.681.183	343.652.723	2,49
4010120201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.790.333.906	13.446.681.183	343.652.723	2,49
4010120201-51	BELANJA OPERASI	13.790.333.906	13.446.681.183	343.652.723	2,49
4010120201-5101	Belanja Pegawai	13.790.333.906	13.446.681.183	343.652.723	2,49
4010120201-510101	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	8.029.483.906	7.895.530.468	133.953.438	1,67
4010120201-51010101	Belanja Gaji Pokok ASN	5.847.704.705	5.743.785.120	103.919.585	1,78
4010120201-510101010001	Belanja Gaji Pokok PNS	5.847.704.705	5.743.785.120	103.919.585	1,78
4010120201-51010102	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	579.049.422	570.012.679	9.036.743	1,56
4010120201-510101020001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	579.049.422	570.012.679	9.036.743	1,56
4010120201-51010103	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	494.626.088	484.880.000	9.746.088	1,97
4010120201-510101030001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	494.626.088	484.880.000	9.746.088	1,97
4010120201-51010104	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	67.146.042	65.823.000	1.323.042	1,97
4010120201-510101040001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	67.146.042	65.823.000	1.323.042	1,97
4010120201-51010105	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	215.444.304	211.975.000	3.469.304	1,61
4010120201-510101050001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	215.444.304	211.975.000	3.469.304	1,61
4010120201-51010106	Belanja Tunjangan Beras ASN	368.902.864	363.113.880	5.788.984	1,57

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rupiah	(%)
4010120201-510101060001	Belanja Tunjangan Beras PNS	368.902.864	363.113.880	5.788.984	1,57
4010120201-51010107	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	34.666.285	34.019.488	646.797	1,87
4010120201-510101070001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	34.666.285	34.019.488	646.797	1,87
4010120201-51010108	Belanja Pembulatan Gaji ASN	78.174	77.013	1.161	1,49
4010120201-510101080001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	78.174	77.013	1.161	1,49
4010120201-51010109	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	421.866.022	421.844.288	21.734	0,01
4010120201-510101090001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	421.866.022	421.844.288	21.734	0,01
4010120201-51010112	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	0	0	0	0
4010120201-510101120001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	0	0	0	0
4010120201-510102	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.742.100.000	5.551.150.715	190.949.285	3,33
4010120201-51010201	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.296.840.000	2.217.692.276	79.147.724	3,45
4010120201-510102010001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.296.840.000	2.217.692.276	79.147.724	3,45
4010120201-51010205	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	3.445.260.000	3.333.458.439	111.801.561	3,25
4010120201-510102050001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3.445.260.000	3.333.458.439	111.801.561	3,25
4010120201-510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	18.750.000	0	18.750.000	100
4010120201-51010302	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	18.750.000	0	18.750.000	100
4010120201-510103020014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	18.750.000	0	18.750.000	100
40101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.859.925.100	3.734.454.684	125.470.416	3,25
4010120601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	149.995.500	140.397.770	9.597.730	6,4
4010120601-51	BELANJA OPERASI	149.995.500	140.397.770	9.597.730	6,4
4010120601-5102	Belanja Barang dan Jasa	149.995.500	140.397.770	9.597.730	6,4
4010120601-510201	Belanja Barang	149.995.500	140.397.770	9.597.730	6,4
4010120601-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	149.995.500	140.397.770	9.597.730	6,4
4010120601-510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	149.995.500	140.397.770	9.597.730	6,4
4010120602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	199.995.500	197.040.963	2.954.537	1,48
4010120602-51	BELANJA OPERASI	194.460.500	191.621.438	2.839.062	1,46
4010120602-5101	Belanja Pegawai	2.400.000	1.100.000	1.300.000	54,17
4010120602-510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.400.000	1.100.000	1.300.000	54,17

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rupiah	(%)
4010120602-51010307	Belanja Honorarium	2.400.000	1.100.000	1.300.000	54,17
4010120602-510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.400.000	1.100.000	1.300.000	54,17
4010120602-5102	Belanja Barang dan Jasa	192.060.500	190.521.438	1.539.062	0,8
4010120602-510201	Belanja Barang	192.060.500	190.521.438	1.539.062	0,8
4010120602-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	192.060.500	190.521.438	1.539.062	0,8
4010120602-510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	104.667.500	104.593.591	73.909	0,07
4010120602-510201010013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	5.700.000	5.328.000	372.000	6,53
4010120602-510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	35.279.000	34.750.237	528.763	1,5
4010120602-510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	40.618.000	40.221.217	396.783	0,98
4010120602-510201010038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	5.796.000	5.628.393	167.607	2,89
4010120602-52	BELANJA MODAL	5.535.000	5.419.525	115.475	2,09
4010120602-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.535.000	5.419.525	115.475	2,09
4010120602-520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.285.000	3.280.000	5.000	0,15
4010120602-52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.285.000	3.280.000	5.000	0,15
4010120602-520205020003	Belanja Modal Alat Pembersih	3.285.000	3.280.000	5.000	0,15
4010120602-520207	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.250.000	2.139.525	110.475	4,91
4010120602-52020701	Belanja Modal Alat Kedokteran	2.250.000	2.139.525	110.475	4,91
4010120602-520207010001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	2.250.000	2.139.525	110.475	4,91
4010120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	149.999.300	147.226.930	2.772.370	1,85
4010120604-51	BELANJA OPERASI	149.999.300	147.226.930	2.772.370	1,85
4010120604-5102	Belanja Barang dan Jasa	149.999.300	147.226.930	2.772.370	1,85
4010120604-510201	Belanja Barang	149.999.300	147.226.930	2.772.370	1,85
4010120604-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	149.999.300	147.226.930	2.772.370	1,85
4010120604-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	68.969.000	68.157.230	811.770	1,18
4010120604-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	51.622.800	51.303.450	319.350	0,62
4010120604-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	18.855.000	18.805.000	50.000	0,27
4010120604-510201010032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	4.212.500	4.065.375	147.125	3,49
4010120604-510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.340.000	4.895.875	1.444.125	22,78

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rupiah	(%)
4010120605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	260.000.000	241.215.523	18.784.477	7,22
4010120605-51	BELANJA OPERASI	260.000.000	241.215.523	18.784.477	7,22
4010120605-5102	Belanja Barang dan Jasa	260.000.000	241.215.523	18.784.477	7,22
4010120605-510201	Belanja Barang	260.000.000	241.215.523	18.784.477	7,22
4010120605-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	260.000.000	241.215.523	18.784.477	7,22
4010120605-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	211.980.000	193.215.523	18.764.477	8,85
4010120605-510201010035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	48.020.000	48.000.000	20.000	0,04
4010120606	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	49.928.300	30.542.499	19.385.801	38,83
4010120606-51	BELANJA OPERASI	49.928.300	30.542.499	19.385.801	38,83
4010120606-5102	Belanja Barang dan Jasa	49.928.300	30.542.499	19.385.801	38,83
4010120606-510202	Belanja Jasa	49.928.300	30.542.499	19.385.801	38,83
4010120606-51020201	Belanja Jasa Kantor	49.928.300	30.542.499	19.385.801	38,83
4010120606-510202010062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	49.928.300	30.542.499	19.385.801	38,83
4010120608	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.250.000.000	2.249.897.000	103.000	0
4010120608-51	BELANJA OPERASI	2.250.000.000	2.249.897.000	103.000	0
4010120608-5102	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000.000	2.249.897.000	103.000	0
4010120608-510201	Belanja Barang	2.250.000.000	2.249.897.000	103.000	0
4010120608-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.250.000.000	2.249.897.000	103.000	0
4010120608-510201010043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	61.925.000	61.850.000	75.000	0,12
4010120608-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	881.500.000	881.495.700	4.300	0
4010120608-510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.306.575.000	1.306.551.300	23.700	0
4010120609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	800.006.500	728.133.999	71.872.501	8,98
4010120609-51	BELANJA OPERASI	800.006.500	728.133.999	71.872.501	8,98
4010120609-5102	Belanja Barang dan Jasa	800.006.500	728.133.999	71.872.501	8,98
4010120609-510201	Belanja Barang	78.250.000	32.595.192	45.654.808	58,34
4010120609-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	78.250.000	32.595.192	45.654.808	58,34
4010120609-510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	78.250.000	32.595.192	45.654.808	58,34
4010120609-510204	Belana Perjalanan Dinas	721.756.500	695.538.807	26.217.693	3,63
4010120609-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	721.756.500	695.538.807	26.217.693	3,63
4010120609-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	693.806.500	689.243.807	4.562.693	0,66
4010120609-510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	27.950.000	6.295.000	21.655.000	77,48

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rupiah	(%)
40101207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	279.735.000	270.490.000	9.245.000	3,3
4010120705	Pengadaan Mebel	0	0	0	0
4010120705-51	BELANJA OPERASI	0	0	0	0
4010120705-5101	Belanja Pegawai	0	0	0	0
4010120705-510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0	0	0	0
4010120705-51010307	Belanja Honorarium	0	0	0	0
4010120705-510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0	0	0	0
4010120705-52	BELANJA MODAL	0	0	0	0
4010120705-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
4010120705-520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0	0	0	0
4010120705-52020501	Belanja Modal Alat Kantor	0	0	0	0
4010120705-520205010004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0
4010120705-52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0	0	0	0
4010120705-520205020001	Belanja Modal Mebel	0	0	0	0
4010120706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	279.735.000	270.490.000	9.245.000	3,3
4010120706-51	BELANJA OPERASI	8.325.000	2.447.500	5.877.500	70,6
4010120706-5101	Belanja Pegawai	1.575.000	1.425.000	150.000	9,52
4010120706-510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.575.000	1.425.000	150.000	9,52
4010120706-51010307	Belanja Honorarium	1.575.000	1.425.000	150.000	9,52
4010120706-510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.575.000	1.425.000	150.000	9,52
4010120706-5102	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000	1.022.500	5.727.500	84,85
4010120706-510201	Belanja Barang	658.000	282.500	375.500	57,07
4010120706-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	658.000	282.500	375.500	57,07
4010120706-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	325.000	282.500	42.500	13,08
4010120706-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	333.000	0	333.000	100
4010120706-510202	Belanja Jasa	2.000.000	0	2.000.000	100
4010120706-51020201	Belanja Jasa Kantor	2.000.000	0	2.000.000	100
4010120706-510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.000.000	0	2.000.000	100
4010120706-510204	Belana Perjalanan Dinas	4.092.000	740.000	3.352.000	81,92
4010120706-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.092.000	740.000	3.352.000	81,92

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rupiah	(%)
4010120706-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.092.000	740.000	3.352.000	81,92
4010120706-52	BELANJA MODAL	271.410.000	268.042.500	3.367.500	1,24
4010120706-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	271.410.000	268.042.500	3.367.500	1,24
4010120706-520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.500.000	550.000	950.000	63,33
4010120706-52020501	Belanja Modal Alat Kantor	1.500.000	550.000	950.000	63,33
4010120706-520205010005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.500.000	550.000	950.000	63,33
4010120706-520206	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	121.910.000	120.742.500	1.167.500	0,96
4010120706-52020601	Belanja Modal Alat Studio	35.700.000	35.242.500	457.500	1,28
4010120706-520206010005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	35.700.000	35.242.500	457.500	1,28
4010120706-52020602	Belanja Modal Alat Komunikasi	86.210.000	85.500.000	710.000	0,82
4010120706-520206020001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	86.210.000	85.500.000	710.000	0,82
4010120706-520210	Belanja Modal Komputer	148.000.000	146.750.000	1.250.000	0,84
4010120706-52021001	Belanja Modal Komputer Unit	58.000.000	57.750.000	250.000	0,43
4010120706-520210010002	Belanja Modal Personal Computer	58.000.000	57.750.000	250.000	0,43
4010120706-52021002	Belanja Modal Peralatan Komputer	90.000.000	89.000.000	1.000.000	1,11
4010120706-520210020004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	90.000.000	89.000.000	1.000.000	1,11
4010120710	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	0
4010120710-51	BELANJA OPERASI	0	0	0	0
4010120710-5101	Belanja Pegawai	0	0	0	0
4010120710-510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0	0	0	0
4010120710-51010307	Belanja Honorarium	0	0	0	0
4010120710-510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0	0	0	0
4010120710-52	BELANJA MODAL	0	0	0	0
4010120710-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
4010120710-520206	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0	0	0	0
4010120710-52020601	Belanja Modal Alat Studio	0	0	0	0
4010120710-520206010001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	0	0	0	0
4010120710-520210	Belanja Modal Komputer	0	0	0	0
4010120710-52021001	Belanja Modal Komputer Unit	0	0	0	0
4010120710-520210010002	Belanja Modal Personal Computer	0	0	0	0

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rupiah	(%)
4010120710-52021002	Belanja Modal Peralatan Komputer	0	0	0	0
4010120710-520210020003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0	0	0	0
40101208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.674.804.472	4.159.542.045	515.262.427	11,02
4010120801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	11.175.000	3.825.000	25,5
4010120801-51	BELANJA OPERASI	15.000.000	11.175.000	3.825.000	25,5
4010120801-5102	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	11.175.000	3.825.000	25,5
4010120801-510201	Belanja Barang	15.000.000	11.175.000	3.825.000	25,5
4010120801-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	15.000.000	11.175.000	3.825.000	25,5
4010120801-510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	15.000.000	11.175.000	3.825.000	25,5
4010120802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.098.400.000	993.314.306	105.085.694	9,57
4010120802-51	BELANJA OPERASI	1.098.400.000	993.314.306	105.085.694	9,57
4010120802-5102	Belanja Barang dan Jasa	1.098.400.000	993.314.306	105.085.694	9,57
4010120802-510202	Belanja Jasa	1.098.400.000	993.314.306	105.085.694	9,57
4010120802-51020201	Belanja Jasa Kantor	1.098.400.000	993.314.306	105.085.694	9,57
4010120802-510202010059	Belanja Tagihan Telepon	199.200.000	120.099.206	79.100.794	39,71
4010120802-510202010060	Belanja Tagihan Air	199.200.000	189.107.500	10.092.500	5,07
4010120802-510202010061	Belanja Tagihan Listrik	700.000.000	684.107.600	15.892.400	2,27
4010120803	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	119.994.000	119.394.000	600.000	0,5
4010120803-51	BELANJA OPERASI	119.994.000	119.394.000	600.000	0,5
4010120803-5102	Belanja Barang dan Jasa	119.994.000	119.394.000	600.000	0,5
4010120803-510202	Belanja Jasa	119.994.000	119.394.000	600.000	0,5
4010120803-51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	119.994.000	119.394.000	600.000	0,5
4010120803-510202040117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	93.094.000	92.494.000	600.000	0,64
4010120803-510202040118	Belanja Sewa Mebel	26.900.000	26.900.000	0	0
4010120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.441.410.472	3.035.658.739	405.751.733	11,79
4010120804-51	BELANJA OPERASI	3.441.410.472	3.035.658.739	405.751.733	11,79
4010120804-5102	Belanja Barang dan Jasa	3.441.410.472	3.035.658.739	405.751.733	11,79
4010120804-510201	Belanja Barang	134.300.000	134.248.500	51.500	0,04
4010120804-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	134.300.000	134.248.500	51.500	0,04
4010120804-510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	108.300.000	108.248.500	51.500	0,05
4010120804-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.000.000	26.000.000	0	0

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rupiah	(%)
4010120804-510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0	0	0	0
4010120804-510202	Belanja Jasa	3.282.110.472	2.876.521.239	405.589.233	12,36
4010120804-51020201	Belanja Jasa Kantor	2.968.300.000	2.670.150.226	298.149.774	10,04
4010120804-510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	264.000.000	261.530.000	2.470.000	0,94
4010120804-510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	75.250.000	74.980.000	270.000	0,36
4010120804-510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.351.000.000	1.107.750.000	243.250.000	18,01
4010120804-510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	820.800.000	820.800.000	0	0
4010120804-510202010033	Belanja Jasa Tenaga Supir	252.000.000	208.250.000	43.750.000	17,36
4010120804-510202010034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	126.000.000	126.000.000	0	0
4010120804-510202010035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	21.000.000	21.000.000	0	0
4010120804-510202010071	Belanja Lembur	58.250.000	49.840.226	8.409.774	14,44
4010120804-51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	228.147.972	121.251.013	106.896.959	46,85
4010120804-510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	201.500.000	109.007.661	92.492.339	45,9
4010120804-510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	7.303.972	5.441.491	1.862.481	25,5
4010120804-510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	19.344.000	6.801.861	12.542.139	64,84
4010120804-51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	85.662.500	85.120.000	542.500	0,63
4010120804-510202040117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	18.000.000	17.560.000	440.000	2,44
4010120804-510202040118	Belanja Sewa Mebel	67.662.500	67.560.000	102.500	0,15
4010120804-510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	25.000.000	24.889.000	111.000	0,44
4010120804-51020502	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	25.000.000	24.889.000	111.000	0,44
4010120804-510205020001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	25.000.000	24.889.000	111.000	0,44
40101209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.918.837.540	1.814.866.216	103.971.324	5,42
4010120901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	250.000.000	244.735.107	5.264.893	2,11
4010120901-51	BELANJA OPERASI	250.000.000	244.735.107	5.264.893	2,11
4010120901-5102	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000	244.735.107	5.264.893	2,11
4010120901-510203	Belanja Pemeliharaan	250.000.000	244.735.107	5.264.893	2,11
4010120901-51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	250.000.000	244.735.107	5.264.893	2,11
4010120901-510203020035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	250.000.000	244.735.107	5.264.893	2,11

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rupiah	(%)
4010120902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	691.591.000	641.727.543	49.863.457	7,21
4010120902-51	BELANJA OPERASI	691.591.000	641.727.543	49.863.457	7,21
4010120902-5102	Belanja Barang dan Jasa	691.591.000	641.727.543	49.863.457	7,21
4010120902-510201	Belanja Barang	10.703.000	9.798.400	904.600	8,45
4010120902-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	10.703.000	9.798.400	904.600	8,45
4010120902-510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	10.000.000	9.518.400	481.600	4,82
4010120902-510201010013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	391.000	0	391.000	100
4010120902-510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	312.000	280.000	32.000	10,26
4010120902-510202	Belanja Jasa	115.888.000	68.489.300	47.398.700	40,9
4010120902-51020201	Belanja Jasa Kantor	115.888.000	68.489.300	47.398.700	40,9
4010120902-510202010067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	115.888.000	68.489.300	47.398.700	40,9
4010120902-510203	Belanja Pemeliharaan	565.000.000	563.439.843	1.560.157	0,28
4010120902-51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	565.000.000	563.439.843	1.560.157	0,28
4010120902-510203020035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	565.000.000	563.439.843	1.560.157	0,28
4010120905	Pemeliharaan Mebel	29.985.740	27.088.500	2.897.240	9,66
4010120905-51	BELANJA OPERASI	29.985.740	27.088.500	2.897.240	9,66
4010120905-5102	Belanja Barang dan Jasa	29.985.740	27.088.500	2.897.240	9,66
4010120905-510203	Belanja Pemeliharaan	29.985.740	27.088.500	2.897.240	9,66
4010120905-51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	29.985.740	27.088.500	2.897.240	9,66
4010120905-510203020118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	29.985.740	27.088.500	2.897.240	9,66
4010120906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.990.700	81.127.880	18.862.820	18,86
4010120906-51	BELANJA OPERASI	99.990.700	81.127.880	18.862.820	18,86
4010120906-5102	Belanja Barang dan Jasa	99.990.700	81.127.880	18.862.820	18,86
4010120906-510201	Belanja Barang	17.070.000	4.836.630	12.233.370	71,67
4010120906-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	17.070.000	4.836.630	12.233.370	71,67
4010120906-510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	17.070.000	4.836.630	12.233.370	71,67
4010120906-510203	Belanja Pemeliharaan	82.920.700	76.291.250	6.629.450	7,99
4010120906-51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	82.920.700	76.291.250	6.629.450	7,99
4010120906-510203020115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	3.410.000	3.220.000	190.000	5,57

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rupiah	(%)
4010120906-510203020121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	7.875.000	6.993.000	882.000	11,2
4010120906-510203020138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	16.266.000	10.950.000	5.316.000	32,68
4010120906-510203020195	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	11.037.250	10.957.000	80.250	0,73
4010120906-510203020410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	44.332.450	44.171.250	161.200	0,36
4010120906-52	BELANJA MODAL	0	0	0	0
4010120906-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
4010120906-520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0	0	0	0
4010120906-52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0	0	0	0
4010120906-520205020004	Belanja Modal Alat Pendingin	0	0	0	0
4010120907	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	19.903.600	19.500.000	403.600	2,03
4010120907-51	BELANJA OPERASI	19.903.600	19.500.000	403.600	2,03
4010120907-5102	Belanja Barang dan Jasa	19.903.600	19.500.000	403.600	2,03
4010120907-510203	Belanja Pemeliharaan	19.903.600	19.500.000	403.600	2,03
4010120907-51020305	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	19.903.600	19.500.000	403.600	2,03
4010120907-510203050028	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	19.903.600	19.500.000	403.600	2,03
4010120909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	827.366.500	800.687.186	26.679.314	3,22
4010120909-51	BELANJA OPERASI	827.366.500	800.687.186	26.679.314	3,22
4010120909-5102	Belanja Barang dan Jasa	827.366.500	800.687.186	26.679.314	3,22
4010120909-510201	Belanja Barang	542.336.500	519.413.186	22.923.314	4,23
4010120909-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	542.336.500	519.413.186	22.923.314	4,23
4010120909-510201010001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	437.502.200	430.587.779	6.914.421	1,58
4010120909-510201010005	Belanja Bahan-Bahan Baku	45.116.800	44.000.000	1.116.800	2,48
4010120909-510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	59.717.500	44.825.407	14.892.093	24,94
4010120909-510202	Belanja Jasa	119.520.000	119.440.000	80.000	0,07
4010120909-51020201	Belanja Jasa Kantor	119.520.000	119.440.000	80.000	0,07
4010120909-510202010016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	119.520.000	119.440.000	80.000	0,07
4010120909-510203	Belanja Pemeliharaan	165.510.000	161.834.000	3.676.000	2,22

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rupiah	(%)
4010120909-51020303	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	165.510.000	161.834.000	3.676.000	2,22
4010120909-510203030001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	165.510.000	161.834.000	3.676.000	2,22
40101211	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	169.876.950	168.195.000	1.681.950	0,99
4010121101	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	169.876.950	168.195.000	1.681.950	0,99
4010121101-51	BELANJA OPERASI	169.876.950	168.195.000	1.681.950	0,99
4010121101-5101	Belanja Pegawai	169.876.950	168.195.000	1.681.950	0,99
4010121101-510105	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	169.876.950	168.195.000	1.681.950	0,99
4010121101-51010501	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.146.000	54.600.000	546.000	0,99
4010121101-510105010001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.146.000	54.600.000	546.000	0,99
4010121101-51010502	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.157.160	4.116.000	41.160	0,99
4010121101-510105020001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.157.160	4.116.000	41.160	0,99
4010121101-51010503	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	99.262.300	98.280.000	982.300	0,99
4010121101-510105030001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	99.262.300	98.280.000	982.300	0,99
4010121101-51010504	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.388.652	4.345.200	43.452	0,99
4010121101-510105040001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.388.652	4.345.200	43.452	0,99
4010121101-51010505	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.483.852	1.469.160	14.692	0,99
4010121101-510105050001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.483.852	1.469.160	14.692	0,99
4010121101-51010506	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.439	1.920	519	21,28
4010121101-510105060001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.439	1.920	519	21,28
4010121101-51010507	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.436.547	5.382.720	53.827	0,99
4010121101-510105070001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.436.547	5.382.720	53.827	0,99
40101212	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2.403.926.000	2.367.942.894	35.983.106	1,5
4010121201	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	335.964.000	335.918.404	45.596	0,01
4010121201-51	BELANJA OPERASI	315.500.000	315.500.000	0	0
4010121201-5102	Belanja Barang dan Jasa	315.500.000	315.500.000	0	0
4010121201-510201	Belanja Barang	315.500.000	315.500.000	0	0
4010121201-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	315.500.000	315.500.000	0	0
4010121201-510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	15.500.000	15.500.000	0	0

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rupiah	(%)
4010121201-510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	300.000.000	300.000.000	0	0
4010121201-52	BELANJA MODAL	20.464.000	20.418.404	45.596	0,22
4010121201-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.464.000	20.418.404	45.596	0,22
4010121201-520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	20.464.000	20.418.404	45.596	0,22
4010121201-52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	20.464.000	20.418.404	45.596	0,22
4010121201-520205020001	Belanja Modal Mebel	1.064.000	1.064.000	0	0
4010121201-520205020005	Belanja Modal Alat Dapur	19.400.000	19.354.404	45.596	0,24
4010121201-520205020006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0	0	0	0
4010121202	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	317.983.500	314.683.000	3.300.500	1,04
4010121202-51	BELANJA OPERASI	293.291.000	290.282.500	3.008.500	1,03
4010121202-5102	Belanja Barang dan Jasa	293.291.000	290.282.500	3.008.500	1,03
4010121202-510201	Belanja Barang	293.291.000	290.282.500	3.008.500	1,03
4010121202-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	293.291.000	290.282.500	3.008.500	1,03
4010121202-510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	11.291.000	11.282.500	8.500	0,08
4010121202-510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	282.000.000	279.000.000	3.000.000	1,06
4010121202-52	BELANJA MODAL	24.692.500	24.400.500	292.000	1,18
4010121202-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.692.500	24.400.500	292.000	1,18
4010121202-520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	24.692.500	24.400.500	292.000	1,18
4010121202-52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	24.692.500	24.400.500	292.000	1,18
4010121202-520205020001	Belanja Modal Mebel	13.840.000	13.548.000	292.000	2,11
4010121202-520205020005	Belanja Modal Alat Dapur	10.852.500	10.852.500	0	0
4010121203	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.749.978.500	1.717.341.490	32.637.010	1,86
4010121203-51	BELANJA OPERASI	1.646.702.000	1.618.782.990	27.919.010	1,7
4010121203-5101	Belanja Pegawai	1.800.000	1.700.000	100.000	5,56
4010121203-510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.800.000	1.700.000	100.000	5,56
4010121203-51010307	Belanja Honorarium	1.800.000	1.700.000	100.000	5,56
4010121203-510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.800.000	1.700.000	100.000	5,56
4010121203-5102	Belanja Barang dan Jasa	1.644.902.000	1.617.082.990	27.819.010	1,69
4010121203-510201	Belanja Barang	593.849.500	580.444.325	13.405.175	2,26
4010121203-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	593.849.500	580.444.325	13.405.175	2,26
4010121203-510201010010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	5.170.500	5.060.000	110.500	2,14

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rupiah	(%)
4010121203-510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	28.370.000	24.352.325	4.017.675	14,16
4010121203-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	75.450.000	67.567.500	7.882.500	10,45
4010121203-510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	67.225.000	66.657.500	567.500	0,84
4010121203-510201010039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	60.000.000	60.000.000	0	0
4010121203-510201010044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	47.140.000	47.139.500	500	0
4010121203-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.500.000	42.486.500	13.500	0,03
4010121203-510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	232.500.000	232.467.500	32.500	0,01
4010121203-510201010061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	2.000.000	1.942.500	57.500	2,88
4010121203-510201010062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	7.340.000	7.215.000	125.000	1,7
4010121203-510201010063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	6.900.000	6.743.250	156.750	2,27
4010121203-510201010065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	6.000.000	5.883.000	117.000	1,95
4010121203-510201010074	Belanja Pakaian Adat Daerah	3.832.000	3.800.000	32.000	0,84
4010121203-510201010075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	9.422.000	9.129.750	292.250	3,1
4010121203-510202	Belanja Jasa	349.802.500	337.036.400	12.766.100	3,65
4010121203-51020201	Belanja Jasa Kantor	124.028.000	117.681.400	6.346.600	5,12
4010121203-510202010007	Honorarium Rohaniwan	0	0	0	0
4010121203-510202010011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	27.400.000	27.078.000	322.000	1,18
4010121203-510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	30.000.000	25.805.000	4.195.000	13,98
4010121203-510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.628.000	1.190.000	1.438.000	54,72
4010121203-510202010048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	0	0	0	0
4010121203-510202010051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	4.000.000	3.840.000	160.000	4
4010121203-510202010055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	60.000.000	59.768.400	231.600	0,39
4010121203-51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	194.539.500	194.290.500	249.000	0,13
4010121203-510202040022	Belanja Sewa Electric Generating Set	20.000.000	19.800.000	200.000	1
4010121203-510202040036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	6.400.000	6.400.000	0	0
4010121203-510202040117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	168.139.500	168.090.500	49.000	0,03
4010121203-51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
4010121203-510202050009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0	0	0	0
4010121203-51020212	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	31.235.000	25.064.500	6.170.500	19,76

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rupiah	(%)
4010121203-510202120001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	31.235.000	25.064.500	6.170.500	19,76
4010121203-510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	701.250.000	699.602.265	1.647.735	0,23
4010121203-51020502	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	701.250.000	699.602.265	1.647.735	0,23
4010121203-510205020001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	701.250.000	699.602.265	1.647.735	0,23
4010121203-52	BELANJA MODAL	103.276.500	98.558.500	4.718.000	4,57
4010121203-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	103.276.500	98.558.500	4.718.000	4,57
4010121203-520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	103.276.500	98.558.500	4.718.000	4,57
4010121203-52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	103.276.500	98.558.500	4.718.000	4,57
4010121203-520205020001	Belanja Modal Mebel	30.500.000	30.500.000	0	0
4010121203-520205020004	Belanja Modal Alat Pendingin	37.496.500	33.058.500	4.438.000	11,84
4010121203-520205020006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	35.280.000	35.000.000	280.000	0,79
	Jumlah Belanja	27.097.438.968	25.962.172.022	1.135.266.946	4,19

8) BAGIAN ORGANISASI

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rupiah	(%)
	SP2D		71.315.250		
	Pelimpahan		43.026.594		
	Pengembalian Kas Daerah		474.885		
5	BELANJA DAERAH	114.445.500	113.866.959	578.541	0,51
40101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	114.445.500	113.866.959	578.541	0,51
40101213	Penataan Organisasi	114.445.500	113.866.959	578.541	0,51
4010121301	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	65.000.000	64.961.930	38.070	0,06
4010121301-51	BELANJA OPERASI	65.000.000	64.961.930	38.070	0,06
4010121301-5102	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000	64.961.930	38.070	0,06
4010121301-510201	Belanja Barang	8.244.500	8.207.000	37.500	0,45
4010121301-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	8.244.500	8.207.000	37.500	0,45
4010121301-510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.370.000	2.370.000	0	0
4010121301-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	35.500	35.500	0	0
4010121301-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.239.000	1.201.500	37.500	3,03
4010121301-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.000.000	2.000.000	0	0
4010121301-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.600.000	2.600.000	0	0
4010121301-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0	0	0	0
4010121301-510202	Belanja Jasa	33.300.000	33.300.000	0	0

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rupiah	(%)
4010121301-51020201	Belanja Jasa Kantor	33.300.000	33.300.000	0	0
4010121301-510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	33.300.000	33.300.000	0	0
4010121301-510204	Belana Perjalanan Dinas	23.455.500	23.454.930	570	0
4010121301-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	23.455.500	23.454.930	570	0
4010121301-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23.455.500	23.454.930	570	0
4010121302	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	24.445.500	24.413.379	32.121	0,13
4010121302-51	BELANJA OPERASI	24.445.500	24.413.379	32.121	0,13
4010121302-5102	Belanja Barang dan Jasa	24.445.500	24.413.379	32.121	0,13
4010121302-510201	Belanja Barang	7.677.000	7.652.000	25.000	0,33
4010121302-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	7.677.000	7.652.000	25.000	0,33
4010121302-510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	500.000	500.000	0	0
4010121302-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	717.000	717.000	0	0
4010121302-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	590.000	565.000	25.000	4,24
4010121302-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.090.000	5.090.000	0	0
4010121302-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	780.000	780.000	0	0
4010121302-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0	0	0	0
4010121302-510202	Belanja Jasa	8.270.000	8.270.000	0	0
4010121302-51020201	Belanja Jasa Kantor	8.270.000	8.270.000	0	0
4010121302-510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.500.000	3.500.000	0	0
4010121302-510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.770.000	4.770.000	0	0
4010121302-510204	Belana Perjalanan Dinas	8.498.500	8.491.379	7.121	0,08
4010121302-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.498.500	8.491.379	7.121	0,08
4010121302-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.498.500	8.491.379	7.121	0,08
4010121303	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	25.000.000	24.491.650	508.350	2,03
4010121303-51	BELANJA OPERASI	25.000.000	24.491.650	508.350	2,03
4010121303-5102	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	24.491.650	508.350	2,03
4010121303-510201	Belanja Barang	7.108.000	6.665.150	442.850	6,23
4010121303-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	7.108.000	6.665.150	442.850	6,23
4010121303-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	198.000	198.000	0	0
4010121303-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	590.000	572.500	17.500	2,97
4010121303-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.600.000	1.599.650	350	0,02
4010121303-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.040.000	1.040.000	0	0

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rupiah	(%)
4010121303-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.680.000	3.255.000	425.000	11,55
4010121303-510202	Belanja Jasa	12.120.000	12.120.000	0	0
4010121303-51020201	Belanja Jasa Kantor	12.120.000	12.120.000	0	0
4010121303-510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	12.120.000	12.120.000	0	0
4010121303-510204	Belana Perjalanan Dinas	5.772.000	5.706.500	65.500	1,13
4010121303-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.772.000	5.706.500	65.500	1,13
4010121303-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.772.000	5.706.500	65.500	1,13
	Jumlah Belanja	114.445.500	113.866.959	578.541	0,51

9) BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rupiah	(%)
	SP2D		2.138.860.810		
	Pelimpahan		1.801.209.392		
	Pengembalian Kas Daerah		2.952.260		
5	BELANJA DAERAH	3.983.840.500	3.937.117.942	46.722.558	1,17
40101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.983.840.500	3.937.117.942	46.722.558	1,17
40101211	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	889.176.000	866.442.563	22.733.437	2,56
4010121102	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	249.176.000	247.181.120	1.994.880	0,8
4010121102-51	BELANJA OPERASI	249.176.000	247.181.120	1.994.880	0,8
4010121102-5102	Belanja Barang dan Jasa	249.176.000	247.181.120	1.994.880	0,8
4010121102-510201	Belanja Barang	237.176.000	235.181.120	1.994.880	0,84
4010121102-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	237.176.000	235.181.120	1.994.880	0,84
4010121102-510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	250.000	250.000	0	0
4010121102-510201010059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	43.716.000	43.146.000	570.000	1,3
4010121102-510201010062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	30.000.000	29.836.040	163.960	0,55
4010121102-510201010063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	7.000.000	6.500.000	500.000	7,14
4010121102-510201010064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	21.600.000	21.570.000	30.000	0,14
4010121102-510201010065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	45.480.000	45.225.552	254.448	0,56
4010121102-510201010066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	16.500.000	16.340.000	160.000	0,97
4010121102-510201010073	Belanja Pakaian KORPRI	13.200.000	13.000.000	200.000	1,52
4010121102-510201010075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	46.200.000	46.114.528	85.472	0,19
4010121102-510201010076	Belanja Pakaian Olahraga	13.230.000	13.199.000	31.000	0,23
4010121102-510202	Belanja Jasa	12.000.000	12.000.000	0	0

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rupiah	(%)
4010121102-51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	12.000.000	12.000.000	0	0
4010121102-510202040117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	12.000.000	12.000.000	0	0
4010121103	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	40.000.000	21.560.500	18.439.500	46,1
4010121103-51	BELANJA OPERASI	40.000.000	21.560.500	18.439.500	46,1
4010121103-5102	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000	21.560.500	18.439.500	46,1
4010121103-510202	Belanja Jasa	40.000.000	21.560.500	18.439.500	46,1
4010121103-51020201	Belanja Jasa Kantor	40.000.000	21.560.500	18.439.500	46,1
4010121103-510202010015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	40.000.000	21.560.500	18.439.500	46,1
4010121104	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000	597.700.943	2.299.057	0,38
4010121104-51	BELANJA OPERASI	600.000.000	597.700.943	2.299.057	0,38
4010121104-5101	Belanja Pegawai	600.000.000	597.700.943	2.299.057	0,38
4010121104-510106	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	600.000.000	597.700.943	2.299.057	0,38
4010121104-51010602	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000	597.700.943	2.299.057	0,38
4010121104-510106020001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000	597.700.943	2.299.057	0,38
40101214	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3.094.664.500	3.070.675.379	23.989.121	0,78
4010121401	Fasilitasi Keprotokolan	952.414.500	940.697.263	11.717.237	1,23
4010121401-51	BELANJA OPERASI	952.414.500	940.697.263	11.717.237	1,23
4010121401-5102	Belanja Barang dan Jasa	952.414.500	940.697.263	11.717.237	1,23
4010121401-510201	Belanja Barang	671.610.800	671.047.363	563.437	0,08
4010121401-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	671.610.800	671.047.363	563.437	0,08
4010121401-510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	21.040.000	21.033.378	6.622	0,03
4010121401-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.217.500	7.131.250	86.250	1,2
4010121401-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.176.000	1.122.500	53.500	4,55
4010121401-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	824.800	824.750	50	0,01
4010121401-510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.000.000	1.000.000	0	0
4010121401-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	269.660.000	269.613.775	46.225	0,02
4010121401-510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	299.000.000	298.881.710	118.290	0,04
4010121401-510201010062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	51.692.500	51.440.000	252.500	0,49
4010121401-510201010075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	20.000.000	20.000.000	0	0
4010121401-510202	Belanja Jasa	227.599.700	216.499.100	11.100.600	4,88
4010121401-51020201	Belanja Jasa Kantor	184.332.500	176.219.500	8.113.000	4,4
4010121401-510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	96.000.000	88.000.000	8.000.000	8,33
4010121401-510202010048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	30.000.000	30.000.000	0	0
4010121401-510202010071	Belanja Lembur	58.332.500	58.219.500	113.000	0,19

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rupiah	(%)
4010121401-51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	6.907.200	3.919.600	2.987.600	43,25
4010121401-510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.000.000	3.520.000	2.480.000	41,33
4010121401-510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	403.200	177.600	225.600	55,95
4010121401-510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	504.000	222.000	282.000	55,95
4010121401-51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	36.360.000	36.360.000	0	0
4010121401-510202040117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	36.360.000	36.360.000	0	0
4010121401-510204	Belana Perjalanan Dinas	53.204.000	53.150.800	53.200	0,1
4010121401-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	53.204.000	53.150.800	53.200	0,1
4010121401-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	53.204.000	53.150.800	53.200	0,1
4010121402	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.350.500.000	1.350.173.427	326.573	0,02
4010121402-51	BELANJA OPERASI	1.350.500.000	1.350.173.427	326.573	0,02
4010121402-5102	Belanja Barang dan Jasa	1.350.500.000	1.350.173.427	326.573	0,02
4010121402-510201	Belanja Barang	308.001.000	307.693.224	307.776	0,1
4010121402-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	308.001.000	307.693.224	307.776	0,1
4010121402-510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	21.700.000	21.644.525	55.475	0,26
4010121402-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.600.000	3.496.500	103.500	2,88
4010121402-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	999.000	979.500	19.500	1,95
4010121402-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	71.102.000	71.095.000	7.000	0,01
4010121402-510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000	500.000	0	0
4010121402-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	210.100.000	209.977.699	122.301	0,06
4010121402-510202	Belanja Jasa	120.000.000	120.000.000	0	0
4010121402-51020201	Belanja Jasa Kantor	120.000.000	120.000.000	0	0
4010121402-510202010055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	120.000.000	120.000.000	0	0
4010121402-510204	Belana Perjalanan Dinas	922.499.000	922.480.203	18.797	0
4010121402-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	922.499.000	922.480.203	18.797	0
4010121402-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	922.499.000	922.480.203	18.797	0
4010121403	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	791.750.000	779.804.689	11.945.311	1,51
4010121403-51	BELANJA OPERASI	584.169.000	575.025.389	9.143.611	1,57
4010121403-5102	Belanja Barang dan Jasa	584.169.000	575.025.389	9.143.611	1,57
4010121403-510201	Belanja Barang	157.391.800	157.118.900	272.900	0,17
4010121403-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	157.391.800	157.118.900	272.900	0,17
4010121403-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	295.000	267.500	27.500	9,32
4010121403-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	114.621.800	114.616.400	5.400	0
4010121403-510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	700.000	700.000	0	0

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rupiah	(%)
4010121403-510201010028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0	0	0	0
4010121403-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.510.000	3.490.500	19.500	0,56
4010121403-510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.725.000	6.717.500	7.500	0,11
4010121403-510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	31.540.000	31.327.000	213.000	0,68
4010121403-510202	Belanja Jasa	204.882.200	201.715.500	3.166.700	1,55
4010121403-51020201	Belanja Jasa Kantor	197.975.000	197.443.500	531.500	0,27
4010121403-510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	96.000.000	96.000.000	0	0
4010121403-510202010037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	0	0	0	0
4010121403-510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	75.000.000	75.000.000	0	0
4010121403-510202010063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	0	0	0	0
4010121403-510202010071	Belanja Lembur	26.975.000	26.443.500	531.500	1,97
4010121403-51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	6.907.200	4.272.000	2.635.200	38,15
4010121403-510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.000.000	3.840.000	2.160.000	36
4010121403-510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	403.200	192.000	211.200	52,38
4010121403-510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	504.000	240.000	264.000	52,38
4010121403-510203	Belanja Pemeliharaan	35.945.000	35.945.000	0	0
4010121403-51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	35.945.000	35.945.000	0	0
4010121403-510203020132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	35.945.000	35.945.000	0	0
4010121403-510204	Belanja Perjalanan Dinas	185.950.000	180.245.989	5.704.011	3,07
4010121403-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	185.950.000	180.245.989	5.704.011	3,07
4010121403-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	185.950.000	180.245.989	5.704.011	3,07
4010121403-510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0	0	0	0
4010121403-51020501	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0	0	0	0
4010121403-510205010001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	0	0	0	0
4010121403-52	BELANJA MODAL	207.581.000	204.779.300	2.801.700	1,35
4010121403-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	207.581.000	204.779.300	2.801.700	1,35
4010121403-520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.000.000	6.000.000	0	0
4010121403-52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	6.000.000	6.000.000	0	0
4010121403-520205020006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.000.000	6.000.000	0	0

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rupiah	(%)
4010121403-520206	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	82.500.000	79.980.000	2.520.000	3,05
4010121403-52020601	Belanja Modal Alat Studio	75.000.000	72.480.000	2.520.000	3,36
4010121403-520206010002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	75.000.000	72.480.000	2.520.000	3,36
4010121403-52020602	Belanja Modal Alat Komunikasi	7.500.000	7.500.000	0	0
4010121403-520206020001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	7.500.000	7.500.000	0	0
4010121403-520210	Belanja Modal Komputer	119.081.000	118.799.300	281.700	0,24
4010121403-52021001	Belanja Modal Komputer Unit	110.000.000	109.775.000	225.000	0,2
4010121403-520210010002	Belanja Modal Personal Computer	110.000.000	109.775.000	225.000	0,2
4010121403-52021002	Belanja Modal Peralatan Komputer	9.081.000	9.024.300	56.700	0,62
4010121403-520210020003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	9.081.000	9.024.300	56.700	0,62
	Jumlah Belanja	3.983.840.500	3.937.117.942	46.722.558	1,17

2. Analisa Efisiensi

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis dan program pada tahun 2022, Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung didukung dengan anggaran sebesar Rp. 71.890.951.668,- dengan realisasi sebesar Rp. 68.703.701.248,- (95,57%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 3.187.250.420 (4,4%). Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 3,05% (selisih capaian kinerja sebesar 98,62% dengan realisasi anggaran 95,57%).

Sasaran ini didukung oleh 3 (tiga) program yaitu Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Program Perekonomian dan Pembangunan dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2022 didukung anggaran sebesar Rp 37.905.536.200,- dengan realisasi Rp 37.133.650.414,- (98%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 771.885.786,- atau 2%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar

2% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran (98%).

2. Program Perekonomian dan Pembangunan

Secara Keseluruhan untuk mencapai target Kinerja Program Perekonomian dan Pembangunan pada tahun 2022 didukung anggaran sebesar Rp 2.789.690.500,- dengan realisasi Rp 1.556.893.911,- (55,81%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 123.2796.589,- atau 44%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 41,41% (selisih capaian kinerja sebesar 97,22% dengan realisasi anggaran (55,81%)

Realisasi anggaran 56% terdapat pada Bagian Perekonomian, Program Perekonomian dan Pembangunan kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam, karena adanya Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 906/923/KEUDA tanggal 5 Februari 2021 tentang perihal hasil inventarisasi dan pemetaan (mapping) klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, Bidang Kesejahteraan Masyarakat, Kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota terdapat pada kode rekening 4.01.03.2.04.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan diampu oleh bagian yang membidangi perekonomian dan sumber daya alam pada masing-masing Sekretariat DBHCHT Kabupaten/kota. BA Pemetaan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dialihkan pada kode rekening 1.06.05.2.02.03 Fasilitasi

Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga diampu oleh Dinas Sosial.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota didukung anggaran sebesar Rp 31.195.724.968,- dengan realisasi Rp 30.013.156.923,- (96%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 1.182.568.045,- atau 4%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 4% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran (96%).

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2022. Penyusunan LKjIP ini berdasarkan pada hasil capaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Tinjauan umum capaian kinerja berdasarkan hasil analisis LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 100 Tahun 2021 tanggal 1 November 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung rata-rata capaiannya yaitu 99,17% masuk dalam kategori sangat memuaskan dan capaian rata-rata indikator kinerja sasaran adalah sebesar 96,23% masuk dalam kategori sangat memuaskan;
3. Secara keseluruhan dari 3 (tiga) capaian kinerja sasaran program, Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 99,07% dibandingkan

penggunaan anggaran sebesar 83,27%, sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 15,80%.

4. Berdasarkan analisa efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai sasaran, dilakukan dengan cara membandingkan persentase realisasi anggaran dengan persentase realisasi kinerja sasaran. Dengan hal tersebut dapat diketahui dari 3 (tiga) sasaran strategis, ketiganya telah menggunakan sumberdaya secara efisien.

B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Setda Kabupaten Temanggung di masa mendatang antara lain:

1. Melaksanakan review Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung secara berkala;
2. Meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran dengan mengacu pada pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan;
3. Menyusun rencana aksi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung pada awal tahun;
4. Menambah sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan pekerjaan.

Temanggung, 1 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



Drs. HARY AGUNG PRABOWO, M.M.

Pembina Utama Madya
NIP. 19680119 199311 1 001